



RENSTRA 2025 - 2029

DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG

DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG
Email : dinpermadestmg@gmail.com
Website : dinpermades.temanggungkab.go.id
Faximili : (0293) 5345345
Telp : (0293) 419915

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

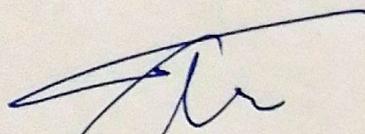
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan



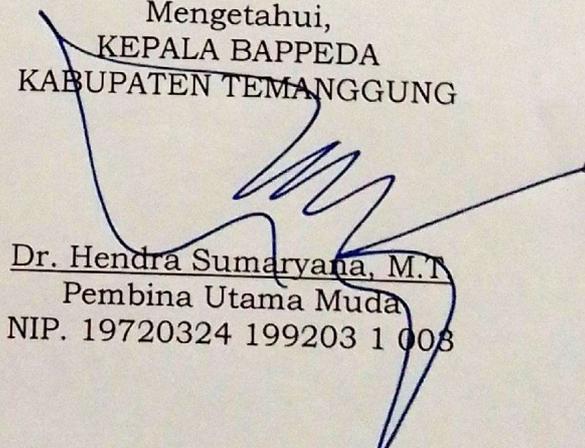
EWIEK KHAVIDA, S.STP,MM
NIP.19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



TAUFAN RINALDI, S.STP
NIP. 19970707 202008 1 003

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. Hendra Sumaryana, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memuat tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusa Pemerintah Daerah, Dinpermades pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra Dinpermades Tahun 2025-2029 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra Dinpermades.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam Upaya mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 September 2025
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


Umi Lestari Nugraha, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600808 199603 2 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR VERIFIKASI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	Iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3.Maksud dan Tujuan.....	6
1.4.Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat.....	10
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	24
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	30
BAB V PENUTUP.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Data Personil dan Tata Laksana Dinpermades....	16
Tabel 2. 2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinpermades.....	17
Tabel 2. 3	Capaian indikator SPM Dinpermades.....	18
Tabel 2. 4	Capaian indikator kinerja utama Dinpermades...	19
Tabel 2. 5	Capaian indikator kinerja kunci Dinpermades....	19
Tabel 2.6.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	21
Tabel 2.6.2	Permasalahan dan Isu Strategis.....	23
Tabel 3. 3	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinpermades.....	26
Tabel 3. 4	Pentahapan Renstra Dinpermades.....	27
Tabel 3. 5	Arah Kebijakan Renstra Dinpermades.....	27
Tabel 4. 2	Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinpermades Tahun 2025-2029.....	32
Tabel 4. 3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	42
Tabel 4. 4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	66
Tabel 4. 5	Dukungan terhadap Program Prioritas Gubernur.....	67
Tabel 4. 6	Daftar Program Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Strategis Nasional.....	69
Tabel 4. 7	Indikator Kinerja Utama Dinpermades.....	71
Tabel 4. 8	Indikator Kinerja Kunci Dinpermades.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah..	2
Gambar 2. 1	Peta Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.....	10
Gambar 3. 1	Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	25
Gambar 3. 2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	25
Gambar 4. 1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

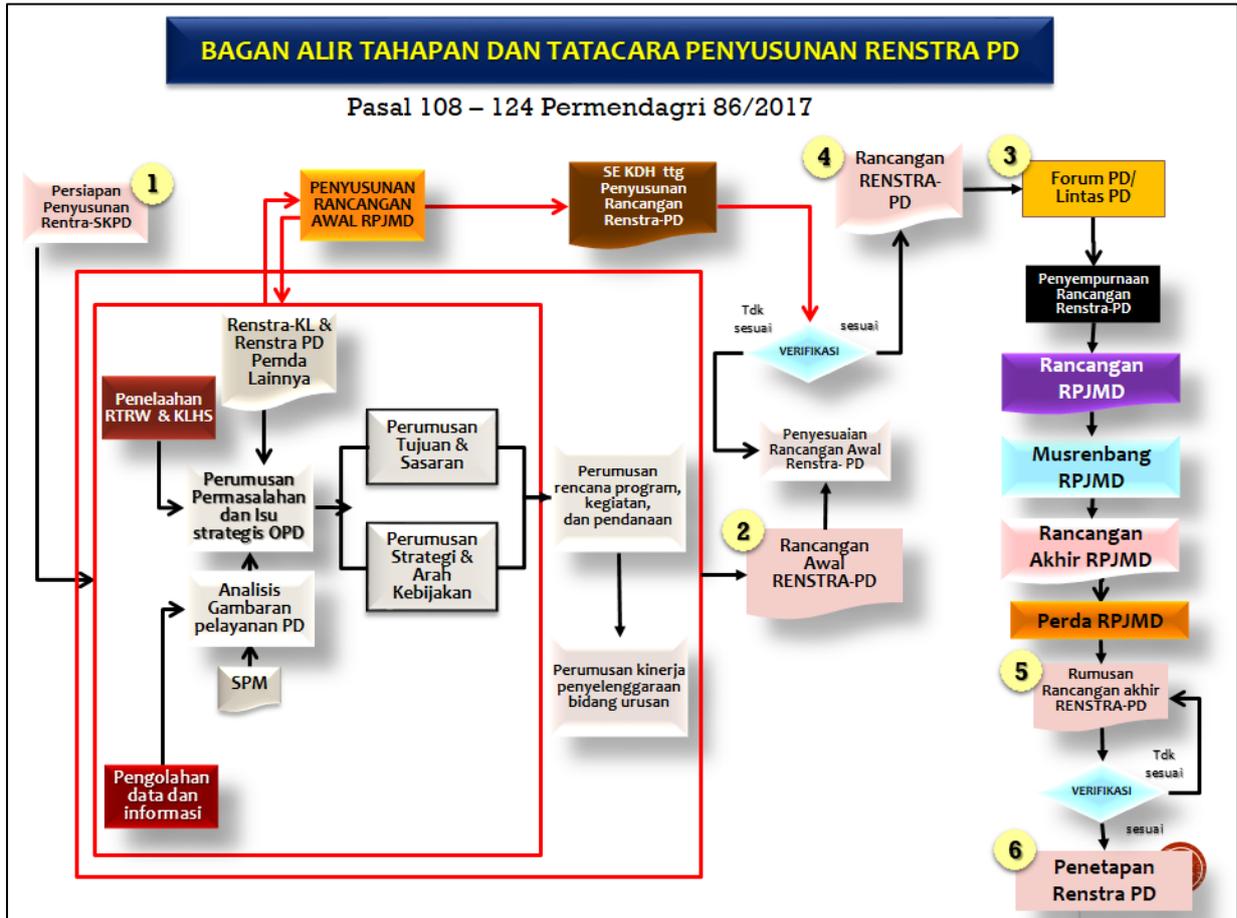
1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan prioritas pembangunan daerah

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.

- d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :
- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya perangkat daerah
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah; dan
- d. Kelompok sasaran layanan

2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah memuat:

- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
- b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan fungsi:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dengan melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;

- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi kerjasama desa, perencanaan dan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan desa;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris Dinas memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas dengan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hokum, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan system informasi dan dokumentasi;

- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan dan usaha ekonomi Masyarakat Desa serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi Desa dengan melaksanakan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usaha ekonomi masyarakat desa;
 - c. Penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan usahakan ekonomi masyarakat desa, serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi desa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan desa, kebijakan perimbangan keuangan kepada desa, fasilitasi penyusunan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, fasilitasi pengadaan barang/jasa di desa serta fasilitasi pengelolaan asset desa dengan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan desa;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan perimbangan keuangan kepada desa;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyusunan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan asset desa;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengadaan barang/jasa di desa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemerintahan Desa
- Kepala Bidang Pemerintahan Desa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan Desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa dengan melaksanakan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewenangan pemerintah Desa;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pemerintah Desa;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - d. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata pemerintahan Desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

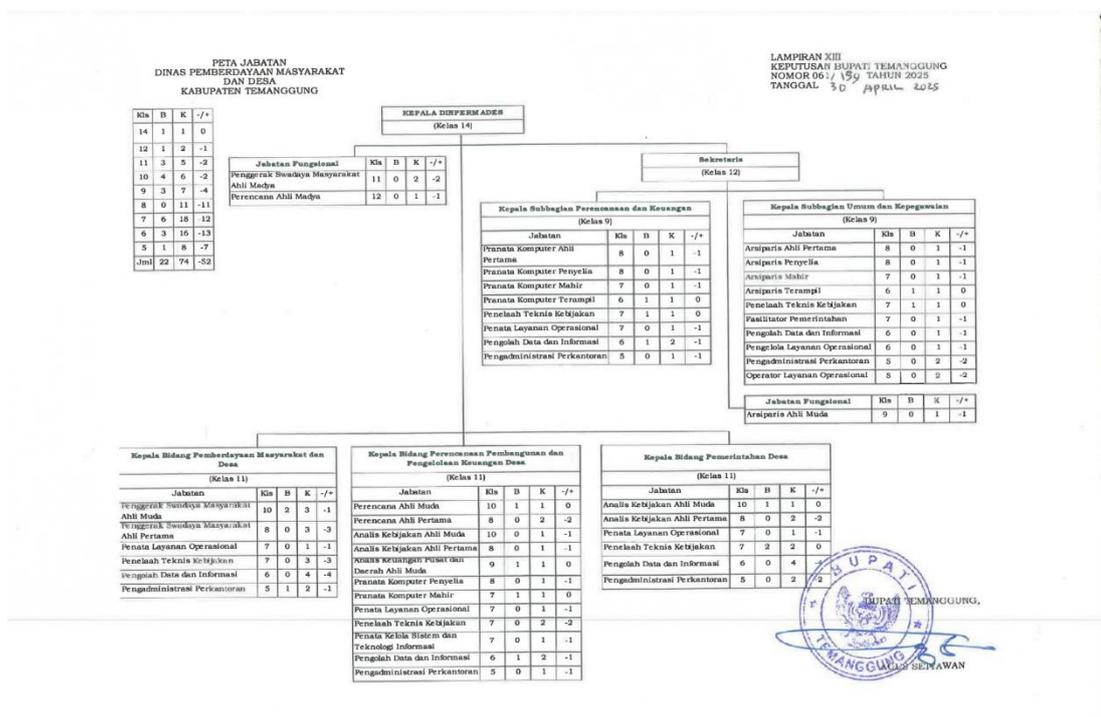
2.1.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Keputusan Bupati Temanggung Nomor 061/159 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berikut gambar Peta Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung:

Gambar 2.1
Peta Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai

menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUA I PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/PANGKA T*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SL TA	D 1	D 2	D 3	S 1	S 2	S 3	I	II	III	IV	P I M I	PI M II	PI M III	PIM IV
Eselon 1															
Eselon 2															
KEPALA DINPERMADES						1					1			1	
Eselon 3															
SEKRETARIS						1					1				1
KABID PMD					1					1					1
KABID P3KD						1					1				
KABID PEMDES					1						1				
Eselon 4															
KASUBBAG RENKEU					1					1					1
KASUBBAG UMPEG					1					1					
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA					1					1					
PERENCANA AHLI MUDA					1					1					
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA					2					2					
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA					1					1					
PRANATA KOMPUTER MAHIR				1						1					
BENDAHARA				1						1					
ANALIS MANAJEMEN PERKANTORAN					1					1					
ANALIS KELEMBAGAAN					1					1					

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)						GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				
	SL TA	D 1	D 2	D 3	S 1	S 2	S 3	I	II	III	IV	P I M I	PI M II	PI M III	PIM IV
ANALIS DESA DAN KELURAHAN					1	1				1	1				
VERIFIKATOR KEUANGAN				1					1						
ARSIPARIS TERAMPIL				1					1						
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL				1					1						
PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA			1						1						

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Gedung dan Bangunan	2	616.275.000	2 RR
2	Kendaraan Roda 4	5	631.904.000	1 B 4 RR
3	Kendaraan Roda 2	17	253.722.500	17 RR
4	Mesin Ketik	1	650.000	1 RB
5	Mesin Absen	1	12.425.000	1 RB
6	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Alat Kantor Lainnya	58	146.367.600	58 RR

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
7	Meubelair	12	66.103.500	12 RR
8	Alat Pembersih	34	32.500.000	34 RR
9	Alat Dapur	1	800.000	1 RR
10	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	600.000	1 B
11	Meja Kerja	13	60.491.150	13 RR
12	Meja Rapat	29	55.598.500	29 RR
13	Kursi Kerja	1	5.000.000	1 RR
14	Lemari Arsip	38	51.392.500	25 RR 13 RB
15	Peralatan Studio Audio	2	10.000.000	2 RR
16	Peralatan Studio Video dan Film	2	12.200.000	1 B 1 RB
17	Peralatan Studio	8	29.500.000	4 RR 4 RB
18	Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah Alat Komunikasi Telepon	1	4.650.000	1 RB
19	Peralatan Antena SHF/Parabola	1	2.500.000	1 RB
20	Alat Kedokteran Umum (Clinical Thermometer)	1	1.500.000	1 RB
21	Jaringan Komputer	2	4.533.500	2 RB
22	Personal Komputer	1	3.465.000	
23	Peralatan Personal Komputer	66	486.804.000	8 B 24 RR 34
24	Peralatan Jaringan	37	113.981.000	RB
25		2	133.950.000	5 B 13 RR 19 RB

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3
Capaian indikator SPM Dinpermades

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
NIHIL							

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung tidak mempunyai Indikator SPM.

2.1.3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
Capaian indikator kinerja utama Dinpermades

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase desa yang ber predikat mandiri	3,67	5,63	9,77	20,68	37,97	

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa persentase desa yang berpredikat Mandiri pada ssetiap tahunnya terus meningkat dan bertambah.

2.1.3.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian indikator kinerja kunci Dinpermades

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	-	67,43%	79,52%	80%	81%	

Berdasarkan Tabel 2.5. diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung mempunyai 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Yang pertama yaitu

Persentase pengentasan desa tertinggal dengan rumus perhitungan jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun dibagi jumlah desa tertinggal (per awal tahun n), Rumus IKK kedua yaitu Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun dibagi jumlah desa berkembang (per awal tahun n).

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa
2. Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
3. Masyarakat

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Tabel.2.6.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengadaan Barang /Jasa di Desa	Masih ditemukan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang belum sesuai ketentuan	Kemampuan beberapa TPK masih belum memadai
2	Belum semua BUMDes/BU MDesma berbadan hukum.	183 BUMDes belum berbadan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha BUMDes tidak berjalan - Terkendala proses administrasi pengusulan Badan Hukum - Keengganan pengurus BUMDes untuk memproses Kembali perbaikan dokumen
3	Belum semua Desa menetapkan Perdes LKD berdasarkan Perbup nomor 51 tahun 2023 Terbitnya Permendagri 13 tahun 2024 tentang Posyandu	Perbup 51 Tahun 2023 belum sesuai dengan Permendagri 13 tahun 2024 tentang Posyandu	Posyandu yang ada saat ini hanya melayani bidang kesehatan
4	Terdapat beberapa desa yang membangun sarana prasarana nya di luar wilayah administrasi	Belum ada Regulasi yang mengatur tentang batas desa di Kabupaten Temanggung	Besarnya biaya untuk melakukan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa	SOTK Pemerintah Desa belum mencerminkan beban kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua desa mencapai Tingkat perkembangan desa dengan caapaian Desa Swasembada - Keterbatasan anggaran untuk Pemberian SILTAP apabila SOTK desa dimaksimalkan karena ADD cenderung tetap (tidak ada kenaikan) - Beberapa desa tidak cukup tersedia tanah bengkok sebagai tambahan tunjangan kesejahteraan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

1. Pengadaan Barang/Jasa di Desa belum optimal
2. Belum semua BUMDes/BUMDesma berbadan hukum.
3. Belum semua Desa menetapkan Perdes LKD.
4. Penataan Desa di Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan secara optimal.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan

capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.2
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Keterseediaan regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dan Desa 2. Perkembangan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan Desa	Masih ditemukan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang belum sesuai ketentuan 183 BUMDes belum berbadan hukum 2 BUMDes ma belum berbadan hukum	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan yang Akuntabel	Perdamaian Keadilan dan kelembagaan yang kuat	Geopolitik dan Geoekonomi	Tata Kelola pemerintahan yang dinamis Kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan administrasi Desa

Dari tabel permasalahan dan isu strategis dapat dilihat bahwa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat Isu Strategis yaitu belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan administrasi Desa

BAB III

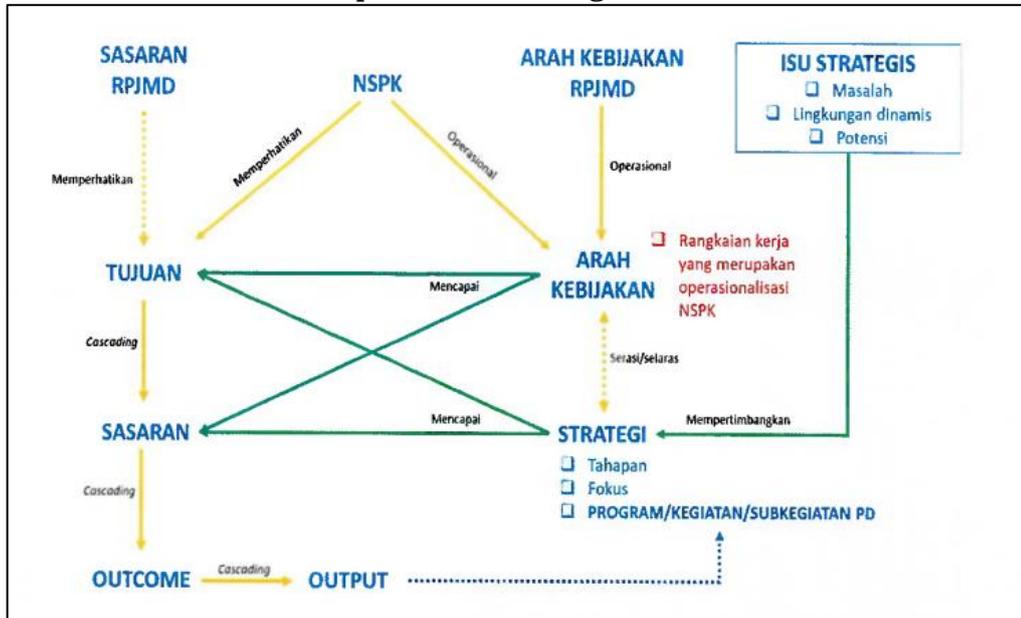
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

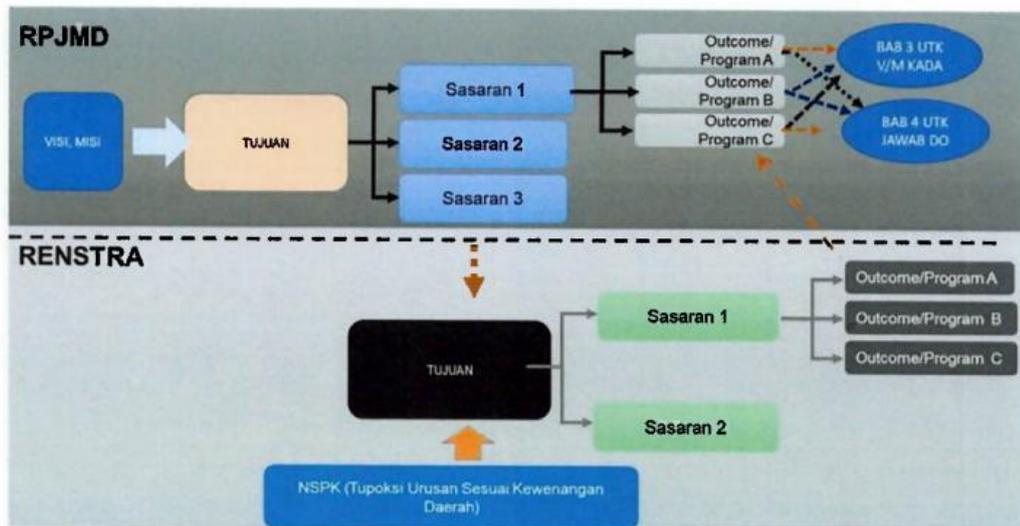
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	BASE LINE 2024	Target						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik Desa Mandiri	Meningkatnya kemandirian desa	-	Persentase Status Desa Mandiri	37.96	39.47	41.35	43.23	45.11	46.99	48.87	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan di desa serta Pemberdayaan Desa berbasis Masyarakat	Nilai Skor Indeks Desa (%)	89.85	91.35	92.86	94.36	96.24	98.12	100	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	80.95	81.00	81.25	81.50	81.75	82.00	82.25	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70.00	70.09	70.10	70.15	70.20	70.25	70.30	

Ket : Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline

5.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan pemerintah di atasnya	Penguatan kelembagaan dan sumber daya Pemerintah Desa	Optimalisasi penyelenggaraan posyandu dengan 6 pelayanan dasar dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Terbangunnya desa digital dan penguatan Lembaga ekonomi desa (BUMDesa)	Terwujudnya kemandirian Desa di Kabupaten Temanggung

5.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Strategi yang dilakukan
1	1. Kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat Desa	1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat 2. Peningkatan tata kelola	Peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan kapasitas bagi perangkat desa terkait dengan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Strategi yang dilakukan
	2. Tata Kelola Pemerintahan Desa,	Pemerintah Desa	menuju Desa Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> tupoksi dan PBJ 2. Peningkatan kapasitas bagi Ketua dan anggota BPD dan LKD 3. Meningkatkan kualitas “Coaching clinic” bagi perangkat Desa yang baru 4. Peningkatan layanan data yang terkait tupoksi 5. Peningkatan budaya literasi membaca 6. Fasilitasi penyusunan Perdes serta evaluasi dan klarifikasi Perdes 7. Peningkatan pengawasan internal Dinpermdes 8. Mendorong peningkatan SDM Dinpermades dalam pelayanan kepada masyarakat (Pemdes)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 8 strategi yang akan dilakukan Dinpermades dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

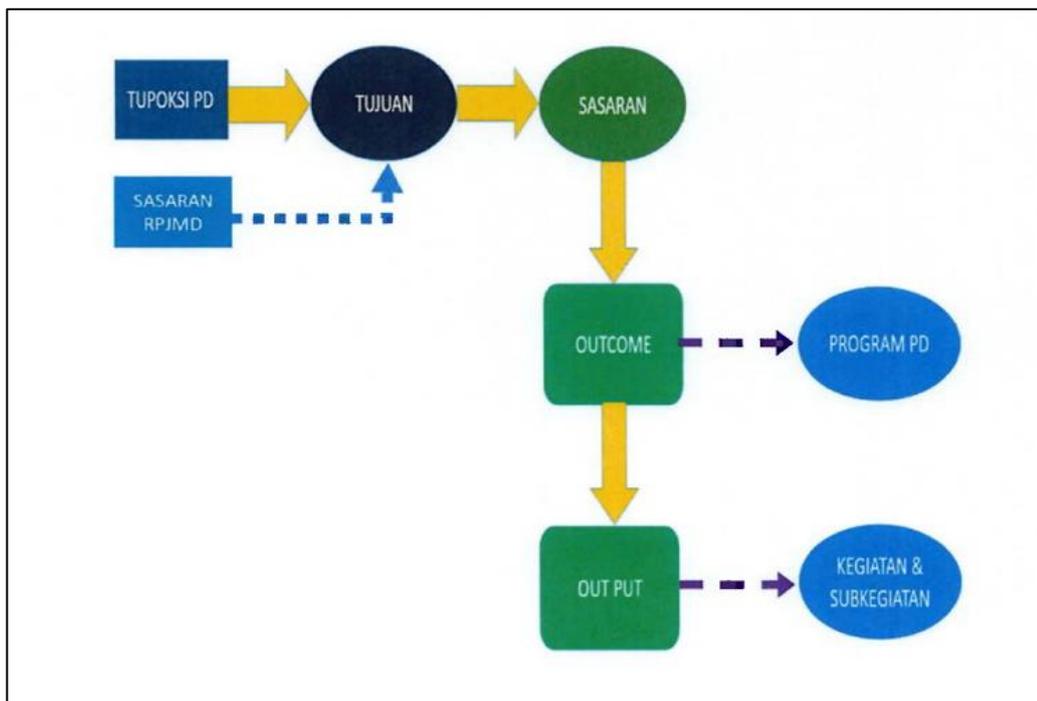
Dinpermades juga menampung masukan dari unsur yang ada baik itu Lembaga Masyarakat atau saran dan masukan dari masyarakat yang disampaikan dalam Forum PD antara lain :

1. Pemerintahan desa yang strategis dan efektif, agar semua program yang turun didesa bisa diberdayakan dengan masyarakat yang berpotensi agar bisa lebih berkembang (TJSLP)
2. IPM Kabupaten Temanggung masih rendah, terkait dengan ATS (Anak Putus Sekolah), Butuh kebijakan untuk menyerap ATS mau seperti apa dan harapan tahun 2025 ada kebijakan dan dapat bekerjasama dengan Dinpermades kepada Lurah/kades agar anak-anak mau bersekolah (Forum PKBM)
3. Pembudidayaan magot dari sampah desa. Pengelolaan sampah di desa mohon untuk didorong pengelolannya bersama-sama desa sehingga bisa dimanfaatkan seperti bisa dijadikan pupuk dll (Sekcam Kaloran)
4. Ada program Desa Sadar Zakat → bisa dikolaborasikan. Mandirinya desa tidak hanya mengharapkan bantuan dari Pemda, akan tetapi dapat menumbuhkan kesadaran untuk berinfak berbagi sesama tetangga melalui zakat. Kerjasama BAZNAS, Dinpermades dan Kemenag. Baznaz ada program desa sadar zakat, maka perlu berkolaborasi dengan Dinpermades atau PD yg lainnya (Baznaz Temanggung). Berkaitan dengan hasil Forum PD tersebut sesuai dengan fungsi Dinpermades untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa, CSR/TJSLP maupun kelompok masyarakat untuk pelaksanaan usulan kegiatan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel 4.2.

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinpermades Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PRORAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya kemandirian desa				Persentase Desa Mandiri		
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan di desa serta Pemberdayaan Desa berbasis Masyarakat			Nilai Skor Indeks Desa		
			Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa		Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
			Meningkatnya Kerja Sama Desa		Persentase kerjasama antar Desa	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PRORAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel		Persentase desa dalam penyusunan LPPD tepat waktu	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PRORAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PRORAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase laporan LKD	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
					Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PRORAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Desa se-Kabupaten Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PRORAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PRORAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		
					Nilai AKIP Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PRORAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PRORAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	"2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor"	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PRORAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.13.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PRORAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini, dengan indikator outcome Meningkatnya Status Desa Mandiri terdapat 5 Program, 9 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan yang mendukung tercapaian Target 5 tahun kedepan

TABEL 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Outcome : Meningkatnya Status Desa Mandiri												
	Output : Terwujudnya peningkatan status desa Mandiri												
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				7.902.959.710		7.932.660.575		8.049.870.628		8.237.994.873		8.229.475.577	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.164.096.962,00		3.190.480.623,00		3.241.774.375,00		3.339.506.410,00		3.327.558.171,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	3.164.096.962,00	100	3.190.480.623,00	100	3.241.774.375,00	100	3.339.506.410,00	100	3.327.558.171,00	
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12		12		12		12		12		
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.655.277.678,00		2.659.277.678,00		2.686.571.430,00		2.760.303.465,00		2.724.355.234,00	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	29	2.655.277.678,00	29	2.659.277.678,00	29	2.686.571.430,00	29	2.760.303.465,00	29	2.724.355.234,00	
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.655.277.678,00		2.659.277.678,00		2.686.571.430,00		2.760.303.465,00		2.724.355.234,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	29	2.655.277.678,00	29	2.659.277.678,00	29	2.686.571.430,00	29	2.760.303.465,00	29	2.724.355.234,00	
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				160.000.000,00		176.383.661,00		188.383.661,00		200.383.661,00		212.383.661,00	
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	160.000.000,00	12	176.383.661,00	12	188.383.661,00	12	200.383.661,00	12	212.383.661,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12	12		12		12		12		12		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor"				4.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4.000.000,00	4	6.000.000,00	4	8.000.000,00	4	10.000.000,00	4	12.000.000,00		
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		21.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	20.000.000,00	2	21.000.000,00	2	23.000.000,00	2	25.000.000,00	1	27.000.000,00		
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00		31.000.000,00		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	4	24.000.000,00	4	25.000.000,00	4	27.000.000,00	4	29.000.000,00	4	31.000.000,00	
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		19.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1	19.000.000,00	
2.13.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				30.000.000,00		31.383.661,00		33.383.661,00		35.383.661,00		37.383.661,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	12	30.000.000,00	12	31.383.661,00	12	33.383.661,00	12	35.383.661,00	12	37.383.661,00	
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70.000.000,00		80.000.000,00		82.000.000,00		84.000.000,00		86.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	70.000.000,00	12	80.000.000,00	12	82.000.000,00	12	84.000.000,00	12	86.000.000,00	
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				238.819.284,00		242.819.284,00		250.819.284,00		258.819.284,00		266.819.276,00	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	238.819.284,00	12	242.819.284,00	12	250.819.284,00	12	258.819.284,00	12	266.819.276,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4		2		2		2		2		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		9.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	2.000.000,00	2	3.000.000,00	2	5.000.000,00	2	7.000.000,00	2	9.000.000,00	
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20.176.116,00		21.176.116,00		23.176.116,00		25.176.116,00		27.176.116,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	20.176.116,00	12	21.176.116,00	12	23.176.116,00	12	25.176.116,00	12	27.176.116,00	
2.13.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		11.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	10.000.000,00	12	11.000.000,00	12	13.000.000,00	12	15.000.000,00	12	17.000.000,00	
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				206.643.168,00		207.643.168,00		209.643.168,00		211.643.168,00		213.643.160,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12	12	206.643.168,00	12	207.643.168,00	12	209.643.168,00	12	211.643.168,00	12	213.643.160,00	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Kantor yang Disediakan													
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				107.500.000,00		109.500.000,00		113.500.000,00		117.500.000,00		121.500.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	107.500.000,00	2	109.500.000,00	2	113.500.000,00	2	117.500.000,00	2	121.500.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	22		22		22		22		22			
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000,00		81.000.000,00		83.000.000,00		85.000.000,00		87.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	22	80.000.000,00	22	81.000.000,00	22	83.000.000,00	22	85.000.000,00	22	87.000.000,00		
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				27.500.000,00		28.500.000,00		30.500.000,00		32.500.000,00		34.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2	2	27.500.000,00	2	28.500.000,00	2	30.500.000,00	2	32.500.000,00	2	34.500.000,00		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Dipelihara/Direhabilitasi													
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	Penataan Desa adalah tindakan Pemerintah daerah untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.	
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00	Fasilitasi Penataan Desa adalah fasilitasi oleh Pemerintah daerah dalam hal ini DinpermaDes bagi Desa yang akan melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.	
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00	TNI Manunggal Membangun Desa adalah wujud Operasi Bhakti TNI dan merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00	
Meningkatnya Kerja Sama Desa	Persentase kerjasama antar desa Persentase kerjasama desa dengan pihak ketiga	66,66 66,66	100 100	10.000.000,00	100 100	10.007.000,00	100 100	10.146.097,00	100 100	10.336.844,00	100 100	10.344.080,00	Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan,

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
														pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak
2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00	Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak	
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	66,66	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.	
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	66,66	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	LPPD adalah Dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan ini wajib disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota, bukan saja sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa. Namun juga melalui dokumen LPPD disertai lampiran-nya adalah refleksi dari bobot pencapaian kegiatan pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun anggaran.	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				4.558.862.748,00		4.562.053.952,00		4.625.466.502,00		4.712.425.272,00		4.715.723.970,00	Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan kegiatan keuangan pemerintahan Desa dimana dalam laporan tersebut menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Desa. Laporan Realisasi Anggaran Desa menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan Desa di susun dan ditetapkan dengan	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
														Peraturan Desa paling lambat pada akhir Tahun Anggaran
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel	Persentase desa dalam penyusunan LPPD tepat waktu Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	90 90	100 100	4.558.862.748,00	100 100	4.562.053.952,00	100 100	4.625.466.502,00	100 100	4.712.425.272,00	100 100	4.715.723.970,00		
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang tertib Adminidtrasi Pemerintahan Desa			4.558.862.748,00		4.562.053.952,00		4.625.466.502,00		4.712.425.272,00		4.715.723.970,00	administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Dengan kata lain, kegiatan kecil yang dapat dilakukan agar administrasi desa dapat terwujud adalah dengan tertib administrasi desa.	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	0	100	4.558.862.748,00	100	4.562.053.952,00	100	4.625.466.502,00	100	4.712.425.272,00	100	4.715.723.970,00		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Pemberhentian Kepala Desa													
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100	100		100		100		100		100			

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100	100		100		100		100		100			
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				10.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	RKPDesa singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen RKP Desa menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran desa, yakni APBDes. RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir September pada tahun berjalan	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	100	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	17.000.000,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00		
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				20.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00	Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan kegiatan keuangan pemerintahan Desa dimana dalam laporan tersebut menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Desa.	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
														Laporan Realisasi Anggaran Desa menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan Desa di susun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat pada akhir Tahun Anggaran
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100	100	20.000.000,00	100	22.000.000,00	100	23.000.000,00	100	27.000.000,00	100	30.000.000,00		
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			50.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		68.291.424,00		30.000.000,00	Perangkat Desa setelah dilantik wajib mendapatkan bimbingan teknis yang anggrannay bersumber dari, APBN, APB Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDes. Sehingga Pemerintah Kabupaten memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan pra tugas kepada perangkat desa yang baru	
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100	100	50.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	68.291.424,00	100	30.000.000,00		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				716.728.900,00		-		442.332.654,00		130.000.000,00		238.590.122,00	Adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100	100	716.728.900,00	100	-	100	442.332.654,00	100	130.000.000,00	100	238.590.122,00	
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				3.752.133.848,00		3.872.133.848,00		3.992.133.848,00		4.142.133.848,00		4.262.133.848,00	Pberdasarkan UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa DESA pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa harus mendapatkan Rekomendasi dari Bupati
Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100	100	3.752.133.848,00	100	3.872.133.848,00	100	3.992.133.848,00	100	4.142.133.848,00	100	4.262.133.848,00	
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				-		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	Profil Desa adalah publikasi tahunan yang berisi gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan,

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
														prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa yang datanya diisi melalui aplikasi Prodeskel.
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	100	100	-	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00		
2.13.04.2.01.0012 - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	100	100	-	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00		
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				-		20.000.000,00		20.000.000,00		100.000.000,00		20.000.000,00		Pengelolaan Aset Desa dan Inventarisasi aset desa wajib dilaporkan setiap tahun dan wajib diinput dalam Aplikasi Sipades
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	100	100	-	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	100.000.000,00	100	20.000.000,00		
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				10.000.000,00		532.920.104,00		30.000.000,00		130.000.000,00		30.000.000,00		Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Peningkatan

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
														kapasitas ini diikuti oleh ketua BPD se-Kabupaten Temanggung
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100	100	10.000.000,00	100	532.920.104,00	100	30.000.000,00	100	130.000.000,00	100	30.000.000,00		
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				-		30.000.000,00		31.000.000,00		50.000.000,00		35.000.000,00		Aplikasi Epdeskel Kemendagri adalah aplikasi yang digunakan untuk mengisi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna menentukan status tingkat perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa hasil dari isian formulir evaluasi diri yang ada didalam aplikasi epdeskel ini terdiri dari 3 kategori. Yaitu : 1. Desa Kurang Berkembang 2. Desa Berkembang 3. Desa Cepat Berkembang Lomba Desa adalah bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah dengan melakukan penjurangan desa dan kelurahan berprestasi. Adapun data dukung lomba Desa antara lain RPJMDes, APBDes, dokumen terkait ketahanan pangan

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100	100	-	100	30.000.000,00	100	31.000.000,00	100	50.000.000,00	100	35.000.000,00	
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				160.000.000,00		160.112.000,00		162.337.557,00		165.389.503,00		165.505.276,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD	1	8.33	160.000.000,00	16.67	160.112.000,00	25	162.337.557,00	33.33	165.389.503,00	41.67	165.505.276,00	Laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,PKK,Posyandu , LPMD dan Karang Taruna) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai aktivitas dan kinerja lembaga. Laporan ini mencerminkan sejauh mana lembaga Kemasyarakatan desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	38.34	40.60		42.85		45.11		47.36		49.62		Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasarkan atas dokumen yang menyajikan informasi mengenai kinerja serta capaian BUMDes dalam suatu periode tertentu. Dokumen dikeluarkan oleh Kemendes yang dirumuskan berdasarkan laporan BUMDesa mencakup

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
														aspek keuangan, operasional, manajerial, serta seberapa besar PADes yang dihasilkan oleh BUMDes
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				160.000.000,00		160.112.000,00		162.337.557,00		165.389.503,00		165.505.276,00	Fasilitasi Laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna) adalah fasilitasi dalam penyusunan dokumen yang berisi informasi mengenai aktivitas dan kinerja lembaga. Laporan ini mencerminkan sejauh mana lembaga Kemasyarakatan desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Desa se-Kabupaten Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	100	100	160.000.000,00	100	160.112.000,00	100	162.337.557,00	100	165.389.503,00	100	165.505.276,00		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	dan Masyarakat Hukum Adat													
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				3.752.133.848,00		3.872.133.848,00		3.992.133.848,00		4.142.133.848,00		4.262.133.848,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100	100	3.752.133.848,00	100	3.872.133.848,00	100	3.992.133.848,00	100	4.142.133.848,00	100	4.262.133.848,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Desa se-Kabupaten Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100	100	160.000.000,00	100	160.112.000,00	100	162.337.557,00	100	165.389.503,00	100	165.505.276,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100	100		100		100		100		100			

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100	100		100		100		100		100			
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				20.000.000,00		20.112.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa sehingga perlu

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
														dilakukan pembinaan agar LKD bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100	100	20.000.000,00	100	20.112.000,00	100	22.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00		
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						5.000.000,00		10.337.557,00		10.389.503,00		10.505.276,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	100	100		100	5.000.000,00	100	10.337.557,00	100	10.389.503,00	100	10.505.276,00		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				25.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00		
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100	100	15.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini terdapat 5 Program, 9 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan yang telah diuraikan dalam tabel diatas dengan masing-masing indikatornya, untuk Sub Kegiatan yang terkait BPD dijelaskan bahwa Peningkatan Kapasitas BPD hanya dilaksanakan di Tahun 2027 karena masa bhakti BPD berakhir di Tahun tersebut dan Peningkatan Kapasitas untuk ketua BPD yang baru masa jabatannya.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2.13.04 - Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						
			2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	Desa Digital
			2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	68.291.424,00	30.000.000,00	Desa Ceria
2	2.13.05 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
			2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000,00	20.112.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT/RW

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa ada 2 program, 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan Daerah. Dari kedua program tersebut mendukung program Bupati terpilih yaitu kegiatan Desa Berbasis Digital, Desa Ceria dan Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT/RW. Program Peningkatan Kesejahteraan Ketua RT/RW, Dinpermades berperan dalam hal fasilitasi namun untuk penempatan anggaran terdapat di BPKPAD karena kebijakan Bantuan Keuangan seluruhnya milik

Perangkat Daerah yang berwenang terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan sub kegiatan

Tabel 4.5
Dukungan terhadap Program Prioritas Gubernur

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Outcome/Output.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR			
	a. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	<p>Program Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p>	<p>Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa dengan baik</p> <p>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p>
	b. BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Meningkatnya pengelolaan Bumdes	<p>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Desa se-Kabupaten Temanggung</p>

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Outcome/Output.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	c. Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Meningkatnya tata kelola pemerintah desa yang profesional, berkualitas dan kolaboratif	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa dengan baik
Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
	d. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Meningkatnya kemandirian desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa dengan baik
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
Sub Kegiatan Fasilitasi Desa Digital			Terlaksananya fasilitasi pengembangan Desa Digital	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Outcome/Output.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	e. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Meningkatnya perekonomian desa melalui pemberdayaan koperasi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Desa se-Kabupaten Temanggung
			Sub Kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Terlaksananya peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

TABEL 4.6
Daftar Program Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Strategis Nasional

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Penanggulangan kemiskinan								
	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	20.000.000	22.000.000	23.000.000	27.000.000	30.000.000	BLT Desa, sumber anggaran Dana Desa

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
									Jamnanisasi sumber anggaran Dana Desa
									Rumah Tidak Layak Huni, sumber anggaran Dana Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Data Intervensi RTM (pemuahan kebutuhan dasar)
2	Pertumbuhan Ekonomi								
	- Percepatan pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Sinergitas BUMDes dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Dalam mendukung program Nasional percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Dinpermades berperan dalam:

1. Penyelenggaraan Sosialisasi di tingkat Kabupaten;
2. Penyelenggaraan Rapat Teknis/Sosialisasi Teknis di Tingkat Kecamatan;

3. Mengawal kegiatan penggalian potensi dan masalah yang ada di Desa;
4. Fasilitasi Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
5. Fasilitasi perubahan APB Desa dalam penganggaran untuk mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih; dan
6. Fasilitasi lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Desa Mandiri	%	37,96	39,47	41,35	43,23	45,11	46,99	48,87	
2	Nilai Skor Indeks desa	%	89,85	91,35	92,86	94,36	96,24	98,12	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	80,95	81	81,25	81,5	81,75	82	82,25	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	70	70,09	70,1	70,15	70,2	70,25	70,3	

Berdasarkan tabel 4.7. diatas dapat dilihat bahwa penilaian perkembangan desa melalui pengukuran Indeks Desa Mandiri baru dilaksanakan mulai tahun 2018. Pada tahun 2018 ada 1 desa dengan status Desa Mandiri, namun pada tahun 2019 desa tersebut berubah menjadi Desa Maju. Pada tahun 2020 ada sejumlah 10 desa dengan status Desa Mandiri. Pada tahun 2021 ada sejumlah 15 desa dengan status Desa Mandiri dan tahun 2022 ini sejumlah 26 desa, dan pada Tahun 2023 jumlah Desa Mandiri

ada 55 desa, sedangkan Tahun 2024 pada Triwulan IV ini ada 101 Desa yang sudah berstatus Mandiri dan untuk Tahun 2025 ini data olahan akan muncul di Triwulan III, dengan melihat hasil IDM di lima tahun sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Target Desa Mandiri cenderung terus bertambah, Oleh karena itu pada Renstra 5 tahun kedepan target capaian Desa Mandiri terus bertambah.

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase pengentasan desa tertinggal		%	1	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri		%	1	3.70	3.85	4	4.17	4.35	4.55	

Berdasarkan tabel 4.8. diketahui bahwa Target Persentase peningkatan status desa mandiri dari status desa berkembang adalah 1 desa/tahun, karena untuk jadi desa Mandiri status desa harus Maju terlebih dahulu sehingga Target yang dibuat hanya 1 desa per tahun dengan pertimbangan bahwa untuk mendongkrak Status Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri perlu dukungan fasilitas sarana dan prasarana, baik fasilitas Kesehatan dasar, fasilitas Pendidikan ekonomi dan lingkungan sesuai dengan indikator desa membangun.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan atau target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan

(*improving*) pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa



Umi Lestari Numanah, S.Sos, M.Si
NIP. 196606081996032004

LAMPIRAN
MANAJEMEN RISIKO

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	INDIKATOR KINERJA	PROSES BISNIS	KATEGORI RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Identifikasi penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan	Risiko Kebijakan	Kebijakan penentuan PD pengampu penanggulangan kemiskinan tidak sinkron dengan Tupoksi	RSP.25.13.16.01	8	Pengambilan Kebijakan yang tidak memperhatikan Tupoksi OPD	Permasalahan Kemiskinan tidak terurai	FGD penanggulangan kemiskinan Daerah secara berkala	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Identifikasi penanggulangan kemiskinan bukan merupakan tanggungjawab	RSP.25.13.16.02	8	Ego sektoral	1) Angka kemiskinan tidak menurun 2) Program tidak tepat sasaran	1) FGD tentang penanggulangan kemiskinan 2) Pembagian peran yang jelas untuk setiap perangkat Daerah yang ditetapkan dengan SK Bupati	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Adanya manipulasi data dalam proses penetapan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	RSP.25.13.16.03	6	1) Perangkat Daerah tidak memahami program/kegiatan yang terkait penanggulangan kemiskinan 2) Perangkat Daerah bekerja menurut kebiasaan	Target penurunan tingkat kemiskinan tidak tercapai meskipun anggaran sudah terserap	1) FGD tentang penanggulangan kemiskinan 2) Mendorong Perangkat Daerah untuk berfikir out the box	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Kemiskinan bukan Tupoksi Perangkat Daerah	RSP.25.13.16.04	8	1) Ego sektoral 2) Adanya prioritas/target kinerja PD yang dianggap lebih penting	Target penurunan kemiskinan tidak tercapai	Menetapkan Pembagian Peran Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan dengan SK Bupati	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Penetapan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak tepat	RSP.25.13.16.05	6	1) Perangkat Daerah tidak memahami program/kegiatan yang terkait penanggulangan kemiskinan 2) Perangkat Daerah bekerja menurut kebiasaan	Target identifikasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak tercapai	1) Melakukan Desk Program dan kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan 2) Memberikan sanksi tegas terhadap kepada Perangkat Daerah yang tidak mendukung Penanggulangan kemiskinan	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Tidak terlaksananya Identifikasi penanggulangan kemiskinan	RSP.25.13.16.06	3	Curah hujan tinggi dan perubahan iklim ekstrem.	Pelaksana Fasilitasi identifikasi kemiskinan terhambat	Melakukan antisipasi dengan melakukan metode identifikasi kemiskinan yang memperhatikan gangguan karena cuaca ekstrim atau perubahan iklim	Bupati	Januari - Desember
			Fasilitasi penanggulangan kemiskinan	Risiko Kebijakan	Kebijakan Sasaran penerima bantuan berbeda dengan kenyataan di lapangan	RSP.25.13.16.07	10	Pengambilan Kebijakan yang tidak memperhatikan kondisi riil di lapangan	Salah sasaran	Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan PD Terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Pemerintah desa tidak mematuhi ketentuan dalam menetapkan sasaran penerima manfaat program pengentasan kemiskinan	RSP.25.13.16.08	12	1) Penentuan sasaran masih dipengaruhi kedekatan personal atau kepentingan tertentu 2) Pendataan keluarga miskin belum menggunakan data yang valid, mutakhir, dan terverifikasi	1) Angka kemiskinan tidak menurun 2) Muncul konflik sosial atau kecemburuan antarwarga 3) Program tidak tepat sasaran	1) Melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala (DTKS, SDGs) 2) Mengoptimalkan peran kecamatan dan kabupaten dalam pengawasan	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Adanya manipulasi data dan penyimpangan dalam proses penetapan penerima manfaat program pengentasan kemiskinan	RSP.25.13.16.09	12	1) Tidak ada verifikasi dan validasi lapangan 2) Penggunaan data kemiskinan yang sudah usang atau tidak Update	1) Bantuan atau program tidak tepat sasaran, sehingga keluarga miskin yang sebenarnya justru tidak menerima manfaat 2) Target penurunan tingkat kemiskinan tidak tercapai meskipun anggaran sudah terserap	1) Melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat 2) Menetapkan penerima manfaat dengan SK Bupati 3) Memberikan sanksi tegas terhadap Petugas pendataan yang terbukti melakukan kecurangan	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Adanya anggapan Stake holder tidak berpihak pada masyarakat miskin	RSP.25.13.16.10	12	1) Data yang tidak Valid 2) salah sasaran	Target penurunan kemiskinan tidak tercapai	Menetapkan penerima manfaat dengan SK Bupati	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Adanya manipulasi data dan penyimpangan dalam proses penetapan penerima manfaat program pengentasan kemiskinan	RSP.25.13.16.11	12	1) Data yang tidak Valid 2) salah sasaran	Target Fasilitasi penurunan kemiskinan tidak tercapai sehingga target penurunan kemiskinan tidak tercapai	1) Melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat 2) Menetapkan penerima manfaat dengan SK Bupati 3) Memberikan sanksi tegas terhadap Petugas pendataan yang terbukti melakukan kecurangan	Bupati	Januari - Desember

				Risiko Bencana	Tidak terlaksananya fasilitas penanggulangan kemiskinan	RSP.25.13.16.12	6	Curah hujan tinggi dan perubahan iklim ekstrem.	Pelaksana Fasilitas penanggulangan kemiskinan terhambat	Melakukan antisipasi dengan melakukan metode fasilitasi penanggulangan kemiskinan yang memperhatikan gangguan karena cuaca ekstrim atau perubahan iklim	Bupati	Januari - Desember
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mekanisme Pelayanan		Risiko Kebijakan	Kebijakan Tidak Berorientasi pada pelayanan	RSP.25.13.16.13	4	Kebijakan lebih fokus pada prosedur internal daripada kebutuhan pengguna layanan	Pelayanan terasa kaku dan tidak ramah	1) Menyusun pelayanan berbasis kebutuhan 2) Melakukan survei harapan masyarakat terkait pelayanan	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Kebijakan pelayanan tidak dilaksanakan	RSP.25.13.16.14	8	SDM/petugas layanan tidak mematuhi SOP	Membingungkan masyarakat	1) Membuat SOP pelayanan kepada masyarakat yang mudah dipahami dan dilaksanakan 2) Mensosialisasikan SOP Layanan kepada masyarakat pengguna layanan	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Membeda-bedakan (diskriminasi) pelayanan kepada penggunaan layanan	RSP.25.13.16.15	3	Layanan bersifat manual saat masyarakat mulai mengharapkan layanan digital.	Pelayanan dianggap tidak modern atau lambat	1) Mengkaji tren dan perilaku pengguna layanan secara berkala 2) Modernisasi layanan berbasis digital (online, chatbot, aplikasi)	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Tidak Mematuhi Standar Pelayanan Publik (SPP)	RSP.25.13.16.16	6	Petugas pelayanan tidak menjalankan layanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan (UU No. 25 Tahun 2009).	Masyarakat tidak mendapat layanan yang transparan dan adil	Melakukan sosialisasi tentang Standar Pelayanan Publik	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Pelanggaran Etika atau alur prosedur pelayanan oleh Petugas	RSP.25.13.16.17	3	Petugas pelayanan melakukan tindakan tidak etis seperti diskriminasi, atau sikap tidak ramah.	Mengurangi kepercayaan publik	Penegakan kode etik	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Penyusunan mekanisme layanan tidak selesai	RSP.25.13.16.18	3	Perubahan iklim dan curah hujan ekstrem	Mekanisme pelayanan tidak bisa diterapkan secara maksimal	Penjadwalan ulang dalam penyusunan mekanisme layanan dengan memperhatikan faktor bencana dan perubahan cuaca ekstrim	Bupati	Januari - Desember
		Kompetensi SDM Pelaksanaan Pelayanan		Risiko Kebijakan	Kebijakan tidak berbasis analisis kebutuhan SDM sebagai petugas layanan	RSP.25.13.16.19	6	SDM Petugas layanan tidak terampil dan tidak menguasai apa yang seharusnya dilaksanakan	1) Pengguna layanan tidak puas 2) Adanya keluhan dari pengguna layanan	1) Melakukan bintek kepada petugas layanan 2) Melakukan rotasi petugas secara berkala	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	SDM petugas Pelayanan tidak mematuhi SOP	RSP.25.13.16.20	3	SDM Petugas pelayanan tidak mematuhi SOP	1) Penerima layanan tidak puas 2) potensi pelanggaran hukum.	1) Membuat layanan pengaduan, 2) Memasang CCTV 3) Membuat tanda larangan pungli serta menerapkan sanksi tegas	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Petugas meminta imbalan atas pelayanan yang telah diberikan	RSP.25.13.16.21	1	Petugas meminta imbalan di luar ketentuan resmi untuk mempercepat atau mempermudah pelayanan.	1) Muncul image yang buruk bagi petugas pelayanan 2) Pengguna layanan dirugikan.	1) Memberikan sanksi yang tegas kepada petugas pelayanan yang melanggar SOP/aturan 2) Menerapkan kembali nilai-nilai integritas dalam pelayanan	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Ekspektasi stakeholder tidak terpenuhi	RSP.25.13.16.22	4	Ekspektasi tidak memperhatikan SDM Petugas Pelayanan	1) Ketidakpuasan pengguna layanan 2) Layanan yang diharapkan yaitu mudah, cepat dan gratis tidak terpenuhi	Melakukan survei harapan pengguna sebelum menyusun kebijakan dan melakukan evaluasi kesesuaian layanan dengan ekspektasi	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Tidak dilibatkannya pengguna layanan dalam menyusun SOP	RSP.25.13.16.23	4	Kebijakan dibuat tanpa mendengarkan/uji publik kepada pengguna layanan	Terjadi keluhan Ketidakpuasan dari pengguna layanan	1) melakukan Forum konsultasi publik atau FGD dengan melibatkan pengguna layanan 2) secara berkala melakukan evaluasi terhadap SOP Pelayanan	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Pelatihan/Bintek terhadap Petugas pelayanan tidak terlaksana, Pelayanan tidak berjalan	RSP.25.13.16.24	1	Sistem pelayanan online/error, server down, gangguan jaringan	1) Layanan terganggu, 2) adanya keluhan/komplain dari pengguna layanan	1) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk Backup data 2) SOP penanganan gangguan sistem jika terjadi bencana, perubahan iklim atau cuaca ekstrem	Bupati	Januari - Desember
			Pelaksanaan Survei dan pelaporan	Risiko Kebijakan	Laporan survei dan data hasil survei tidak sinkron	RSP.25.13.16.25	4	Terlalu fokus pada hasil pelaporan yang baik tanpa memperhatikan hasil survei	Pelaporan Hasil survei tidak valid	1) FGD internal 2) Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Bupati	Januari - Desember

				Risiko Kepatuhan	Laporan tidak sesuai dengan hasil survei	RSP.25.13.16.26	4	terlalu fokus pada hasil survey yang baik	Laporan yang disusun tidak sesuai kenyataan riil hasil survey	1) Mendorong SDM pelaksanaan survei dan membuat laporan untuk membaca dan memahami Peraturan yang ada terkait SKM dan IKM 2) Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Manipulasi data, jawaban dan hasil survei	RSP.25.13.16.27	2	data, jawaban dan hasil survey tidak sesuai harapan	Laporan yang disusun tidak sesuai kenyataan riil hasil survey	1) Mendorong SDM Petugas Survei untuk bertindak profesional dan mengutamakan pelayanan 2) Mendorong SDM untuk melakukan evaluasi atas hasil riil SKM	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Pemangku kepentingan tidak menerima hasil survei yang sebenarnya	RSP.25.13.16.28	2	Adanya manipulasi data, jawaban dan hasil survei	Pengambilan kebijakan/keputusan yang salah	1) Melakukan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan 2) Melakukan Koordinasi dengan Bidang-bidang dan Perangkat Daerah terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Kesalahan dalam menentukan responden	RSP.25.13.16.29	4	1) Kompetensi SDM yang tidak memadai 2) Kurangnya koordinasi PD Terkait	Laporan yang disusun tidak sesuai ketentuan	1) Melakukan rapat koordinasi internal Dinperdades dalam menentukan Responden 2) Melakukan koordinasi dengan PD terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Terhambatnya proses penyusunan laporan SKM	RSP.25.13.16.30	1	Bencana atau cuaca ekstrim	pelaporan perencanaan tidak tepat waktu	Membuat tahapan koordinasi dengan memperhatikan dampak cuaca ekstrim dan perubahan iklim	Bupati	Januari - Desember
		Pertumbuhan Ekonomi	Identifikasi Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat yang menjadi kewenangan	Risiko Kebijakan	Kebijakan penentuan PD pengampu tidak sinkron dengan Tupoksi	RSP.25.13.16.31	6	Pengambilan Kebijakan yang tidak memperhatikan Tupoksi OPD	Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target	Evaluasi Tupoksi dan program prioritas baik nasional maupun daerah secara berkala	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Pertumbuhan ekonomi bukan merupakan tanggungjawab	RSP.25.13.16.32	9	Ego sektoral	Program/kegiatan tidak tepat sasaran	1) FGD program/kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 2) Pembagian peran yang jelas untuk setiap perangkat Daerah yang ditetapkan dengan SK Bupati	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Adanya manipulasi data program dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi	RSP.25.13.16.33	4	1) Perangkat Daerah tidak memahami program/kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 2) Perangkat Daerah bekerja menurut kebiasaan	Program/kegiatan tidak tepat sasaran	1) FGD program/kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 2) Pembagian peran yang jelas untuk setiap perangkat Daerah yang ditetapkan dengan SK Bupati	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Pejabat pemerintah dianggap tidak peka	RSP.25.13.16.34	3	1) Ego sektoral 2) Adanya prioritas/target kinerja PD yang dianggap lebih penting	Pertumbuhan ekonomi tidak tercapai	Menetapkan Pembagian Peran Perangkat Daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan SK Bupati	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Penetapan program dan kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi tidak tepat	RSP.25.13.16.35	4	Perangkat Daerah bekerja menurut kebiasaan	Identifikasi program dan kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi tidak tercapai	1) Melakukan Desk Program dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 2) Mendorong kepada Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja dan keluar dari zona nyaman	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Tidak terlaksananya Identifikasi Program/kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi	RSP.25.13.16.36	2	Curah hujan tinggi dan perubahan iklim ekstrem.	Pelaksana identifikasi program/kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi terhambat	Melakukan antisipasi dengan melakukan metode identifikasi program/kegiatan yang memperhatikan gangguan karena cuaca ekstrim atau perubahan iklim	Bupati	Januari - Desember
		Pertumbuhan Ekonomi	Fasilitasi peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sesuai kewenangan yang ditangani	Risiko Kebijakan	Perubahan Kebijakan tidak ditindaklanjuti	RSP.25.13.16.37	6	SDM kurang memahami peraturan yang ada	Pengelolaan kegiatan ekonomi masih berdasarkan kebiasaan dan tidak up to date	Bupati Menyusun Peraturan Bupati atau mengeluarkan SE tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Kegiatan ekonomi tidak ada payung hukumnya atau legalitasnya	RSP.25.13.16.38	9	1) Minimnya pendampingan teknis dalam proses legalisasi 2) Pemahaman pelaku ekonomi akan legalitas usaha rendah	1) pelaku ekonomi sulit menjalin kerja sama dengan pihak lain 2) Pertumbuhan ekonomi desa terhambat	1) Melakukan pendampingan kepada kepada pelaku usaha dalam mengurus legalitas 2) Rakor Perangkat Daerah terkait yang dipimpin Bupati	Bupati	Januari - Desember

				Risiko Fraud	Terjadinya manipulasi data, penyalahgunaan anggaran, kolusi, dan gratifikasi dalam fasilitasi pertumbuhan ekonomi	RSP.25.13.16.39	3	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang efektif.	Pertumbuhan ekonomi tidak tercapai	Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan sesuai ketentuan hukum.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Benturan kepentingan antara PD.	RSP.25.13.16.40	4	1) Perbedaan prioritas antara Penda, PD, dan masyarakat. 2) Minimnya koordinasi lintas sektoral/Perangkat Daerah	PD bergerak atau bekerja sesuai tupoksi tanpa ada koordinasi dengan PD lainnya	FGD dan Rakor antar PD dan stakeholder dipimpin oleh Bupati	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Terhambatnya pelaksanaan fasilitasi kegiatan akibat kendala teknis dan sumber daya	RSP.25.13.16.41	4	Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan.	Proses fasilitasi berjalan lambat, memengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan.	Melakukan rapat koordinasi antar OPD yang dipimpin Bapak Bupati	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi berpotensi menghambat kegiatan fasilitasi	RSP.25.13.16.42	1	1) Kondisi geografis desa yang rawan bencana. 2) Curah hujan tinggi dan perubahan iklim ekstrem. 3) Minimnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di tingkat desa	1) Kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum 2) Terhambatnya proses fasilitasi	Menyediakan sarana penunjang untuk mengantisipasi bencana alam dan non alam	Bupati	Januari - Desember
	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	PDRB per kapita	Identifikasi Kegiatan peningkatan PDRB per kapita sesuai kewenangan	Risiko Kebijakan	Adanya kebijakan atau aturan yang tumpang tindih	RSP.25.13.16.43	4	1) Kurangnya kajian mendalam kebijakan yang diambil 2) ego sektoral	Kegiatan yang diidentifikasi tidak tepat sasaran dan berpotensi menghambat pencapaian target	evaluasi bersama PD dan stake holder yang ada	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan identifikasi kegiatan dengan Tupoksi PD	RSP.25.13.16.44	12	Perangkat Daerah dipaksa untuk identifikasi kegiatan peningkatan PDRB sesuai dengan Tupoksi yang ada	Identifikasi terkesan asal-asalan	diterbitkan SK Bupati tentang pembagian peran PD dalam peningkatan PDRB	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Adanya kecurangan dalam proses identifikasi kegiatan yang mendukung peningkatan PDRB	RSP.25.13.16.45	3	Tidak ada pembaruan data secara berkala	Kegiatan yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi nyata	Mengintegrasikan data dengan PD terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Terjadi keterlambatan atau hambatan koordinasi dengan stake holder terkait	RSP.25.13.16.46	6	Perbedaan prioritas kegiatan	Proses identifikasi program/kegiatan tidak berjalan optimal.	Rapat koordinasi bersama yang dipimpin Bupati	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	keterbatasan SDM, peralatan, dan sistem pendukung	RSP.25.13.16.47	4	1) Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM untuk melakukan analisis dan pengolahan data. 2) Gangguan teknis pada jaringan internet/listrik 3) Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti komputer, laptop, atau perangkat lainnya	1) Terlambatnya proses identifikasi kegiatan, sehingga memengaruhi penyusunan perencanaan program peningkatan PDRB 2) Kesalahan dalam analisis data, yang berpotensi membuat rekomendasi kegiatan menjadi tidak tepat sasaran.	Membentuk tim teknis dengan bekerjasama dengan akademisi	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Hilangnya atau rusaknya data identifikasi kegiatan karena kerusakan sarana dan prasarana	RSP.25.13.16.48	2	Terjadinya bencana alam atau keadaan darurat seperti gempa bumi, atau kebakaran	Terganggunya proses koordinasi, pengumpulan data, dan penyusunan daftar kegiatan pendukung peningkatan PDRB	Menyimpan data berbasis online	Bupati	Januari - Desember
			Fasilitasi Kegiatan peningkatan PRB per kapita yang sesuai kewenangan	Risiko Kebijakan	Kurangnya kejelasan kebijakan mengenai peran Dinpermades sebagai fasilitator dalam mendukung peningkatan PDRB	RSP.25.13.16.49	9	Tupoksi utama berada di PD lain, tetapi Dinpermades tetap diminta berperan aktif tanpa dukungan regulasi yang memadai.	Tumpang tindih kewenangan, kurangnya sinergi, dan ketidakefektifan program.	Menyusun mekanisme kerja sama antar PD yang jelas	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Pelaksanaan fasilitasi kegiatan tidak sesuai dengan regulasi dan pedoman teknis	RSP.25.13.16.50	6	Kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku	Tidak ada peningkatan PDRB	Kejelasan pembagian wewenang PD sesuai dengan ketentuan regulasi.	Bupati	Januari - Desember

				Risiko Fraud	Laporan kegiatan direkayasa untuk memenuhi target peningkatan PDRB	RSP.25.13.16.51	6	Tekanan dari pimpinan untuk mengejar capaian kinerja	Data capaian tidak sesuai kondisi nyata	Peningkatan integritas	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Kurangnya dukungan terhadap fasilitasi kegiatan peningkatan PDRB	RSP.25.13.16.52	6	1) Faktor ego PD 2) merasa bukan tupoksi	Pelaksanaan Program dan kegiatan hanya sebatas memenuhi kewajiban/perintah	Pemahaman yang sama bahwa kita bekerja untuk kemajuan Kabupaten Temanggung bukan hanya PD	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Kurangnya tenaga pendamping dan SDM kompeten	RSP.25.13.16.53	9	Kapasitas SDM rendah dalam memahami teknis peningkatan PDRB	Kegiatan tidak berjalan efektif	1) Peningkatan Kapasitas SDM 2) FGD Peningkatan PDRB	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Fasilitasi kegiatan peningkatan PDRB tidak terlaksana	RSP.25.13.16.54	2	Perubahan iklim ekstrem pada saat fasilitasi kegiatan	Pendapatan masyarakat menurun, target penurunan Indeks Gini sulit tercapai	Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penanggulangan dampak cuaca ekstrem kepada masyarakat bersama BPBD	Bupati	Januari - Desember
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Identifikasi Kegiatan pengurangan tingkat pengangguran terbuka yang sesuai kewenangan		Risiko Kebijakan	Kebijakan penentuan PD mampu pengurangan tingkat pengangguran terbuka tidak sinkron dengan Tupoksi	RSP.25.13.16.55	6	Pengambilan Kebijakan yang tidak memperhatikan Tupoksi OPD	identifikasi program/kegiatan pengurangan tingkat pengangguran terbuka tidak tepat	Pembagian Peran (Program/Kegiatan) yang jelas untuk setiap OPD dengan SK Bupati	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Pengurangan Pengangguran Terbuka bukan merupakan tanggungjawab	RSP.25.13.16.56	6	Ego sektoral	Program/Kegiatan tidak tepat sasaran	FGD tentang pengurangan pengangguran terbuka	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Adanya manipulasi data dalam proses penetapan program dan kegiatan Pengurangan Pengangguran Terbuka	RSP.25.13.16.57	3	1) Perangkat Daerah tidak memahami program/kegiatan pengurangan Pengangguran terbuka 2) Perangkat Daerah bekerja menurut kebiasaan	Target pengurangan pengangguran terbuka tidak tercapai	1) FGD tentang Pengurangan Pengangguran Terbuka 2) Mendorong Perangkat Daerah untuk berfikir out the box	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Rendahnya komitmen PD/instansi/pihak terkait dalam mendukung proses identifikasi kegiatan Pengurangan Pengangguran terbuka.	RSP.25.13.16.58	4	1) Lemahnya koordinasi dan pembagian peran antara PD, instansi dan pihak terkait lainnya. 2) Rendahnya kesadaran PD/instansi/pihak terkait mengenai pentingnya pengurangan pengangguran terbuka	1) Identifikasi Program/kegiatan pengurangan pengangguran terbuka tidak maksimal 2) Program/kegiatan yang dihasilkan tidak tepat sasaran 3) Target pengurangan pengangguran terbuka sulit tercapai	Menetapkan peran dan tanggung jawab setiap PD/instansi/pihak terkait dengan SK Bupati	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Keterlambatan pengumpulan dan validasi data pendukung dalam proses identifikasi Program/kegiatan Pengurangan pengangguran terbuka	RSP.25.13.16.59	9	Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengolahan dan analisis data	Proses identifikasi Program/kegiatan pengurangan pengangguran terbuka terhambat.	SE Bupati agar Perangkat Daerah untuk lebih mencermati Program/kegiatan yang mendukung Pengurangan Pengangguran terbuka	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Terganggunya proses identifikasi Program/kegiatan Pengurangan Pengangguran Terbuka	RSP.25.13.16.60	2	Lokasi kegiatan terdampak bencana alam atau non alam	Proses identifikasi Program/kegiatan tidak terlaksana	Menyusun SOP penanganan darurat jika bencana terjadi.	Bupati	Januari - Desember
		Fasilitasi Kegiatan pengurangan tingkat pengangguran terbuka yang sesuai kewenangan		Risiko Kebijakan	Kebijakan pengurangan pengangguran tidak bisa diterapkan di lapangan	RSP.25.13.16.61	8	Pengambilan Kebijakan yang tidak memperhatikan kondisi riil di lapangan	Pengurangan Pengangguran Terbuka tidak tercapai	Melaksanakan Rakor PD yang dipimpin oleh Bupati	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	PD tidak mematuhi pembagian peran pengurangan pengangguran terbuka yang telah ditetapkan	RSP.25.13.16.62	8	1) Pembagian peran PD dalam pengurangan pengangguran terbuka belum mencerminkan tupoksi masing-masing PD 2) PD bekerja sesuai dengan kebiasaan dan tidak mau keluar dari zona nyaman	Program/kegiatan tidak tepat sasaran	1) Melaksanakan pemutakhiran data pengangguran terbuka mulai dari tingkat Desa 2) Mengoptimalkan peran kecamatan dan Desa dalam mendata tingkat pengangguran terbuka	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Pemalsuan atau manipulasi data Pengangguran terbuka	RSP.25.13.16.63		Adanya tekanan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Data pengangguran terbuka tidak valid dan mengakibatkan kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran.	Mendorong Kepala PD untuk meningkatkan perannya dalam pengurangan pengangguran terbuka	Bupati	Januari - Desember

				Risiko Pemangku Kepentingan	Rendahnya komitmen PD dalam mendukung Pengurangan Pengangguran Terbuka	RSP.25.13.16.64	6	1) Ego Sektoral 2) PD merasa bukan Tupoksinya	Fasilitasi dilaksanakan secara asal-asalan hanya memenuhi tugas saja	Menetapkan peran dan tanggung jawab setiap PD/instansi/pihak terkait melalui kesepakatan bersama	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Fasilitasi Program/kegiatan pengurangan pengangguran terbuka tidak dilaksanakan	RSP.25.13.16.65	3	1) Ego Sektoral 2) PD merasa bukan Tupoksinya	Proses Fasilitasi Program/kegiatan penguranganpengangguran terbuka terhambat.	Membangun Opini bahwa Pengurangan Pengangguran Terbuka merupakan tanggung jawab bersama	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Tidak terlaksananya fasilitasi Pengurangan Pengangguran Terbuka	RSP.25.13.16.66	2	Curah hujan tinggi dan perubahan iklim ekstrem.	Pelaksana Fasilitasi Pengurangan Pengangguran Terbuka terhambat	Melakukan antisipasi dengan melakukan metode fasilitasi yang memperhatikan gangguan karena cuaca ekstrim atau perubahan iklim	Bupati	Januari - Desember
		Indeks Pembangunan Manusia	Identifikasi Kegiatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sesuai kewenangan	Risiko Kebijakan	Perubahan atau ketidaksesuaian kebijakan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	RSP.25.13.16.67	8	Adanya perubahan regulasi atau kebijakan daerah terkait pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.	1) Terhambatnya proses identifikasi kegiatan peningkatan IPM. 2) Program yang direncanakan menjadi tidak relevan atau harus direvisi. 3) Pencapaian target IPM menjadi tidak optimal.	Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan daerah secara berkala.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian pelaksanaan identifikasi kegiatan peningkatan IPM dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku	RSP.25.13.16.68	6	1) Kurangnya pemahaman PD terhadap aturan dan pedoman teknis peningkatan IPM. 2) Regulasi yang sulit diterapkan di lapangan.	1) Proses identifikasi dan perencanaan kegiatan menjadi terhambat. 2) Capaian target IPM menjadi tidak maksimal.	Menyusun SOP yang jelas dan mudah dipahami untuk proses identifikasi kegiatan peningkatan IPM.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Pemalsuan atau manipulasi data indikator IPM dalam proses identifikasi kegiatan peningkatan IPM.	RSP.25.13.16.69	4	Adanya tekanan untuk menunjukkan capaian IPM yang tinggi sehingga data dimanipulasi	Data IPM menjadi tidak valid dan mengakibatkan kebijakan tidak tepat sasaran.	Melakukan verifikasi silang data IPM dengan melibatkan PD/instansi terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Rendahnya komitmen PD/instansi/pihak terkait dalam mendukung proses identifikasi kegiatan peningkatan IPM.	RSP.25.13.16.70	8	1) Lemahnya koordinasi dan pembagian peran antara PD, instansi, fasilitator, dan pihak terkait lainnya. 2) Tidak adanya insentif atau manfaat langsung yang dirasakan oleh PD/instansi/pihak terkait. 3) Rendahnya kesadaran PD/instansi/pihak terkait mengenai pentingnya peningkatan IPM	1) Identifikasi kegiatan peningkatan IPM menjadi tidak maksimal dan terhambat. 2) Program yang dihasilkan kurang tepat sasaran karena minimnya masukan dari PD/instansi/pihak terkait. 3) Target capaian IPM menjadi sulit dicapai sesuai dengan rencana pembangunan daerah.	Menetapkan peran dan tanggung jawab setiap PD/instansi/pihak terkait melalui kesepakatan bersama	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Keterlambatan pengumpulan dan validasi data pendukung dalam proses identifikasi kegiatan peningkatan IPM	RSP.25.13.16.71	9	Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengolahan dan analisis data	Proses identifikasi kegiatan peningkatan IPM menjadi terhambat.	Mengusulkan adanya pelatihan teknis untuk petugas pengelola data dalam meningkatkan kompetensi.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Terganggunya proses identifikasi kegiatan peningkatan IPM	RSP.25.13.16.72	2	Lokasi kegiatan terdampak bencana alam atau non alam	Proses identifikasi kegiatan peningkatan IPM tertunda atau gagal dilaksanakan	Menyusun SOP penanganan darurat jika bencana terjadi.	Bupati	Januari - Desember
			Fasilitasi Kegiatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sesuai kewenangan	Risiko Kebijakan	Perubahan atau ketidaksesuaian kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang memengaruhi fasilitasi kegiatan peningkatan IPM.	RSP.25.13.16.73	8	Adanya revisi atau pembaruan regulasi terkait pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang berdampak pada capaian IPM	1) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan peningkatan IPM menjadi terhambat. 2) Program dan kegiatan yang telah direncanakan harus disesuaikan atau direvisi. 3) Target peningkatan IPM tidak tercapai sesuai perencanaan pembangunan daerah.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang berpengaruh pada peningkatan IPM	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian pelaksanaan fasilitasi kegiatan peningkatan IPM dengan ketentuan penetapan sasaran dan prioritas program daerah	RSP.25.13.16.74	6	PD belum menyesuaikan program dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Program fasilitasi peningkatan IPM tidak selaras dengan dokumen perencanaan daerah	Melakukan sinkronisasi program fasilitasi peningkatan IPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Bupati	Januari - Desember

				Risiko Fraud	Rekayasa hasil penilaian capaian indikator IPM untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, padahal berbeda dari kondisi sebenarnya.	RSP.25.13.16.75	4	Tekanan dari pimpinan atau pihak tertentu agar capaian IPM terlihat tinggi	Adanya temuan di kemudian hari oleh tim pengawas ataupun pemerintah pusat	1) Menyusun pedoman teknis yang jelas 2) Meningkatkan transparansi melalui publikasi hasil capaian IPM dan membuka akses terhadap data sumbernya.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Kurangnya komitmen dan partisipasi internal PD dalam mendukung fasilitasi kegiatan peningkatan IPM	RSP.25.13.16.76	8	Tugas dan kewajiban terkait fasilitasi IPM belum menjadi prioritas internal PD	1) Pelaksanaan program fasilitasi peningkatan IPM menjadi terhambat. 2) Data dan laporan pendukung dari internal PD menjadi tidak lengkap. 3) Target kinerja PD dalam mendukung capaian IPM tidak tercapai.	Menyelenggarakan sosialisasi internal untuk meningkatkan pemahaman peran tiap bidang terhadap capaian IPM.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Keterlambatan pengolahan dan pelaporan data IPM karena kurangnya koordinasi antar bidang di internal PD	RSP.25.13.16.77	6	SDM yang menangani data IPM terbatas dan memiliki beban kerja tinggi.	Terlambatnya penyampaian laporan fasilitasi kegiatan peningkatan IPM ke PD terkait.	Membentuk tim teknis	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Terganggunya fasilitasi kegiatan peningkatan IPM akibat terjadinya bencana alam di wilayah sasaran	RSP.25.13.16.78	2	Dampak perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi kejadian ekstrem (curah hujan tinggi, hujan angin)	Pelaksanaan fasilitasi kegiatan IPM tertunda atau terhenti.	Melakukan pemetaan kerawanan bencana di wilayah sasaran kegiatan.	Bupati	Januari - Desember
	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Identifikasi Kegiatan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai kewenangan	Risiko Kebijakan	Kebijakan pemerintah pusat/daerah/desa yang tidak sinkron dan adanya perubahan/ regulasi kebijakan	RSP.25.13.16.79	9	Perbedaan prioritas antara pemerintah Pusat, Daerah dan Desa, apabila ada perubahan kebijakan dari tingkat pusat belum secara penuh disosialisasikan sampai ke tingkat daerah dan desa	Program dan kebijakan dari pusat tidak selalu sesuai atau diterima oleh masyarakat di bawah	Melaksanakan sosialisasi kebijakan kepada pelaksana kegiatan dan menyesuaikan program dan kegiatan OPD terhadap perubahan regulasi	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Ketidaksihinggaan pelaksanaan kegiatan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, atau kewenangan Perangkat Daerah	RSP.25.13.16.80	8	Kurangnya pemahaman dan koordinasi antar Dinas terkait	Beresiko menjadi temuan dikarenakan pelaksanaan kegiatan dan aturan tidak sesuai	Melakukan review terhadap regulasi dan kewenangan terkait dengan Identifikasi Kegiatan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Penyimpangan, manipulasi, atau penyalahgunaan wewenang dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan IKLH yang tidak sesuai dengan kewenangan OPD	RSP.25.13.16.81	4	Kurangnya pengawasan dan pemahaman terhadap regulasi teknis dan prinsip akuntabilitas	Hasil yang didapatkan tidak sesuai kenyataan di lapangan	Melakukan integrasi data dengan pihak2 terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Perbedaan persepsi antara PD, masyarakat, dan pihak terkait dalam penentuan kegiatan peningkatan IKLH	RSP.25.13.16.82	6	1) Kurangnya komunikasi dan sosialisasi mengenai rencana kegiatan 2) Minimnya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan 3) Adanya kepentingan berbeda antar PD/pihak lainnya.	1) Terhambatnya pelaksanaan program peningkatan kualitas lingkungan 2) Tidak optimalnya pencapaian target IKLH	1) Sosialisasi dan komunikasi secara intensif kepada seluruh pihak yang terlibat 2) Melibatkan masyarakat, lembaga, dan pihak terkait sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. 3) Membentuk forum koordinasi antar PD untuk menyelaraskan tujuan dan kepentingan.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Data lingkungan hidup yang digunakan dalam proses identifikasi kegiatan tidak akurat atau tidak mutakhir.	RSP.25.13.16.83	6	1) Sistem pendataan dan pemantauan lingkungan belum terintegrasi dengan baik. 2) Keterbatasan sarana dan prasarana 3) Keterbatasan SDM untuk pembaruan data secara berkala	1) Hasil identifikasi kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 2) Penyusunan program kurang tepat sasaran.	Melakukan pembaruan data secara rutin melalui survei lapangan dan pemantauan	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Terganggunya proses identifikasi kegiatan peningkatan IKLH akibat terjadinya bencana alam.	RSP.25.13.16.84	2	1) Lokasi identifikasi berada di wilayah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan 2) Minimnya sistem peringatan dini dan mitigasi bencana 3) Perubahan iklim ekstrem yang memicu peningkatan frekuensi bencana	1) Tertundanya jadwal pelaksanaan identifikasi kegiatan. 2) Meningkatnya biaya operasional dan kebutuhan penanganan darurat. 3) Penurunan kualitas perencanaan program peningkatan kualitas lingkungan.	Melakukan pemetaan risiko bencana pada wilayah	Bupati	Januari - Desember

			Fasilitasi Kegiatan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai kewenangan	Risiko Kebijakan	Perubahan atau ketidaksesuaian kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang memengaruhi fasilitasi kegiatan peningkatan IKLH	RSP.25.13.16.85	6	1) Adanya perubahan regulasi atau kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup. 2) Kurangnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah) 3) Keterbatasan pemahaman PD terhadap kebijakan baru.	1) Terhambatnya proses fasilitasi kegiatan peningkatan kualitas lingkungan. 2) Program dan kegiatan yang telah direncanakan menjadi tidak relevan atau tertunda. 3) Tidak tercapainya target IKLH sesuai yang ditetapkan.	1) Melakukan monitoring dan review berkala terhadap regulasi serta kebijakan terbaru. 2) Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan instansi terkait.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.	RSP.25.13.16.86	6	Kurangnya pemahaman SDM pada PD terhadap regulasi terkait lingkungan hidup.	Tertundanya proses fasilitasi dan pelaksanaan program.	Menyusun SOP yang jelas dan terperinci untuk pelaksanaan fasilitasi kegiatan.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Manipulasi data dalam proses fasilitasi kegiatan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	RSP.25.13.16.87	3	Kurangnya transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Menurunnya kualitas hasil kegiatan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	Memperkuat pengawasan internal	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Adanya konflik dari pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda dalam fasilitasi kegiatan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	RSP.25.13.16.88	4	Adanya perbedaan prioritas	Terhambatnya proses fasilitasi dan pelaksanaan program.	Meningkatkan keterbukaan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Keterlambatan pengumpulan dan validasi data lingkungan dalam fasilitasi kegiatan peningkatan IKLH	RSP.25.13.16.89	3	Proses survei lapangan memerlukan waktu lama karena keterbatasan SDM	1) Penyusunan program dan kebijakan berbasis data menjadi tidak tepat waktu. 2) Terhambatnya pencapaian target IKLH	1) Mengoptimalkan koordinasi antar PD/pihak lainnya terkait untuk percepatan pengumpulan data. 2) Mengembangkan sistem basis data lingkungan yang terintegrasi dan real-time.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Terganggunya proses fasilitasi kegiatan peningkatan IKLH akibat terjadinya bencana alam.	RSP.25.13.16.90	2	1) Lokasi berada di wilayah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan 2) Perubahan iklim ekstrem yang memicu peningkatan frekuensi bencana	1) Meningkatnya biaya operasional dan kebutuhan penanganan darurat. 2) Penurunan kualitas perencanaan program peningkatan kualitas lingkungan.	Melakukan pemetaan risiko bencana pada wilayah	Bupati	Januari - Desember
	Terwujudnya kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	Identifikasi kegiatan yang mendukung infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing	Risiko Kebijakan	Regulasi atau pedoman identifikasi kegiatan tidak jelas	RSP.25.13.16.91	9	Peraturan pusat, provinsi, kabupaten tidak selaras	Target daya saing wilayah tidak tercapai	Rapat koordinasi bersama PD terkait untuk penyesuaian regulasi	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	ketidakpatuhan terhadap regulasi, pedoman teknis, dan prosedur dalam proses identifikasi kegiatan infrastruktur, yang dapat terjadi karena kurangnya pemahaman kebijakan	RSP.25.13.16.92	8	SDM kurang kompeten dalam penerapan standar	Kegiatan yang diidentifikasi tidak sesuai ketentuan, sehingga bisa ditolak atau tidak diakui dalam perencanaan pembangunan daerah.	Mengadakan koordinasi rutin antar-OPD untuk menyepakati mekanisme identifikasi kegiatan.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Terjadinya pemalsuan data atau manipulasi informasi dalam proses identifikasi kegiatan infrastruktur, misalnya kegiatan yang dilaporkan seolah memenuhi prioritas pembangunan tetapi sebenarnya tidak sesuai kondisi lapangan	RSP.25.13.16.93	4	Kurangnya mekanisme verifikasi data lapangan	Kegiatan yang diidentifikasi tidak sesuai fakta, sehingga perencanaan pembangunan menjadi tidak akurat.	Menetapkan standar verifikasi data lapangan dan checklist validasi sebelum dimasukkan dalam laporan.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Terjadinya konflik kepentingan, perbedaan prioritas, atau keterlambatan koordinasi antar-OPD teknis, pemerintah desa, dan pihak terkait lain yang berdampak pada proses identifikasi kegiatan infrastruktur.	RSP.25.13.16.94	6	Perbedaan prioritas antar-OPD teknis dalam menentukan jenis dan lokasi kegiatan infrastruktur.	1) Terlambatnya proses identifikasi kegiatan, sehingga perencanaan pembangunan tertunda. 2) Kegiatan yang diidentifikasi tidak sesuai kebutuhan lapangan, karena prioritas tidak selaras antar-pemangku kepentingan.	1) Menyelenggarakan forum koordinasi rutin antar-OPD, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait. 2) Menyusun pedoman prioritas kegiatan yang disepakati bersama untuk memastikan selaras dengan sasaran pembangunan.	Bupati	Januari - Desember

				Risiko Operasional	Terjadinya gangguan teknis, keterlambatan proses, atau keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat identifikasi kegiatan infrastruktur yang tepat sasaran dan mendukung daya saing wilayah.	RSP.25.13.16.95	6	Gangguan teknis seperti listrik padam, jaringan internet mati, atau peralatan kerja (laptop, proyektor) rusak saat rapat atau koordinasi identifikasi kegiatan	Proses identifikasi kegiatan tertunda, sehingga perencanaan pembangunan ikut tertunda.	Menyusun jadwal koordinasi yang fleksibel dan memperhitungkan kemungkinan gangguan teknis.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Kerusakan sarpras kantor seperti listrik padam, jaringan internet mati, atau rusaknya peralatan kerja (laptop, proyektor, server).	RSP.25.13.16.96	1	Terjadinya gangguan akibat bencana alam atau kerusakan sarana dan prasarana kantor	Menyebabkan proses identifikasi kegiatan infrastruktur tertunda atau terganggu.	Menyusun jadwal identifikasi fleksibel yang mempertimbangkan musim atau potensi bencana.	Bupati	Januari - Desember
		Fasilitasi kegiatan yang mendukung infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing		Risiko Kebijakan	Adanya ketidaksinkronan kebijakan atau peraturan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait pembangunan infrastruktur kewilayahan	RSP.25.13.16.97	4	Perubahan regulasi dari pemerintah pusat atau provinsi yang tidak selaras dengan kondisi di daerah	Proses fasilitasi menjadi tidak efektif, karena kebijakan dan regulasi tidak sejalan	Menyesuaikan perencanaan dan strategi fasilitasi jika ada perubahan kebijakan pusat/provinsi.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan fasilitasi kegiatan dengan regulasi, kebijakan, atau prosedur formal yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan administrasi, pengawasan, dan akuntabilitas di tingkat Pemda	RSP.25.13.16.98	3	Kurangnya pemahaman SDM terhadap aturan dan regulasi teknis pembangunan infrastruktur.	Kegiatan fasilitasi dinilai tidak sesuai aturan, sehingga menimbulkan potensi temuan saat audit atau pemeriksaan.	Menyelaraskan prosedur fasilitasi dengan regulasi terbaru jika ditemukan ketidaksesuaian.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, dalam proses fasilitasi kegiatan infrastruktur kewilayahan	RSP.25.13.16.99	2	Transparansi data yang rendah, sehingga rawan dimanipulasi oleh pihak tertentu.	laporan tidak sesuai kondisi nyata	Melakukan perbaikan data dan laporan yang terindikasi manipulasi.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Kurangnya koordinasi, keselarasan prioritas, dan komitmen antar PD terkait	RSP.25.13.16.100	3	1) PD lain memiliki agenda dan kegiatan lain sehingga koordinasi tertunda. 2) Perbedaan prioritas program antar PD 3) Kurangnya komunikasi	Menghambat efektivitas fasilitasi kegiatan infrastruktur kewilayahan.	1) Membuat undangan BNBA dan memastikan PD hadir 2) Meningkatkan komunikasi informal dengan PD	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Terganggunya proses fasilitasi karena kurangnya kesiapan data dan informasi pendukung	RSP.25.13.16.101	3	Kegiatan survei lokasi terhambat karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.	Prioritas pembangunan infrastruktur menjadi tidak tepat sasaran karena rekomendasi kegiatan tidak berbasis data	Melakukan cross-check data dari desa dengan dokumen yang dimiliki PD teknis sebelum kegiatan dimulai.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Kegiatan fasilitasi pembangunan infrastruktur kewilayahan terhambat karena lokasi pembangunan yang menjadi sasaran kegiatan terdampak bencana alam	RSP.25.13.16.102	2	Bencana alam di lokasi pembangunan, longsor di daerah perbukitan sehingga akses jalan terputus.	Rencana prioritas pembangunan infrastruktur harus direvisi ulang untuk menyesuaikan kondisi lapangan.	Memasukkan unsur kajian risiko bencana ke dalam perencanaan kegiatan infrastruktur sejak awal.	Bupati	Januari - Desember
		Indeks Integritas Nasional - Inspektorat										
		Indeks Reformasi Birokrasi	Penguatan Kelembagaan	Risiko Kebijakan	Ketidaksinkronan kebijakan reformasi birokrasi antara pemerintah pusat dan Pemda sehingga menghambat penguatan kelembagaan	RSP.25.13.16.103	6	Perubahan regulasi pusat yang belum segera diadaptasi di daerah.	Proses penguatan kelembagaan menjadi tidak efektif, karena kebijakan dan regulasi tidak sejalan	Menyesuaikan perencanaan dan strategi fasilitasi jika ada perubahan kebijakan pusat/provinsi.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian penguatan kelembagaan antara SDM dengan regulasi	RSP.25.13.16.104	4	Kurangnya pemahaman SDM pada PD terhadap regulasi terkait indeks reformasi birokrasi	Proses penguatan kelembagaan menjadi tidak efektif, karena pemahaman SDM dan regulasi tidak sejalan	melakukan sosialisasi mengenai peningkatan pemahaman SDM terkait indeks reformasi birokrasi	Bupati	Januari - Desember

				Risiko Fraud	Manipulasi, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan yang tidak sesuai dengan kewenangan OPD	RSP.25.13.16.105	3	Kurangnya transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan	Menurunnya kualitas hasil kegiatan penguatan kelembagaan indeks reformasi birokrasi	Memperkuat pengawasan internal	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Adanya konflik dari pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda dalam kegiatan penguatan kelembagaan	RSP.25.13.16.106	4	1) Kurangnya komunikasi dan sosialisasi mengenai rencana kegiatan 2) Minimnya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan. 3) Adanya kepentingan berbeda antar PD/pihak lainnya.bekerja sesuai dengan kebiasaan dan tidak mau keluar dari zona nyaman	1) Terhambatnya pelaksanaan program penguatan kelembagaan 2) Tidak optimalnya pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi	1) Sosialisasi dan komunikasi secara intensif kepada seluruh pihak yang terlibat 2) Melibatkan masyarakat, lembaga, dan pihak terkait sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. 3) Membentuk forum koordinasi antar PD untuk menyalurkan tujuan dan kepentingan.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Kurangnya kesiapan data dan informasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan	RSP.25.13.16.107	3	Kegiatan penguatan kelembagaan terhambat karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.	Prioritas penguatan kelembagaan menjadi tidak tepat sasaran karena rekomendasi kegiatan tidak berbasis data	Melakukan cross-check data antar pihak yang berkepentingan sebelum kegiatan dimulai.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Terganggunya proses identifikasi kegiatan penguatan kelembagaan akibat terjadinya bencana alam.	RSP.25.13.16.108	2	Lokasi kegiatan terdampak bencana alam atau non alam	Proses penguatan kelembagaan Indeks prestasi reformasi birokrasi tertunda atau gagal dilaksanakan	Menyusun SOP penanganan darurat jika bencana terjadi.	Bupati	Januari - Desember
			Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Risiko Kebijakan	Adanya ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait penataan peraturan perundang-undangan	RSP.25.13.16.109	6	Adanya perubahan regulasi atau kebijakan daerah terkait penataan peraturan perundang-undangan	1) Terhambatnya proses kegiatan penataan peraturan perundang-undangan. 2) Program yang direncanakan menjadi tidak relevan atau harus direvisi. 3) Pencapaian target IRB menjadi tidak optimal.	Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan daerah secara berkala.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian pelaksanaan fasilitasi kegiatan penataan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan penetapan sasaran dan prioritas program daerah	RSP.25.13.16.110	4	Kurangnya pemahaman SDM terhadap aturan penataan peraturan perundang-undangan.	Menyebabkan temuan audit dan menghambat pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi.	Melakukan sosialisasi mengenai peningkatan pemahaman SDM terkait penataan peraturan perundang-undangan.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Terjadi keterlambatan atau hambatan koordinasi dengan bidang/pemerintah desa	RSP.25.13.16.111	3	Tidak ada pembaruan data secara berkala	Kegiatan yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi nyata	Mengintegrasikan data dengan PD terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Terjadinya konflik kepentingan, perbedaan prioritas, atau keterlambatan koordinasi antar-PD teknis, pemerintah desa, dan pihak terkait lain yang berdampak pada proses penataan peraturan perundang-undangan.	RSP.25.13.16.112	2	1) Kurangnya komunikasi dan sosialisasi mengenai rencana kegiatan 2) Minimnya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan. 3) Adanya kepentingan berbeda antar PD/pihak lainnya.	1) Terhambatnya pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan 2) Tidak optimalnya pencapaian target IRB	1) Sosialisasi dan komunikasi secara intensif kepada seluruh pihak yang terlibat 2) Melibatkan masyarakat, lembaga, dan pihak terkait sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. 3) Membentuk forum koordinasi antar PD untuk menyalurkan tujuan dan kepentingan.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Data indeks reformasi birokrasi yang digunakan dalam proses penataan peraturan perundang-undangan tidak akurat atau tidak mutakhir.	RSP.25.13.16.113	2	1) Sistem penataan peraturan perundang-undangan belum terintegrasi dengan baik. 2) Keterbatasan sarana dan prasarana 3) Keterbatasan SDM untuk pembaruan data secara berkala	1) Hasil penataan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 2) Penyusunan peraturan perundang-undangan kurang tepat sasaran.	Melakukan pembaruan data secara rutin melalui pemantauan	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Hilangnya atau rusaknya data indeks reformasi birokrasi karena kerusakan sarana dan prasarana	RSP.25.13.16.114	2	Terjadinya bencana alam atau keadaan darurat seperti gempa bumi, atau kebakaran	Terganggunya proses koordinasi, pengumpulan data, dan penyusunan daftar kegiatan pendukung peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi.	Menyimpan data berbasis online	Bupati	Januari - Desember

			Penguatan Kelembagaan	Risiko Kebijakan	Kebijakan pemerintah pusat/daerah/desa yang tidak sinkron dan adanya perubahan/ regulasi kebijakan	RSP.25.13.16.115	4	Peraturan pusat, provinsi, kabupaten tidak selaras	Target Indeks Reformasi Birokrasi tidak tercapai	Rapat koordinasi bersama PD terkait untuk penyesuaian regulasi	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian pelaksanaan penguatan kelembagaan dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku	RSP.25.13.16.116	3	Kurangnya pemahaman dan koordinasi antar Dinas terkait	Beresiko menjadi temuan dikarenakan pelaksanaan kegiatan dan aturan tidak sesuai	Melakukan review terhadap regulasi dan kewenangan terkait dengan penguatan kelembagaan Indeks Reformasi Birokrasi, melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, dalam proses penguatan kelembagaan	RSP.25.13.16.117	2	Transparansi data yang rendah, sehingga rawan dimanipulasi oleh pihak tertentu.	laporan tidak sesuai kondisi nyata	Melakukan perbaikan data dan laporan yang terindikasi manipulasi.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Adanya konflik dari pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda dalam kegiatan penguatan kelembagaan.	RSP.25.13.16.118	6	1) Kurangnya komunikasi dan sosialisasi mengenai rencana kegiatan 2) Adanya kepentingan berbeda antar PD/pihak lainnya, diantaranya bekerja sesuai dengan kebiasaan dan tidak mau keluar dari zona nyaman	1) Terhambatnya pelaksanaan program penguatan kelembagaan 2) Tidak optimalnya pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi	1) Sosialisasi dan komunikasi secara intensif kepada seluruh pihak yang terlibat 2) Melibatkan masyarakat, lembaga, dan pihak terkait sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. 3) Membentuk forum koordinasi antar PD untuk menyalurkan tujuan dan kepentingan.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Terganggunya proses fasilitasi karena kurangnya kesiapan data dan informasi pendukung	RSP.25.13.16.119	2	Kegiatan penguatan kelembagaan terhambat karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.	Prioritas penguatan kelembagaan menjadi tidak tepat sasaran karena rekomendasi kegiatan tidak berbasis data	Melakukan cross-check data antar pihak yang berkepentingan sebelum kegiatan dimulai.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Terganggunya kegiatan penguatan kelembagaan akibat terjadinya bencana alam di wilayah sasaran	RSP.25.13.16.120	1	Dampak perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi kejadian ekstrem	Pelaksanaan penguatan kelembagaan tertunda atau terhenti.	Melakukan pemetaan kerawanan bencana di wilayah sasaran kegiatan.	Bupati	Januari - Desember
			Penguatan Sistem Manajemen SDM	Risiko Kebijakan	Regulasi atau pedoman penguatan sistem manajemen SDM tidak jelas	RSP.25.13.16.121	4	Peraturan pusat, provinsi, kabupaten tidak selaras	Target Indeks Reformasi Birokrasi tidak tercapai	Rapat koordinasi bersama PD terkait untuk penyesuaian regulasi	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan penguatan sistem manajemen SDM dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, atau kewenangan Perangkat Daerah	RSP.25.13.16.122	4	Kurangnya pemahaman dan koordinasi antar Dinas terkait	Beresiko menjadi temuan dikarenakan pelaksanaan kegiatan dan aturan tidak sesuai	Melakukan review terhadap regulasi dan kewenangan terkait dengan penguatan sistem manajemen SDM, melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, dalam proses fasilitasi kegiatan penguatan sistem manajemen SDM	RSP.25.13.16.123	4	Transparansi data yang rendah, sehingga rawan dimanipulasi oleh pihak tertentu.	laporan tidak sesuai kondisi nyata	Melakukan perbaikan data dan laporan yang terindikasi manipulasi.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Adanya konflik dari pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda dalam penguatan sistem manajemen SDM	RSP.25.13.16.124	2	Adanya perbedaan prioritas	Terhambatnya proses penguatan sistem manajemen SDM	Meningkatkan keterbukaan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Keterlambatan pengumpulan dan validasi data dalam penguatan sistem manajemen SDM	RSP.25.13.16.125	2	Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengolahan dan analisis data	Proses identifikasi kegiatan peningkatan IRB menjadi terhambat.	Mengusulkan adanya pelatihan teknis untuk petugas pengelola data dalam meningkatkan kompetensi.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Terganggunya fasilitasi kegiatan penguatan sistem manajemen SDM akibat terjadinya bencana alam di wilayah sasaran	RSP.25.13.16.126	1	Dampak perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi kejadian ekstrem	Pelaksanaan fasilitasi kegiatan IRB tertunda atau terhenti.	Melakukan pemetaan kerawanan bencana di wilayah sasaran kegiatan.	Bupati	Januari - Desember
			Penguatan Tata Laksana	Risiko Kebijakan	Perubahan atau ketidaksesuaian kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang memengaruhi kegiatan penguatan tata laksana	RSP.25.13.16.127	6	Adanya revisi atau pembaruan regulasi terkait pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang berdampak pada capaian IRB	1) Terhambatnya proses identifikasi kegiatan peningkatan IRB. 2) Program yang direncanakan menjadi tidak relevan atau harus direvisi. 3) Pencapaian target IRB menjadi tidak optimal.	Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan daerah secara berkala.	Bupati	Januari - Desember

				Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian pelaksanaan identifikasi kegiatan penguatan tata laksana dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku	RSP.25.13.16.128	3	Kurangnya pemahaman PD terkait terhadap peraturan dan kebijakan pusat/provinsi yang mengatur peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi.	Penurunan capaian target Indeks Reformasi Birokrasi karena program tidak sinkron dengan kebijakan yang berlaku.	Mengoptimalkan forum koordinasi antar-PD untuk melakukan penyesuaian program dan dokumen perencanaan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan kebijakan terbaru.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Penyalahgunaan wewenang dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penguatan tata laksana yang tidak sesuai dengan kewenangan OPD	RSP.25.13.16.129	3	Kurangnya pengawasan dan pemahaman terhadap regulasi teknis dan prinsip akuntabilitas	Hasil yang didapatkan tidak sesuai kenyataan di lapangan	Melakukan integrasi data dengan pihak2 terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Terjadi keterlambatan atau hambatan koordinasi dengan bidang/pemerintah desa	RSP.25.13.16.130	2	Tidak ada pembaruan data secara berkala	Kegiatan yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi nyata	Mengintegrasikan data dengan PD terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Kurangnya tenaga pendamping dan SDM kompeten dalam penguatan tata laksana	RSP.25.13.16.131	2	Kapasitas SDM rendah dalam memahami teknis pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi	Kegiatan tidak berjalan efektif	Peningkatan Kapasitas SDM	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Gangguan pelaksanaan koordinasi antar-bidang akibat terjadinya bencana sosial, seperti demonstrasi, konflik sosial, atau aksi massa, yang menyebabkan rapat tidak dapat berjalan sesuai jadwal dan target indeks reformasi birokrasi terhambat.	RSP.25.13.16.132	1	1) Terjadinya aksi unjuk rasa atau demonstrasi di sekitar area kantor 2) Konflik sosial antar kelompok masyarakat yang berdampak pada keamanan lingkungan kantor.	Tertundanya rapat koordinasi karena situasi keamanan tidak kondusif	Menunda rapat untuk sementara dan membuat jadwal ulang setelah kondisi lebih kondusif.	Bupati	Januari - Desember
			Penguatan Sistem Pengawasan	Risiko Kebijakan	Kebijakan penentuan indeks reformasi birokrasi tidak sinkron dengan Tupoksi	RSP.25.13.16.133	6	Pengambilan Kebijakan yang tidak memperhatikan Tupoksi OPD	Permasalahan penguatan sistem pengawasan tidak terselesaikan	FGD penguatan sistem pengawasan secara berkala	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan identifikasi kegiatan dengan ketentuan SOP atau pedoman teknis terkait penguatan sistem pengawasan	RSP.25.13.16.134	6	Kurangnya pemahaman SDM terhadap SOP/pedoman teknis dalam pelaksanaan pelaksanaan sistem pengawasan	Menyebabkan temuan audit dan menghambat pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi.	Memastikan pemahaman SDM dengan melakukan sosialisasi SOP/pedoman teknis sebelum pelaksanaan kegiatan	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Terjadinya praktik kecurangan dalam proses penguatan sistem pengawasan seperti manipulasi data/rekayasa laporan	RSP.25.13.16.135	3	1) Kurangnya pemahaman pegawai PD mengenai indikator dan mekanisme pengukuran IRB, sehingga memunculkan celah manipulasi data untuk menyesuaikan target. 2) Tekanan untuk mencapai target IRB dari pimpinan, sehingga mendorong praktik rekayasa laporan.	1) Penurunan kredibilitas data IRB karena data yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. 2) Program dan kebijakan sistem pengawasan menjadi tidak tepat sasaran, karena disusun berdasarkan data yang dimanipulasi.	Melakukan revisi data dan perencanaan program jika ditemukan adanya manipulasi atau ketidaksesuaian.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Adanya konflik dari pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda dalam fasilitasi kegiatan penguatan sistem pengawasan	RSP.25.13.16.136	3	1) Adanya kepentingan berbeda antar PD/pihak lainnya 2) Bekerja sesuai dengan kebiasaan dan tidak mau keluar dari zona nyaman	1) Terhambatnya pelaksanaan program penguatan sistem pengawasan 2) Tidak optimalnya pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi	1) Membentuk forum koordinasi antar PD untuk menyalurkan tujuan dan kepentingan. 2) Melibatkan masyarakat, lembaga, dan pihak terkait sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. 3) Sosialisasi secara intensif kepada seluruh pihak yang terlibat	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Terjadinya gangguan teknis, keterlambatan proses, atau keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat identifikasi kegiatan penguatan sistem pengawasan	RSP.25.13.16.137	4	Adanya gangguan teknis seperti padamnya listrik, matinya jaringan internet, atau peralatan kerja yang rusak saat rapat	Proses penguatan sistem pengawasan menjadi tertunda.	Memperhitungkan kemungkinan gangguan teknis dalam penyusunan jadwal koordinasi yang fleksibel	Bupati	Januari - Desember

				Risiko Bencana	Hilangnya atau rusaknya data identifikasi kegiatan penguatan sistem pengawasan karena kerusakan sarana dan prasarana	RSP.25.13.16.138	2	Terjadinya bencana alam atau keadaan darurat seperti gempa bumi, atau kebakaran	Terganggunya proses koordinasi, pengumpulan data, dan penyusunan daftar kegiatan pendukung peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi.	Menyimpan data berbasis online atau mencadangkan data di perangkat lain	Bupati	Januari - Desember
			Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Risiko Kebijakan	Kebijakan penentuan PD pengampu penguatan akuntabilitas kinerja tidak sinkron dengan Tupoksi	RSP.25.13.16.139	6	Pengambilan Kebijakan yang tidak memperhatikan Tupoksi OPD	Identifikasi program/kegiatan tidak tepat sasaran, sehingga target Indeks Reformasi Birokrasi sulit tercapai.	Evaluasi Tupoksi dan program prioritas baik nasional maupun daerah secara berkala	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian penguatan akuntabilitas dengan regulasi	RSP.25.13.16.140	4	Kurangnya pemahaman SDM terhadap SOP/pedoman teknis dalam pelaksanaan penguatan akuntabilitas kinerja	Tertundanya proses penguatan akuntabilitas kinerja	Menyusun SOP yang jelas dan terperinci untuk pelaksanaan penguatan akuntabilitas kinerja	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Pemalsuan atau manipulasi data indeks reformasi birokrasi dalam proses penguatan akuntabilitas kinerja.	RSP.25.13.16.141	3	Adanya tekanan untuk menunjukkan capaian IRB yang tinggi sehingga data dimanipulasi	Kebijakan yang tidak tepat sasaran karena data IRB yang tidak valid	Melakukan verifikasi silang data IRB dengan melibatkan PD/instansi terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Kurangnya koordinasi, keselarasan prioritas, dan komitmen antar PD terkait penguatan akuntabilitas kinerja	RSP.25.13.16.142	16	1) Adanya agenda ataupun kegiatan lain sehingga koordinasi tertunda. 2) Perbedaan prioritas program antar PD 3) Kurangnya komunikasi yang baik	Efektivitas penguatan akuntabilitas kinerja menjadi terhambat	Melakukan komunikasi informal dengan Perangkat Daerah	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Data indeks reformasi birokrasi yang digunakan dalam proses penguatan akuntabilitas kinerja tidak akurat atau tidak mutakhir.	RSP.25.13.16.143	3	Sistem penguatan akuntabilitas kinerja belum terintegrasi dengan baik.	Penyusunan peraturan perundang-undangan kurang tepat sasaran.	Melakukan pembaruan data secara rutin melalui pemantauan	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Kerusakan sarpras kantor seperti padamnya listrik, matinya jaringan internet, dan rusaknya peralatan kerja	RSP.25.13.16.144	2	Terjadinya gangguan akibat bencana alam atau kerusakan sarana dan prasarana kantor	Menyebabkan penguatan akuntabilitas kinerja tertunda atau terganggu.	Menyimpan data berbasis online atau mencadangkan data di perangkat lain	Bupati	Januari - Desember
	Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan	Indeks Gini	Identifikasi kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Gini	Risiko Kebijakan	Adanya ketidaksesuaian kebijakan penurunan ketimpangan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat/desa	RSP.25.13.16.145	6	Kurangnya kajian mendalam terhadap faktor penyebab ketimpangan yang terjadi di tingkat desa.	Kegiatan yang diidentifikasi tidak tepat sasaran dan berpotensi menghambat pencapaian target Indeks Gini	Evaluasi bersama masyarakat/desa untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan masyarakat	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan identifikasi kegiatan dengan ketentuan SOP atau pedoman teknis terkait penurunan ketimpangan	RSP.25.13.16.146	6	Kurangnya pemahaman SDM terhadap SOP/pedoman teknis dalam pelaksanaan identifikasi kegiatan	Sehingga menyebabkan temuan audit dan menghambat pencapaian target Indeks Gini.	Memastikan pemahaman SDM dengan melakukan sosialisasi SOP/pedoman teknis sebelum pelaksanaan identifikasi	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Adanya kecurangan dalam proses identifikasi kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Gini, seperti pemalsuan data	RSP.25.13.16.147	3	Tidak ada pembaruan data secara berkala	Kegiatan yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi nyata	Mengintegrasikan data dengan PD terkait	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Terjadi keterlambatan atau hambatan koordinasi dengan bidang/pemerintah desa	RSP.25.13.16.148	4	Perbedaan prioritas kegiatan	Proses identifikasi program/kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Gini tidak berjalan optimal.	Rapat koordinasi bersama dengan surat undangan resmi	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Gangguan operasional berupa keterbatasan SDM, peralatan, dan sistem pendukung	RSP.25.13.16.149	4	1) Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM untuk melakukan analisis dan pengolahan data. 2) Gangguan teknis pada jaringan internet/listrik 3) Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti komputer, laptop, atau perangkat lainnya	1) Terlambatnya proses identifikasi kegiatan, sehingga memengaruhi penyusunan perencanaan program penurunan ketimpangan ekonomi. 2) Kesalahan dalam analisis data, yang berpotensi membuat rekomendasi kegiatan menjadi tidak tepat sasaran.	1) Membentuk tim teknis dengan melibatkan SDM yang lain 2) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai	Bupati	Januari - Desember

				Risiko Bencana	Hilangnya atau rusaknya data identifikasi kegiatan karena kerusakan sarana dan prasarana	RSP.25.13.16.150	2	Terjadinya bencana alam atau keadaan darurat seperti gempa bumi, atau kebakaran	Terganggunya proses koordinasi, pengumpulan data, dan penyusunan daftar kegiatan pendukung peningkatan Indeks Gini.	Menyimpan data berbasis online	Bupati	Januari - Desember
			Fasilitasi kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Gini	Risiko Kebijakan	Kurangnya kejelasan kebijakan mengenai peran Dinpermades sebagai fasilitator dalam mendukung peningkatan Indeks Gini, padahal tupoksi utama berada di PD lain	RSP.25.13.16.151	8	Tupoksi utama berada di PD lain, tetapi Dinpermades tetap diminta berperan aktif tanpa dukungan regulasi yang memadai.	Sehingga dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan, kurangnya sinergi, dan ketidakefektifan program.	Menyusun mekanisme kerja sama antar PD yang lebih jelas	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Pelaksanaan fasilitasi kegiatan tidak sesuai dengan regulasi dan pedoman teknis	RSP.25.13.16.152	6	Kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku	Capaian perbaikan Indeks Gini tidak optimal akibat ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan regulasi.	Melakukan penyesuaian kegiatan dan laporan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan regulasi.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Laporan kegiatan direkayasa untuk memenuhi target Indeks Gini	RSP.25.13.16.153	3	Tekanan dari pimpinan untuk mengejar capaian kinerja	Data capaian tidak sesuai kondisi nyata	Peningkatan integritas	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap fasilitasi kegiatan peningkatan Indeks Gini.	RSP.25.13.16.154	4	1) Masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan kegiatan 2) Minimnya sosialisasi tentang manfaat program	1) Program penurunan kesenjangan tidak berjalan efektif 2) Tingkat partisipasi rendah 3) Capaian Indeks Gini tidak optimal	Peningkatan partisipasi masyarakat	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Kurangnya tenaga pendamping dan SDM kompeten	RSP.25.13.16.155	3	Kapasitas SDM rendah dalam memahami teknis pengukuran Indeks Gini	Kegiatan tidak berjalan efektif	Peningkatan Kapasitas SDM	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Perubahan iklim ekstrem pada saat fasilitasi kegiatan	RSP.25.13.16.156	1	1) Pola cuaca tidak menentu 2) Kekeringan panjang atau hujan ekstrem	Pendapatan masyarakat menurun, target penurunan Indeks Gini sulit tercapai	Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penanggulangan dampak cuaca ekstrem kepada masyarakat bersama BPBD	Bupati	Januari - Desember
		Indeks Pembangunan Gender	Koordinasi dengan Bidang untuk mengidentifikasi Program/Kegiatan yang mendukung Indeks Pembangunan Gender	Risiko Kebijakan	Perubahan kebijakan atau ketidaksesuaian regulasi antara pusat, provinsi, dan daerah yang memengaruhi penentuan program/kegiatan pendukung IPG, sehingga menghambat pencapaian target pembangunan gender.	RSP.25.13.16.157	6	Minimnya integrasi data gender sebagai dasar penyusunan kebijakan.	Identifikasi program/kegiatan tidak tepat sasaran, sehingga target IPG sulit tercapai.	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Tidak patuh terhadap regulasi, kebijakan, dan pedoman teknis terkait pembangunan gender, sehingga program/kegiatan yang diidentifikasi tidak sesuai target dan menurunkan capaian IPG Pemda	RSP.25.13.16.158	4	1) Kurangnya pemahaman PD terkait kebijakan, regulasi, dan indikator pembangunan gender. 2) Tidak adanya sosialisasi rutin tentang kebijakan pembangunan gender dari pemerintah pusat maupun provinsi/daerah	Penurunan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Pemda karena ketidaktepatan sasaran program.	Meningkatkan pemahaman PD terkait kebijakan IPD dengan mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Terjadinya praktik kecurangan dalam proses koordinasi, seperti manipulasi data/rekayasa laporan	RSP.25.13.16.159	3	1) Kurangnya pemahaman pegawai PD mengenai indikator dan mekanisme pengukuran IPG, sehingga memunculkan celah manipulasi data untuk menyesuaikan target. 2) Tekanan untuk mencapai target IPG dari pimpinan, sehingga mendorong praktik rekayasa laporan.	1) Penurunan kredibilitas data IPG Pemda karena data yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. 2) Program dan kebijakan pembangunan gender menjadi tidak tepat sasaran, karena disusun berdasarkan data yang dimanipulasi.	Melakukan revisi data dan perencanaan program jika ditemukan adanya manipulasi atau ketidaksesuaian.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Tertundanya proses koordinasi dengan bidang terkait karena bidang sedang melaksanakan kegiatan lain, sehingga menghambat proses identifikasi program/kegiatan pendukung IPG	RSP.25.13.16.160	2	1) Bidang memiliki jadwal kegiatan yang padat, sehingga koordinasi lintas bidang tidak bisa dilakukan tepat waktu. 2) Keterbatasan SDM di bidang terkait, sehingga sulit membagi tugas antara kegiatan rutin dan proses koordinasi IPG.	Proses identifikasi program/kegiatan pendukung IPG tertunda, menghambat penyusunan dokumen perencanaan daerah	Mengoptimalkan koordinasi digital (misalnya grup WA, atau zoom) jika koordinasi tatap muka tidak memungkinkan.	Bupati	Januari - Desember

				Risiko Operasional	Terhambatnya proses koordinasi antar bidang akibat gangguan jaringan listrik atau jaringan internet	RSP.25.13.16.161	2	1) Pemadaman listrik mendadak pada saat proses koordinasi atau peningputan data sedang berlangsung 2) Tidak adanya perangkat cadangan (genset) untuk menjaga ketersediaan daya listrik 3) Keterlambatan pemulihan jaringan listrik akibat kendala teknis dari PLN	1) Rapat koordinasi terhenti tiba-tiba karena PC dan proyektor tidak dapat berfungsi tanpa pasokan listrik. 2) Proses identifikasi program/kegiatan pendukung IPG menjadi tertunda karena pembahasan tidak bisa dilanjutkan.	1) Melanjutkan rapat menggunakan perangkat berbasis baterai (laptop atau tablet) jika memungkinkan. 2) Menyusun jadwal rapat susulan segera setelah pasokan listrik kembali normal.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Gangguan pelaksanaan koordinasi antar-bidang akibat terjadinya bencana sosial, seperti demonstrasi, konflik sosial, atau aksi massa, yang menyebabkan rapat tidak dapat berjalan sesuai jadwal dan target capaian IPG terhambat.	RSP.25.13.16.162	1	1) Terjadinya aksi unjuk rasa atau demonstrasi di sekitar area kantor 2) Konflik sosial antar kelompok masyarakat yang berdampak pada keamanan lingkungan kantor.	Tertundanya rapat koordinasi karena situasi keamanan tidak kondusif	Menunda sementara rapat dan membuat jadwal ulang setelah kondisi aman.	Bupati	Januari - Desember
			Menyusun GAP dan GBS	Risiko Kebijakan	Penyusunan GAP dan GBS tidak optimal akibat kebijakan, arahan, dan prioritas program Pemda yang belum sepenuhnya mendukung integrasi gender, sehingga menghambat pencapaian target IPG.	RSP.25.13.16.163	6	Belum maksimalnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	IPG sulit tercapai	Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan pedoman teknis penyusunan GAP & GBS.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Laporan GAP dan GBS tidak sesuai dengan ketentuan	RSP.25.13.16.164	6	Kurangnya pemahaman PD terhadap regulasi dan pedoman teknis penyusunan GAP & GBS.	Kurangnya sosialisasi kebijakan dan regulasi	Membuat panduan internal penyusunan dokumen GAP & GBS yang lebih sederhana dan mudah dipahami.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Pemalsuan data dalam penyusunan GAP dan GBS yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian laporan dengan kondisi nyata	RSP.25.13.16.165	3	Tidak adanya standar sumber data resmi sehingga penyusunan GAP & GBS menggunakan data tidak akurat	Laporan GAP & GBS menjadi tidak valid	Menetapkan SOP penyusunan GAP & GBS yang mewajibkan penggunaan data resmi dan terverifikasi	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Keterlambatan penyusunan GAP & GBS karena pegawai yang menangani memiliki tugas dan agenda lain yang lebih prioritas	RSP.25.13.16.166	6	Keterbatasan SDM	Target penyelesaian menjadi tertunda	melibatkan SDM tambahan untuk membantu percepatan penyusunan laporan GAP & GBS	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Gangguan teknis pada perangkat elektronik saat proses penyusunan GAP & GBS	RSP.25.13.16.167	4	Keterbatasan perangkat penunjang	Target penyelesaian menjadi tertunda	Mengoptimalkan penyimpanan data berbasis online agar laporan tetap aman dan mudah diakses di berbagai perangkat	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Terhambatnya penyusunan GAP & GBS akibat terjadinya bencana non-alam yang memengaruhi dalam proses penyusunan	RSP.25.13.16.168	2	Bencana non-alam seperti kebakaran kantor, kerusakan fasilitas kerja, atau gangguan sistem teknologi.	Target penyelesaian menjadi tertunda	Menyiapkan backup data berbasis online agar laporan aman jika terjadi kerusakan fasilitas.	Bupati	Januari - Desember
	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Indeks Harmoni	Identifikasi Kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Harmoni	Risiko Kebijakan	Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau provinsi yang tidak selaras dengan kondisi daerah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian perencanaan di tingkat Pemda	RSP.25.13.16.169	6	1) Perbedaan prioritas program antara pemerintah pusat/provinsi dengan kondisi dan kebutuhan daerah 2) Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat/provinsi dengan Pemda sebelum kebijakan diterapkan.	1) Program peningkatan Indeks Harmoni di daerah tidak dapat berjalan sesuai rencana. 2) Penurunan capaian target sasaran daerah, khususnya terkait peningkatan rasa aman masyarakat.	Melakukan revisi perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebijakan terbaru.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian pelaksanaan identifikasi kegiatan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, sehingga berpotensi menurunkan capaian Indeks Harmoni	RSP.25.13.16.170	4	Kurangnya pemahaman PD terkait terhadap peraturan dan kebijakan pusat/provinsi yang mengatur peningkatan Indeks Harmoni.	Penurunan capaian target Indeks Harmoni karena program tidak sinkron dengan kebijakan yang berlaku.	Mengoptimalkan forum koordinasi antar-PD untuk melakukan penyesuaian program dan dokumen perencanaan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan kebijakan terbaru.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Terjadinya kecurangan dalam proses identifikasi kegiatan yang bertujuan meningkatkan Indeks Harmoni, seperti manipulasi data yang dapat memengaruhi capaian target kinerja.	RSP.25.13.16.171	3	Kurangnya transparansi dalam proses pengumpulan data, verifikasi, dan penentuan kegiatan.	Program dan kegiatan tidak tepat sasaran sehingga capaian Indeks Harmoni menurun.	Menetapkan SOP yang jelas dan transparan terkait proses identifikasi kegiatan.	Bupati	Januari - Desember

				Risiko Pemangku Kepentingan	Terjadinya perbedaan kepentingan dan kurangnya sinergi antar stakeholder, seperti PD, pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan masyarakat umum, yang berpotensi menimbulkan konflik dan menghambat peningkatan Indeks Harmoni.	RSP.25.13.16.172	4	Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar-stakeholder dalam proses identifikasi kegiatan.	1) Kegiatan yang diidentifikasi tidak sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga Indeks Harmoni tidak meningkat secara optimal. 2) Meningkatnya potensi konflik sosial antar-stakeholder maupun antar-masyarakat.	1) Membentuk forum koordinasi lintas pemangku kepentingan yang melibatkan PD, pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat. 2) Melakukan sosialisasi dan komunikasi intensif mengenai tujuan dan manfaat peningkatan Indeks Harmoni.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Terhambatnya pelaksanaan proses identifikasi kegiatan akibat kendala operasional, seperti keterbatasan sumber daya atau kendala teknis yang berpotensi menurunkan capaian Indeks Harmoni.	RSP.25.13.16.173	4	1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam menganalisis dan menyusun kegiatan pendukung Indeks Harmoni. 2) Minimnya ketersediaan data dan informasi yang valid, akurat, dan terintegrasi antar-PD.	1) Kegiatan yang dipilih kurang tepat sasaran, berdampak pada rendahnya capaian Indeks Harmoni. 2) Efisiensi dan efektivitas kerja menurun karena kurangnya dukungan sumber daya dan sistem pendukung.	1) Bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM dalam proses identifikasi kegiatan. 2) Membangun sistem integrasi data antar-PD dan pemerintah desa agar informasi dapat diakses lebih mudah dan akurat.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Terhambatnya proses identifikasi kegiatan akibat terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, yang dapat mengganggu koordinasi antar-PD dan stakeholder	RSP.25.13.16.174	2	Perubahan iklim ekstrem yang memengaruhi pola cuaca dan meningkatkan risiko bencana.	1) Tertundanya proses identifikasi kegiatan karena akses lokasi terdampak bencana terputus atau sulit dijangkau. 2) Menurunnya capaian Indeks Harmoni, karena program yang direncanakan tidak berjalan optimal.	Melakukan penyesuaian perencanaan dan jadwal identifikasi kegiatan sesuai dengan kondisi pasca-bencana.	Bupati	Januari - Desember
		Fasilitasi Kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Harmoni		Risiko Kebijakan	Kebijakan fasilitasi kegiatan tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat, dan kondisi daerah, sehingga berpotensi menghambat peningkatan Indeks Harmoni.	RSP.25.13.16.175	4	1) Tidak adanya kebijakan yang jelas dan terarah terkait fasilitasi kegiatan pendukung Indeks Harmoni. 2) Perubahan regulasi dari pemerintah pusat/provinsi yang tidak sinkron dengan kondisi daerah.	Fasilitasi kegiatan menjadi tidak tepat sasaran, sehingga capaian Indeks Harmoni menurun.	Membangun forum koordinasi lintas PD dan stakeholder untuk menyelaraskan kebijakan fasilitasi kegiatan.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Kegiatan fasilitasi tidak sesuai dengan regulasi, kebijakan, atau pedoman teknis, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan teknis dan penurunan capaian Indeks Harmoni.	RSP.25.13.16.176	6	Kurangnya pemahaman PD tentang aturan terkait fasilitasi kegiatan.	Kegiatan tidak sesuai regulasi dan berpotensi dapat temuan audit.	Menyusun pedoman teknis dan SOP pelaksanaan fasilitasi kegiatan.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Terjadinya praktik kecurangan dalam fasilitasi kegiatan, seperti manipulasi data, penyalahgunaan anggaran, kolusi, dan gratifikasi.	RSP.25.13.16.177	3	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang efektif.	Capaian Indeks Harmoni menurun karena kegiatan tidak sesuai sasaran.	Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan sesuai ketentuan hukum.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Perbedaan kepentingan antar-PD, Pemerintah Desa, lembaga masyarakat, dan stakeholder lainnya yang menyebabkan konflik dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan.	RSP.25.13.16.178	6	1) Perbedaan prioritas antara Pemda, PD, dan masyarakat. 2) Minimnya koordinasi dan komunikasi lintas stakeholder.	Penurunan efektivitas fasilitasi kegiatan dan capaian Indeks Harmoni	Membentuk forum koordinasi antar-stakeholder untuk menyamakan persepsi.	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Terhambatnya pelaksanaan fasilitasi kegiatan akibat kendala teknis dan sumber daya	RSP.25.13.16.179	3	Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan.	1) Proses fasilitasi berjalan lambat, memengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan. 2) Kegiatan menjadi tidak efektif dan capaian Indeks Harmoni menurun.	1) Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis fasilitasi kegiatan. 2) Menetapkan timeline dan target capaian yang jelas. 3) Melakukan rapat koordinasi rutin	Bupati	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Pelaksanaan fasilitasi kegiatan terganggu atau terhenti akibat bencana alam, sehingga target capaian Indeks Harmoni tidak tercapai.	RSP.25.13.16.180	1	Perubahan iklim ekstrem yang menyebabkan terjadinya bencana sehingga menghambat kegiatan	Tertundanya pelaksanaan fasilitasi kegiatan karena lokasi atau tempat pelaksanaan kegiatan terdampak tidak dapat dijangkau.	Menyusun ulang jadwal kegiatan pasca bencana	Bupati	Januari - Desember

Mengetahui,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Umi Lestari Nurjanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 199603 2 004

TUJUAN DAN SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PD	PROSES BISNIS	KATEGORI RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat	Persentase Desa Yang Berpredikat Mandiri	Melaksanakan fasilitasi penyusunan Indeks Desa	Risiko Kebijakan	Peraturan tentang indeks desa tidak disampaikan sehingga tidak ada pedoman untuk melaksanakan pendataan Indeks Desa	RSO.25.13.16.01	1	1) Kurangnya perhatian untuk memahami perintah yang harus disampaikan ke desa guna melaksanakan input data 2) Kurangnya kajian terhadap surat perintah untuk melaksanakan input data	1) Pelaksanaan input data untuk penilaian status desa menjadi kurang efektif 2) Capaian target Desa Mandiri terhambat	1) Melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah desa, PD/PLD/BPD, dan tokoh masyarakat sebelum pelaksanaan input data 2) Menyusun kebijakan berbasis data dengan mempertimbangkan aspek geografis, sosial, ekonomi, dan budaya setiap desa	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan desa terhadap perintah untuk melaksanakan input Indeks Desa sesuai ketentuan yang sudah diatur	RSO.25.13.16.02	1	Kurangnya perhatian perangkat desa dan PD/PLD/BPD terhadap perintah untuk melaksanakan input data sesuai dengan ketentuan yang ada	1) Proses peningkatan status desa terhambat 2) Target Desa Mandiri tidak tercapai	1) Meningkatkan pemahaman perangkat desa dan PD/PLD/BPD 2) Membuat buku saku, modul yang memuat langkah-langkah pelaksanaan sesuai peraturan 3) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Fraud	Input data yang tidak sesuai aturan sehingga hasilnya tidak sesuai kenyataan	RSO.25.13.16.03	1	Kurangnya perhatian dan pendampingan dalam pelaksanaan input data	Data tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan	1) Memperkuat sistem verifikasi data (pemerintah desa, PD/PLD/BPD, kecamatan, dinas) 2) Menetapkan sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan manipulasi data	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Pemangku Kepentingan	kurangnya perhatian dan kerjasama dengan pemerintah desa dan TAPD/BPD dalam pelaksanaan input data	RSO.25.13.16.04	1	1) Kurangnya koordinasi 2) Perbedaan pemahaman terkait mekanisme input data	Proses input data untuk penilaian status desa menjadi tidak optimal	1) Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, TAPD/BPD dan Pemerintah Desa 2) Menyamakan persepsi tentang mekanisme pelaksanaan input	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Operasional	Gangguan sistem informasi berpotensi menghambat pelaksanaan input data	RSO.25.13.16.05	1	1) Sistem informasi tidak terintegrasi dengan baik 2) Kurangnya pemahaman SDM dalam pengelolaan data	1) Proses pengolahan dan pelaporan data menjadi terhambat. 2) Penentuan status desa mandiri menjadi tidak akurat. 3) Target peningkatan status desa mandiri sulit tercapai	1) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis. 2) Peningkatan kualitas dan stabilitas jaringan internet. 3) Monitoring dan evaluasi rutin terhadap kinerja sistem informasi.	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Bencana	Bencana alam seperti hujan yang sangat lebat, angin dan petir berpotensi menghambat jaringan sehingga proses input data tidak berjalan lancar	RSO.25.13.16.06	10	1) Kondisi geografis desa yang rawan bencana. 2) Curah hujan tinggi dan perubahan iklim ekstrem. 3) Minimnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di tingkat desa 4) jaringan internet yang lemah	1) Kerusakan infrastruktur dan fasilitas desa. 2) Terhambatnya proses pelayanan dan pembangunan desa. 3) Penurunan capaian target peningkatan status desa mandiri.	Menyediakan sarana penunjang evakuasi dan bantuan darurat.	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
		Verifikasi dan Validasi	Risiko Kebijakan	Tim Verval Indeks Desa tidak memahami tugasnya untuk memverifikasi dan memvalidasi hasil input data	RSO.25.13.16.07	2	Kurangnya pemahaman Tim Verval terhadap aturan dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data hasil input	1) Pelaksanaan input data untuk penilaian status desa menjadi kurang efektif 2) Capaian target Desa Mandiri terhambat	Melakukan koordinasi dan mempelajari kembali regulasi yang mengatur pelaksanaan input Indeks Desa	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan Tim Verval terhadap tahapan yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data	RSO.25.13.16.08	2	Kurangnya perhatian Tim Verval terhadap aturan untuk melaksanakan verifikasi dan validasi	1) Proses peningkatan status desa terhambat 2) Target Desa Mandiri tidak tercapai	Meningkatkan pemahaman terhadap hasil dari input Indeks Desa	Kepala Dinpermades	Januari - Desember

			Risiko Fraud	Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi tidak berdasarkan data yang sebenarnya, namun hanya berdasarkan kepentingan yang dikehendaki	RSO.25.13.16.09	3	Adanya keinginan untuk menaikkan nilai status desa	Data tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan	1) Memperkuat sistem verifikasi data 2) Menetapkan sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan manipulasi data 3) Melaksanakan verifikasi dan validasi data sesuai dengan kondisi yang nyata di lapangan	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Pemangku Kepentingan	Adanya campur tangan dari pihak lain untuk melaksanakan input data yang tidaksesuai kondisi nyata di lapangan	RSO.25.13.16.10	1	Adanya kepentingan pribadi/golongan untuk menggugulkan hasil input data sehingga status desa tidak sesuai dengan kondisi yang ada	Proses input data untuk penilaian status desa menjadi tidak optimal	1) Tidak ada campur tangan terhadap pelaksanaan input data 2) Menyamakan persepsi tentang mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Operasional	Gangguan sistem informasi berpotensi menghambat pelaksanaan verifikasi dan validasi data hasil input	RSO.25.13.16.11	1	Sistem informasi tidak terintegrasi dengan baik	1) Proses verifikasi dan validasi data data menjadi terhambat. 2) Penentuan status desa mandiri menjadi tidak akurat. 3) Target peningkatan status desa mandiri sulit tercapai	1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas teknis yang menangani jaringan internet. 2) Peningkatan kualitas dan stabilitas jaringan internet.	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Bencana	Bencana alam seperti hujan yang sangat lebat, angin dan petir berpotensi menghambat jaringan sehingga proses input data tidak berjalan lancar	RSO.25.13.16.12	10	1) Curah hujan tinggi dan perubahan iklim ekstrem. 3) Jaringan internet yang lemah	1) Kerusakan infrastruktur dan fasilitas jaringan internet 2) Terhambatnya verifikasi dan validasi data	Menyediakan sarana penunjang guna mengatasi jaringan internet yang terhambat	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
	Nilai Skor Indeks Desa	Melaksanakan Fasilitas Penilaian Skor Indeks Desa	Risiko Kebijakan	Peraturan tentang nilai skor indeks desa tidak disampaikan ke Desa	RSO.25.13.16.13	1	1) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya skor indeks desa	Pemerintah Desa kurang memahami arti penting pencapaian nilai skor indeks desa	1) Melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah desa, PD/PLD/BPD , dan tokoh masyarakat sebelum pelaksanaan input data 2) Menyusun kebijakan berbasis data dengan mempertimbangkan aspek geografis, sosial, ekonomi, dan budaya setiap desa	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan desa terhadap aturan yang ditetapkan dalam menjawab kuesioner	RSO.25.13.16.14	1	Kurangnya perhatian perangkat desa dan PD/PLD/BPD terhadap perintah untuk melaksanakan input data sesuai dengan ketentuan yang ada	1) Target Status Desa Mandiri tidak tercapai 2) Terjadi penurunan status desa	1) Meningkatkan pemahaman perangkat desa dan PD/PLD/BPD 2) Membuat buku saku, modul yang memuat langkah-langkah pelaksanaan sesuai peraturan 3) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Fraud	Input data yang tidak sesuai aturan sehingga nilai skor tidak sesuai keadaan sebenarnya	RSO.25.13.16.15	1	Kurangnya perhatian dan pendampingan dalam pelaksanaan input data	Data tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan	1) Memperkuat sistem verifikasi data (pemerintah desa, PD/PLD/BPD , kecamatan, dinas) 2) Menetapkan sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan manipulasi data	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Pemangku Kepentingan	kurangnya perhatian dan kerjasama pemerintah desa dan TAPD/BPD dalam penyampaian nilai skor terhadap input data	RSO.25.13.16.16	1	1) Kurangnya koordinasi 2) Kurangnya pemahaman terkait nilai skor data	Nilai skor untuk menentukan status desa menjadi tidak optimal	1) Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, TAPD/BPD dan Pemerintah Desa 2) Menyamakan persepsi tentang mekanisme pelaksanaan input	Kepala Dinpermares	Januari - Desember

			Risiko Operasional	Gangguan sistem informasi berpotensi menghambat pelaksanaan input data	RSO.25.13.16.17	3	Sistem informasi tidak terintegrasi dengan baik sehingga pelaksanaan input data menjadi terhambat dan nilai skor tidak sesuai dengan data yang sebenarnya	1) Penentuan status desa mandiri menjadi tidak akurat. 2) Target peningkatan status desa mandiri sulit tercapai	1) Peningkatan kualitas dan stabilitas jaringan internet. 2) Monitoring dan evaluasi rutin terhadap kinerja sistem informasi.	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Bencana	Bencana alam seperti hujan yang sangat lebat, angin dan petir berpotensi menghambat jaringan sehingga proses input data tidak berjalan lancar	RSO.25.13.16.18	10	1) Kondisi geografis desa yang rawan bencana. 2) Curah hujan tinggi dan perubahan iklim ekstrem. 3) Minimnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di tingkat desa 4) jaringan internet yang lemah	1) Kerusakan infrastruktur dan fasilitas desa. 2) Terhambatnya proses input desa. 3) Penurunan skor nilai capaian target peningkatan status desa mandiri.	Menyediakan sarana penunjang evakuasi dan bantuan darurat.	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
		Verifikasi dan Validasi	Risiko Kebijakan	Tim Verval Indeks Desa tidak memahami arti pentingnya nilai skor	RSO.25.13.16.19	1	Kurangnya pemahaman Tim Verval terhadap hasil nilai skor terhadap status indeks desa	1) Pelaksanaan input data untuk penilaian status desa menjadi kurang efektif 2) Capaian target Desa Mandiri terhambat	Melakukan koordinasi dan mempelajari kembali regulasi yang mengatur pelaksanaan input Indeks Desa	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan Tim Verval terhadap tahapan yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data	RSO.25.13.16.20	2	Kurangnya perhatian Tim Verval terhadap aturan untuk melaksanakan verifikasi dan validasi	1) Proses peningkatan status desa terhambat 2) Target Desa Mandiri tidak tercapai	Meningkatkan pemahaman terhadap hasil dari input Indeks Desa	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Fraud	Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi tidak berdasarkan data yang sebenarnya, namun hanya berdasarkan kepentingan yang dikehendaki	RSO.25.13.16.21	3	Adanya keinginan untuk menaikkan nilai status desa	Data tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan	1) Memperkuat sistem verifikasi data 2) Menetapkan sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan manipulasi data 3) Melaksanakan verifikasi dan validasi data sesuai dengan kondisi yang nyata di lapangan	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Pemangku Kepentingan	Adanya campur tangan dari pemangku kepentingan dalam melaksanakan input data sehingga nilai skor bertambah tetapi tidak sesuai dengan data yang ada di lapangan	RSO.25.13.16.22	2	Adanya kepentingan dari stakeholder untuk mengunggulkan hasil input data sehingga status desa tidak sesuai dengan kondisi yang ada	Nilai skor penilaian status desa menjadi tidak optimal	1) Tidak ada campur tangan terhadap pelaksanaan input data 2) Menyamakan persepsi tentang mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Operasional	Gangguan sistem informasi berpotensi menghambat capaian nilai skor hasil verifikasi dan validasi data	RSO.25.13.16.23	4	Sistem informasi tidak terintegrasi dengan baik	1) Proses verifikasi dan validasi data data menjadi terhambat. 2) Penentuan status desa mandiri menjadi tidak akurat. 3) Target peningkatan status desa mandiri sulit tercapai	1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas teknis yang menangani jaringan internet. 2) Peningkatan kualitas dan stabilitas jaringan internet.	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Bencana	Terjadinya Bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan angin ribut akan mengurangi nilai skor	RSO.25.13.16.24	10	1) Curah hujan tinggi dan perubahan iklim ekstrem. 3) Jaringan internet yang lemah	1) Kerusakan infrastruktur dan fasilitas jaringan internet 2) Terhambatnya proses verifikasi dan validasi data	Koordinasi dengan dinas terkait untuk melaksanakan mitigasi bencana di wilayah-wilayah yang rawan bencana	Kepala Dinpermares	Januari - Desember

Tujuan: mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Peningkatan Kemandirian Desa Sasaran: Meningkatnya	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mekanisme Pelayanan	Risiko Kebijakan	Kebijakan Tidak Berorientasi pada pelayanan	RSO.25.13.16.25	3	Kebijakan lebih fokus pada prosedur internal daripada kebutuhan pengguna layanan	Pelayanan terasa kaku dan tidak ramah	1) menyusun pelayanan berbasis kebutuhan 2) melakukan survei harapan masyarakat terkait pelayanan	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Kepatuhan	SOP pelayanan tidak dilaksanakan	RSO.25.13.16.26	3	SDM/petugas layanan tidak mematuhi SOP	Membingungkan masyarakat	1) Membuat SOP pelayanan kepada masyarakat yang mudah dipahami dan dilaksanakan 2) mensosialisasikan SOP Layanan kepada masyarakat pengguna layanan	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Fraud	Membeda-bedakan (diskriminasi) pelayanan kepada pengguna layanan	RSO.25.13.16.27	2	Layanan bersifat manual saat masyarakat mulai mengharapkan layanan digital.	Pelayanan dianggap tidak modern atau lambat	1) Mengkaji tren dan perilaku pengguna layanan secara berkala 2) melakukan Modernisasi layanan berbasis digital (online, chatbot, aplikasi)	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Pemangku Kepentingan	Tidak Mematuhi Standar Pelayanan Publik (SPP)	RSO.25.13.16.28	3	Petugas pelayanan tidak menjalankan layanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan (UU No. 25 Tahun 2009).	Masyarakat tidak mendapat layanan yang transparan dan adil	Melakukan sosialisasi tentang Standar Pelayanan Publik	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Operasional	Pelanggaran Etika atau alur prosedur pelayanan oleh Petugas	RSO.25.13.16.29	3	petugas pelayanan melakukan tindakan tidak etis seperti diskriminasi, atau sikap tidak ramah.	Mengurangi kepercayaan publik	Penegakan kode etik	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Bencana	penyusunan mekanisme layanan tidak selesai	RSO.25.13.16.30	2	Perubahan iklim dan curah hujan ekstrem	Mekanisme pelayanan tidak bisa diterapkan secara maksimal	Penjadwalan ulang dalam penyusunan mekanisme layanan dengan memperhatikan faktor bencana dan perubahan cuaca ekstrim	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
		Kompetensi SDM Pelaksanaan Pelayanan	Risiko Kebijakan	Kebijakan tidak berbasis analisis kebutuhan SDM sebagai peugas layanan	RSO.25.13.16.31	4	SDM Petugas layanan tidak terampil dan tidak menguasai apa yang seharusnya dilaksanakan	1) Pengguna layanan tidak puas Adanya keluhan dari pengguna layanan	1) Melakukan bintek kepada petugas layanan 2) Melakukan rotasi petugas secara berkala	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Kepatuhan	SDM petugas Pelayanan tidak mematuhi SOP	RSO.25.13.16.32	6	SDM Petugas pelayanan tidak mematuhi SOP	1) Penerima layanan tidak puas 2) potensi pelanggaran hukum.	1) Membuat layanan pengaduan, 2) memasang CCTV 3) membuat tanda larangan pungli serta menerapkan sanksi tegas	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Fraud	Petugas meminta imbalan atas pelayanan yang telah diberikan	RSO.25.13.16.33	2	Petugas meminta imbalan di luar ketentuan resmi untuk mempercepat atau mempermudah pelayanan.	1) Muncul image yang buruk bagi petugas pelayanan 2) Pengguna layanan dirugikan.	1) Memberikan sanksi yang tegas kepada petugas pelayanan yang melanggar SOP/aturan 2) Menerapkan kembali nilai-nilai integritas dalam pelayanan	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Pemangku Kepentingan	Ekspektasi stakeholder tidak terpenuhi	RSO.25.13.16.34	3	Ekspektasi tidak memperhatikan SDM Petugas Pelayanan	1) Ketidakpuasan pengguna layanan 2) Layanan yang diharapkan yaitu mudah, cepat dan gratis tidak terpenuhi	Melakukan survei harapan pengguna sebelum menyusun kebijakan dan melakukan evaluasi kesesuaian layanan dengan ekspektasi	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Operasional	Tidak dilibatkannya pengguna layanan dalam menyusun SOP	RSO.25.13.16.35	4	Kebijakan dibuat tanpa mendengarkan/uji publik kepada pengguna layanan	Terjadi keluhan Ketidakpuasan dari pengguna layanan	1) melakukan Forum konsultasi publik atau FGD dengan melibatkan pengguna layanan 2) secara berkala melakukan evaluasi terhadap SOP Pelayanan	Kepala Dinpermares	Januari - Desember
			Risiko Bencana	Pelatihan/Bintek terhadap Petugas pelayanan tidak terlaksanan, Pelayanan tidak berjalan	RSO.25.13.16.36	2	Sistem pelayanan online/error, server down, gangguan jaringan	1) Layanan terganggu, 2) adanya keluhan/komplain dari pengguna layanan	1) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk Backup data 2) SOP penanganan gangguan sistem jika terjadi bencana, perubahan iklim atau cuaca ekstrem	Kepala Dinpermares	Januari - Desember

		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan	Risiko Kebijakan	Ketidaksiapan Sarana dan prasarana pelayanan sesuai ketentuan	RSO.25.13.16.37	16	Perangkat Daerah (Dinperdades) tidak mempunyai sarana dan prasarana yang sesuai ketentuan	1) Pelayanan menjadi lambat 2) muncul ketidakpuasan masyarakat	berusaha memenuhi sarana dan prasarana pelayanan sesuai ketentuan	Kepala Dinperdades	Januari - Desember
			Risiko Kepatuhan	Sarana & prasarana pendukung layanan tidak sesuai dengan ketentuan	RSO.25.13.16.38	8	sarana dan prasarana yang rusak dan sudah tidak layak	1) Pelayanan menjadi lambat 2) muncul ketidakpuasan masyarakat	Inventarisasi kebutuhan secara berkala dan Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada	Kepala Dinperdades	Januari - Desember
			Risiko Fraud	Penyalahgunaan sarana dan prasarana	RSO.25.13.16.39	4	Adanya kepentingan pribadi/keompok	Pelayanan menjadi lambat	Inventarisasi kebutuhan secara berkala dan Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada	Kepala Dinperdades	Januari - Desember
			Risiko Pemangku Kepentingan	Adanya tuntutan yang berlebihan dari pengguna layanan	RSO.25.13.16.40	2	Pengguna layanan ingin pelayanan yang memuaskan	Timbul keluhan dari penggunaan layanan	1) menginventarisir kebutuhan pelayanan dari pengguna layanan secara berkala 2) Mengakomodir kebutuhan layanan dari pengguna layanan sesuai kemampuan	Kepala Dinperdades	Januari - Desember
			Risiko Operasional	Pelayanan tidak berjalan lancar/terhambat	RSO.25.13.16.41	3	Sarana dan prasarana tidak memadai	Masyarakat tidak puas terhadap layanan yang diberikan	1) memenuhi sarana dan prasarana pelayanan sesuai kebutuhan 2) Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap sarpras yang ada	Kepala Dinperdades	Januari - Desember
			Risiko Bencana	Terhambanya pelayanan dapat mempengaruhi angka Indeks Kepuasan Masyarakat	RSO.25.13.16.42	2	Curah hujan tinggi dan perubahan iklim ekstrem.	Pelaksana layanan terganggu sehingga bisa mempengaruhi IKM rendah	Melakukan antisipasi proses layanan pada saat ada gangguan karena cuaca ekstrim atau perubahan iklim	Kepala Dinperdades	Januari - Desember
		Pelaksanaan Survey dan pelaporan	Risiko Kebijakan	Laporan survei dan data hasil survei tidak sinkron	RSO.25.13.16.43	4	Terlalu fokus pada hasil pelaporan yang baik tanpa memperhatikan hasil survei	Pelaporan Hasil survei tidak valid	1) FGD internal 2) Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Kepala Dinperdades	Januari - Desember
			Risiko Kepatuhan	Laporan tidak sesuai dengan hasil survei	RSO.25.13.16.44	4	terlalu fokus pada hasil survey yang baik	Laporan yang disusun tidak sesuai kenyataan riil hasil survey	1) Mendorong SDM pelaksanaan survei dan pembuat laporan untuk membaca dan memahami Peraturan yang ada terkait SKM dan IKM 2) Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Kepala Dinperdades	Januari - Desember
			Risiko Fraud	Manipulasi data, jawaban dan hasil survei	RSO.25.13.16.45	2	data, jawaban dan hasil survey tidak sesuai harapan	Laporan yang disusun tidak sesuai kenyataan riil hasil survey	1) Mendorong SDM Petugas Survei untuk bertindak profesional dan mengutamakan pelayanan 2) Mendorong SDM untuk melakukan evaluasi atas hasil riil SKM	Kepala Dinperdades	Januari - Desember
			Risiko Pemangku Kepentingan	Pemangku kepentingan tidak menerima hasil survei yang sebenarnya	RSO.25.13.16.46	2	Adanya manipulasi data, jawaban dan hasil survei	Pengambilan kebijakan/keputusan yang salah	1) Melakukan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan 2) Melakukan Koordinasi dengan Bidang-bidang dan Perangkat Daerah terkait	Kepala Dinperdades	Januari - Desember
			Risiko Operasional	Kesalahan dalam menentukan responden	RSO.25.13.16.47	4	1) Kompetensi SDM yang tidak memadai 2) Kurangnya koordinasi PD Terkait	Laporan yang disusun tidak sesuai ketentuan	1. Melakukan rapat koordinasi internal Dinperdades dalam menentukan Resonden 2) Melakukan koordinasi dengan PD terkait	Kepala Dinperdades	Januari - Desember
			Risiko Bencana	Terhambatnya proses penyusunan laporan SKM	RSO.25.13.16.48	1	Bencana atau cuaca ekstrim	pelaporan perencanaan tidak tepat waktu	Membuat tahapan koordinasi dengan memperhatikan dampak cuaca ekstrim dan perubahan iklim	Kepala Dinperdades	Januari - Desember

Tujuan: mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Peningkatan Kemandirian Desa Sasaran: Meningkatkan Nilai Indeks Desa	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Penyusunan Perencanaan Kinerja Yang Berkualitas	Risiko Kebijakan	Kebijakan tidak jelas/ambiguitas	RSO.25.13.16.49	4	1) kurang optimalnya pemahaman atas sebuah aturan perencanaan 2) Bahasa kebijakan terlalu normatif dan susah untuk dipahami 3) Kurangnya kompetensi ASN Perencanaan di Dinpermades	Penyusunan perencanaan tidak sesuai ketentuan	1) Mengikuti Bintek perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah 2) Membudayakan literasi membaca 3) Melakukan Koordinasi dengan perangkat Daerah Terkait	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Kepatuhan	Penyusunan perencanaan tidak memperhatikan tahapan perencanaan	RSO.25.13.16.50	8	1) kurang optimalnya pemahaman atas sebuah aturan perencanaan 2) Kurangnya kompetensi ASN Perencanaan di Dinpermades	Penyusunan perencanaan tidak sesuai ketentuan	1) Mengikuti Bintek/FGD/Desk perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah 2) Membudayakan literasi membaca 3) Melakukan Koordinasi dengan perangkat Daerah Terkait	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Fraud	Manipulasi data awal perencanaan	RSO.25.13.16.51	3	1) tidak memiliki data yang valid sebagai data awal perencanaan 2) Kurangnya kompetensi ASN Perencanaan di Dinpermades	Perencanaan tidak sesuai kebutuhan	1) Membuat/menyusun bank data yang mendukung perencanaan 2) Membudayakan literasi membaca 3) Melakukan Koordinasi dengan Bidang-Bidang di Dinpermades dan Perangkat Daerah Terkait	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Pemangku Kepentingan	Terjadi benturan kepentingan	RSO.25.13.16.52	6	1) tidak memiliki data yang valid sebagai data awal perencanaan 2) Kurangnya Koordinasi dengan Bidang-Bidang di Dinpermades dan Perangkat Daerah terkait	Tahapan penyusunan perencanaan terhambat atau tidak sesuai perencanaan	1) Mengikuti Bintek/FGD/Desk perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah 2) Melakukan Koordinasi dengan perangkat Daerah Terkait	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Operasional	Perencanaan disusun tidak sesuai dengan ketentuan	RSO.25.13.16.53	6	1) Kompetensi SDM perenanaan yang tidak memadai 2) keterbatasan sarpras pendukung	Kegiatan penyusunan perencanaan tidak berjalan dengan optimal	Pembinaan dan Pendampingan dari Dinpermades, Kecamatan dan TPP	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Bencana	Bencana atau cuaca ekstrim mengikibit terhambatnya proses perencanaan	RSO.25.13.16.54	2	cuaca ekstrem dan perubahan iklim.	Kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan	Membuat perencanaan yang memerhatikan dampak cuaca ekstrim dan perubahan iklim	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
		Koordinasi dengan Bidang Bidang	Risiko Kebijakan	Perbedaan persepsi dalam menyikapi sebuah aturan perencanaan antara Bidang dan Sekretariat	RSO.25.13.16.55	6	1) kurang optimalnya pemahaman atas sebuah aturan perencanaan 2) kurang komunikasi antara sekretariat dengan Bidang-Bidang	Penyusunan perencanaan tidak sesuai ketentuan	1) Membudayakan literasi membaca aturan perencanaan dan berdiskusi bersama 2) meningkatkan komunikasi dan Koordinasi dengan bidang-bidang	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Kepatuhan	penyusunan perencanaan tidak tepat waktu	RSO.25.13.16.56	9	1) Perubahan Peraturan tentang Perencanaan 2) SDM yang tidak mau keluar dari Zona Nyaman	Penyusunan perencanaan tidak sesuai ketentuan	1) Melaksanak Forum Internall Dinpermades 2) Melakukan Koordinasi dengan Kabid-Kabid	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Fraud	Manipulasi Data dukung perencanaan	RSO.25.13.16.57	3	Realisasi dan realita data dukung perencanaan tidak sesuai	Perencanaan tidak mencerminkan kebutuhan organisasi	1) Membuat/menyusun bank data yang mendukung perencanaan 2) Membudayakan literasi membaca 3) Melakukan Koordinasi dengan Bidang-Bidang di Dinpermades dan Perangkat Daerah Terkait	Kepala Dinpermades	Januari - Desember

			Risiko Pemangku Kepentingan	terjadi benturan prioritas pekerjaan	RSO.25.13.16.58	8	1) tidak memiliki data yang valid sebagai data awal perencanaan 2) Kurangnya Koordinasi dengan Bidang-Bidang di Dinpermades dan Perangkat Daerah terkait	Tahapan penyusunan perencanaan terhambat atau tidak sesuai perencanaan	1) Mengikuti Bintek/FGD/Desk perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah 2) Melakukan Koordinasi dengan perangkat Daerah Terkait	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Operasional	Penyusunan perencanaan tidak tepat waktu	RSO.25.13.16.59	10	1) Prioritas penyelesaian Pekerjaan Bidang 2) keterbatasan sarpras pendukung	Kegiatan penyusunan perencanaan tidak berjalan dengan optimal	1. Membangun sistem data dan dokumentasi yang tertib dan digital 2) Menyiapkan SDM dalam setiap Bidang untuk mengampu perencanaan	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Bencana	Bencana atau cuaca ekstrim mengikibit terhambatnya proses koordinasi dengan bidang bidang	RSO.25.13.16.60	2	cuaa ekstrem dan perubahan iklim.	Tidak terlaksananya koordinasi denganbidang-bidang	Membuat tahapan koordinasi dengan memperhatikan dampak cuaca ekstrim dan perubahan iklim	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
		Monitoring dan Evaluasi Berkala	Risiko Kebijakan	Monitoring dan evaluasi hanya formalitas	RSO.25.13.16.61	6	1) pemahaman yang keliru bahwa monitoring dan evaluasi merupakan tahapan yang bersifat formalitas (Yang penting dilaksanakan) 2) Kompetensi SDM yang kurang memadai	Hasil monitoring tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya	1) Mensosialisasikan Core Value ASN BerAKHLAK 2) Mendorong SDM Dinpermades untuk berfikir out the box	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
			Risiko Kepatuhan	tidak dilakukan monitoring dan evaluasi	RSO.25.13.16.62	6	Adanya anggapan dilakukan atau tidak dilakukan monitoring dan evaluasi sama saja hasilnya	Hasil monitoring tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya	1) Mensosialisasikan Core Value ASN BerAKHLAK 2) Mendorong SDM Dinpermades untuk berfikir out the box	Kepala Dinpermades	Januari - Desember

				Risiko Fraud	Manipulasi hasil monitoring	RSO.25.13.16.63	3	1) Tidak dilakukan monitoring dan evaluasi 2) SDM yang kurang kompeten terkait perencanaan	Hasil monitoring tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya	1) Mensosialisasikan Core Value ASN BerAKHLAK 2) Mendorong SDM Dinpermades untuk berfikir out the box	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Pemangku Kepentingan (Kepala Dinpermades) tidak tepat dalam mengambil kebijakan	RSO.25.13.16.64	3	Hasil monitoring tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya	Hasil Monitoring dan evaluasi tidak sesuai dengan target dan harapan	1) Pimpinan untuk selalu cek dan ricek atas perkembangan atau perubahan baik kebijakan, aturan maupun data dukung perencanaan 2) secara berkala melakukan forum internal yang terkait perencanaan	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Monitoring dan evaluasi dilakukan ketika ada permasalahan	RSO.25.13.16.65	6	1) Monitoring dan evaluasi tidak dilakukan secara berkala 2) Terjebak dalam zona nyaman	Program dan kegiatan tidak berjalan sesuai harapan	1) mendorong SDM Dinpermades untuk berkomitmen dalam menjalankan tupoksinya 2) Mendorong SDM Dinpermades untuk bekerja tidak berdasarkan kebiasaan dan selalu berinovasi	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Tidak terlaksananya monitoring dan evaluasi	RSO.25.13.16.66	2	cuaca ekstrem dan perubahan iklim.	Proses monitoring dan evaluasi tertunda	Membuat tahapan monitoring dan evaluasi dengan memperhatikan dampak cuaca ekstrem dan perubahan iklim	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman			Pelaporan dan Dokumentasi Kinerja	Risiko Kebijakan	Laporan Perencanaan dan data dukung tidak sinkron serta tidak sesuai dengan RPJMD, Renstra dan Renja PD	RSO.25.13.16.67	16	1) Kebijakan atau Peraturan tentang Perencanaan berubah mendadak tanpa disosialisasikan 2) Terlalu fokus pada pelaporan yang tepat waktu tanpa memperhatikan kualitas dan hasil evaluasi	pelaporan tepat waktu tetapi dari segi kualitas rendah	1) FGD internal 2) Mendorong SDM yang ada untuk berfikir <i>Out the box</i> 3) Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
				Risiko Kepatuhan	Laporan tidak sesuai dengan format yang ditentukan	RSO.25.13.16.68	12	SDM tidak memahami format yang telah ditentukan	Laporan yang disusun tidak sesuai format	1) Mendorong SDM yang ada untuk membaca Peraturan yang ada 2) Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
				Risiko Fraud	Manipulasi data laporan perencanaan	RSO.25.13.16.69	3	Hasil monitoring dan evaluasi tidak sesuai target/harapan	Perencanaan tidak tepat sasaran	1) Mendorong SDM perencanaan untuk meningkatkan kompetensinya 2) Melakukan Koordinasi dengan Bidang-bidang dan Perangkat Daerah terkait secara berkala	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
				Risiko Pemangku Kepentingan	Pemangku kepentingan tidak menerima hasil laporan perencanaan	RSO.25.13.16.70	3	Pemangku kepentingan tidak memahami hasil laporan perencanaan	Pengambilan kebijakan/keputusan yang salah	1) Forum Internal PD secara rutin 2) Melakukan Koordinasi dengan Bidang-bidang dan Perangkat Daerah terkait secara berkala	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
				Risiko Operasional	Keterlambatan dalam penyusunan Laporan Perencanaan	RSO.25.13.16.71	16	1) Kompetensi SDM yang tidak memadai 2) data dukung tidak terkumpul tepat waktu 3) Kurangnya koordinasi intern PD	pelaporan perencanaan tidak tepat waktu	1. Membangun sistem data dan dokumentasi yang tertib dan digital 2) Menyiapkan SDM dalam setiap Bidang untuk mengampu perencanaan	Kepala Dinpermades	Januari - Desember
				Risiko Bencana	Terhambatnya proses penyusunan laporan perencanaan	RSO.25.13.16.72	2	Bencana atau cuaca ekstrem	pelaporan perencanaan tidak tepat waktu	Membuat tahapan koordinasi dengan memperhatikan dampak cuaca ekstrem dan perubahan iklim	Kepala Dinpermades	Januari - Desember

Mengetahui,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Umi Lestari Numanah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 199603 2 004

TUJUAN PEMDA	SASARAN PEMDA	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN PROGRAM PD	PROSES BISNIS	KATEGORI RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	Kode Risiko	SKALA RISIKO	SEBAB	DAMPAK	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU PENYELESAIAN
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat													
		Tujuan: Meningkatkan kemandirian desa Sasaran: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan di desa serta Pemberdayaan Desa berbasis Masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Penaan Desa	Presentase Desa yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Risiko Kebijakan	Ketidaksesuaian dokumen dengan RPJMD dan kebijakan pusat	ROO.25.13.16.01	6	Perubahan regulasi atau kurang sinkronisasi	Penetapan dokumen tertunda, perlu revisi	Monitoring regulasi secara berkala dan sinkronisasi dengan RPJMD	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
							Perubahan kebijakan pusat/daerah secara mendadak	ROO.25.13.16.02	4	Terbitnya aturan baru setelah dokumen disusun	Perencanaan tidak berlaku, harus revisi ulang	Penyusunan dokumen fleksibel dengan klausul revisi cepat		
							Prioritas pembangunan desa tidak selaras dengan kebijakan daerah	ROO.25.13.16.03	9	Kurangnya koordinasi desa dengan pemerintah daerah	Program desa tidak terakomodasi dalam anggaran daerah	Rapat koordinasi rutin lintas level pemerintahan		
							Tumpang tindih kebijakan antar sektor	ROO.25.13.16.04	10	Instruksi kebijakan tidak terintegrasi	Program desa berjalan tidak efektif, inefisiensi anggaran	Penguatan koordinasi lintas sektor dan harmonisasi kebijakan		
							Pengaruh kepentingan politik dalam penentuan prioritas	ROO.25.13.16.05	8	Intervensi aktor politik dalam penyusunan dokumen	Program lebih politis daripada berbasis kebutuhan masyarakat	Transparansi dokumen dan partisipasi publik lebih luas		
							Kebijakan anggaran yang berubah karena kondisi fiskal	ROO.25.13.16.06	10	Adanya refocusing atau realokasi anggaran	Program penataan desa tertunda atau dibatalkan	Menyusun prioritas minimal dan alternatif pendanaan		
							Keterlambatan penetapan kebijakan anggaran daerah	ROO.25.13.16.07	6	Proses politik antara eksekutif dan legislatif memakan waktu	Pelaksanaan program desa tertunda	Meningkatkan komunikasi formal antara pemerintah dan DPRD		
							Dokumen perencanaan tidak sesuai dengan pedoman teknis	ROO.25.13.16.08	8	SDM desa/daerah kurang memahami aturan	Revisi berulang, pemborosan waktu dan biaya	Bimbingan teknis dan pelatihan regulasi terbaru		
							Kurangnya mekanisme evaluasi kebijakan	ROO.25.13.16.09	8	Monitoring dan evaluasi tidak berjalan	Program tidak sesuai kebutuhan dan sulit diukur keberhasilannya	Menerapkan sistem evaluasi berkala dengan indikator jelas		
							Kebijakan tidak transparan kepada masyarakat	ROO.25.13.16.10	8	Informasi perencanaan tidak dipublikasikan	Menurunnya kepercayaan publik dan resistensi masyarakat	Publikasi dokumen melalui kanal resmi dan forum desa		
						Risiko Kepatuhan	Dokumen perencanaan tidak sesuai dengan regulasi terbaru	ROO.25.13.16.11	9	SDM desa kurang memahami aturan dan pedoman	Penetapan dokumen tertunda, perlu revisi	Bimbingan teknis regulasi terbaru bagi perangkat desa	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
							Keterlambatan penyampaian dokumen ke kabupaten/pusat	ROO.25.13.16.12	16	Jadwal tidak disiplin dan lemahnya monitoring	Program penataan desa tertunda	Menyusun timeline ketat dan monitoring progres rutin		
							Dokumen perencanaan tidak sesuai format standar	ROO.25.13.16.13	8	Perangkat desa tidak memahami pedoman teknis	Revisi berulang, pemborosan waktu dan biaya	Sosialisasi pedoman teknis dan template standar		
							Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan anggaran	ROO.25.13.16.14	8	Koordinasi lemah antara desa dan kabupaten	Program tidak dapat dijalankan sesuai target	Rapat koordinasi sinkronisasi perencanaan dan anggaran		
							Kurangnya bukti partisipasi masyarakat dalam musyawarah	ROO.25.13.16.15	6	Sosialisasi minim dan forum musyawarah tidak inklusif	Program dianggap tidak aspiratif dan berpotensi ditolak	Memperkuat mekanisme musrenbang dan dokumentasi hasil		
							Arsip dokumen perencanaan tidak lengkap atau hilang	ROO.25.13.16.16	16	Pengelolaan arsip manual dan tidak tertata	Kesulitan audit, risiko temuan administrasi	Menerapkan sistem pengarsipan digital dan fisik terintegrasi		
							Tidak adanya laporan hasil perencanaan ke publik	ROO.25.13.16.17	9	Transparansi rendah dan informasi tidak diumumkan	Menurunnya kepercayaan publik dan rawan sengketa hukum	Publikasi hasil perencanaan di papan informasi desa/website		
							Tidak dilaksanakannya evaluasi dokumen perencanaan	ROO.25.13.16.18	8	Kurangnya fungsi monitoring dan evaluasi internal	Program tidak sesuai kebutuhan dan sulit diukur keberhasilannya	Menerapkan sistem evaluasi berkala dengan indikator kinerja		
							Potensi temuan audit atas dokumen perencanaan	ROO.25.13.16.19	9	Ketidakpatuhan terhadap regulasi dan prosedur	Rekomendasi sanksi administrasi atau pengembalian anggaran	Penguatan peran inspektorat dan pendamping desa		
							Ketidaksesuaian kebijakan desa dengan RPJMDes/RPJMD	ROO.25.13.16.20	9	Kurangnya sinkronisasi antar level perencanaan	Pembangunan desa tidak sejalan dengan arah pembangunan	Koordinasi sinkronisasi kebijakan secara periodik		
						Risiko Fraud	Manipulasi data kebutuhan program desa	ROO.25.13.16.21	6	Data desa tidak diverifikasi dan lemahnya pengawasan	Program tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat	Validasi data oleh pihak independen dan cross-check antar desa	Kepala Dinpermades	Januari-Desember

Pengelembungan anggaran dalam dokumen perencanaan	ROO.25.13.16.22	4	Lemahnya sistem review dan verifikasi anggaran	Pemborosan anggaran, inefisiensi pembangunan desa	Audit internal dan review dokumen oleh tim pengawas
Pemalsuan tanda tangan atau persetujuan pejabat desa	ROO.25.13.16.23	6	Proses administrasi manual tanpa autentikasi	Risiko pidana, dokumen tidak sah	Menggunakan tanda tangan elektronik dan autentikasi berlapis
Penyusunan dokumen tanpa melalui musyawarah desa	ROO.25.13.16.24	6	Musyawarah tidak dilaksanakan atau hanya formalitas	Program tidak legitimate, menurunkan kepercayaan masyarakat	Meningkatkan pengawasan musyawarah desa oleh pendamping
Penggunaan data fiktif untuk perencanaan	ROO.25.13.16.25	4	Usulan program tidak diverifikasi dengan kondisi lapangan	Program tidak tepat sasaran, rawan penyalahgunaan anggaran	Survey lapangan dan verifikasi usulan desa secara menyeluruh
Kolusi antara perangkat desa dengan pihak ketiga	ROO.25.13.16.26	4	Adanya kepentingan politik/ekonomi tertentu	Program menguntungkan pihak tertentu, tidak adil bagi masyarakat	Penerapan pakta integritas dan pengawasan independen
Penyisipan program/kegiatan yang tidak sesuai prioritas	ROO.25.13.16.27	3	Tidak ada filter ketat pada proses perencanaan	Program tidak sejalan dengan visi pembangunan desa	Review program oleh tim lintas sektor dan fasilitator
Pengabaian hasil musrenbang demi kepentingan kelompok	ROO.25.13.16.28	6	Forum musyawarah tidak inklusif	Program desa tidak aspiratif, menimbulkan konflik	Meningkatkan transparansi dan keterlibatan seluruh masyarakat
Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa	ROO.25.13.16.29	8	Kewenangan terlalu terpusat tanpa pengawasan	Potensi korupsi dan kerugian keuangan desa	Penguatan pengawasan oleh BPD, inspektorat, dan masyarakat
Dokumen perencanaan tidak dipublikasikan ke masyarakat	ROO.25.13.16.30	9	Transparansi rendah dan informasi ditutup-tutupi	Menurunkan kepercayaan publik, potensi manipulasi	Publikasi dokumen secara terbuka di papan informasi desa/website
Risiko Pemangku Kepentingan					
Ketidaksepakatan antara eksekutif dan legislatif	ROO.25.13.16.31	8	Perbedaan kepentingan politik dan prioritas pembangunan	Penundaan pengesahan dokumen anggaran	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi formal dengan DPRD
Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah (OPD)	ROO.25.13.16.32	8	Forum koordinasi tidak berjalan optimal	Program tumpang tindih atau tidak sinkron	Rapat koordinasi rutin, integrasi rencana lintas sektor
Kurangnya dukungan pemangku kepentingan utama	ROO.25.13.16.33	9	Stakeholder kunci tidak dilibatkan sejak awal	Implementasi program tidak berjalan efektif	Melibatkan stakeholder kunci sejak tahap perencanaan
Ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil perencanaan	ROO.25.13.16.34	10	Hasil perencanaan tidak sesuai aspirasi masyarakat	Terjadi konflik sosial, protes, menurunnya kepercayaan	Meningkatkan mekanisme umpan balik dan klarifikasi hasil perencanaan
Kurangnya peran inspektorat/pengawas internal	ROO.25.13.16.35	6	Fungsi pengawasan tidak berjalan optimal	Potensi fraud dan ketidakpatuhan meningkat	Penguatan peran inspektorat dalam monitoring dan evaluasi
Kurangnya transparansi kepada publik	ROO.25.13.16.36	10	Informasi dokumen perencanaan tidak dipublikasikan	Menurunkan kepercayaan publik dan rawan spekulasi	Publikasi dokumen secara terbuka melalui media resmi
Risiko Operasional					
Dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan	ROO.25.13.16.37	8	Adanya kepentingan politik/ekonomi tertentu	Program tidak adil, menimbulkan konflik horizontal	Menetapkan aturan musyawarah yang inklusif dan transparan
Ketidakharmonisan antara pemerintah desa dan BPD	ROO.25.13.16.38	8	Perbedaan kepentingan dan komunikasi lemah	Proses penyusunan dokumen terhambat dan sering revisi	Membangun forum komunikasi rutin antara pemerintah desa dan BPD
Kurangnya dukungan dari pemerintah kabupaten	ROO.25.13.16.39	4	Kurang koordinasi atau sinkronisasi kebijakan	Program desa tidak sesuai arah pembangunan daerah	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi reguler dengan kabupaten
Penolakan masyarakat terhadap hasil perencanaan	ROO.25.13.16.40	4	Usulan masyarakat tidak diakomodasi	Menurunkan kepercayaan publik dan resistensi terhadap program	Peningkatan transparansi hasil musyawarah melalui publikasi terbuka
Kurangnya keterlibatan kelompok rentan (perempuan, pemuda, difabel)	ROO.25.13.16.41	9	Forum musyawarah tidak inklusif	Kebutuhan kelompok rentan terabaikan, ketidakadilan sosial	Menjamin keterwakilan kelompok rentan dalam forum musyawarah
Kurangnya peran pendamping desa	ROO.25.13.16.42	4	Pendamping desa tidak aktif atau jumlahnya terbatas	Perangkat desa kesulitan memahami aturan teknis	Memperkuat fungsi pendamping desa melalui pelatihan dan supervisi
Tuntutan berlebihan dari masyarakat	ROO.25.13.16.43	6	Kurangnya pemahaman tentang keterbatasan anggaran	Program desa tidak realistis, potensi konflik saat realisasi	Sosialisasi batasan anggaran dan prioritas pembangunan
Keterlibatan pihak ketiga yang tidak kredibel	ROO.25.13.16.44	6	Intervensi pihak luar dengan kepentingan tertentu	Program rawan manipulasi dan tidak sesuai kebutuhan	Seleksi ketat mitra kerja dan penerapan pakta integritas
Risiko Bencana					
Keterlambatan penyusunan dokumen akibat bencana alam	ROO.25.13.16.45	2	Banjir, longsor, gempa menghambat aktivitas kantor	Jadwal penyusunan dokumen mundur	Menetapkan rencana kontinjensi dan jadwal cadangan
Hilangnya data perencanaan akibat bencana kebakaran atau banjir	ROO.25.13.16.46	2	Arsip dokumen fisik rusak/hilang	Kehilangan dokumen penting, perlu penyusunan ulang	Menerapkan sistem backup digital dan penyimpanan cloud

	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
	Kepala Dinpermades	Januari-Desember

							Duplikasi atau inkonsistensi data	ROO.25.13.16.108	4	Data masuk dari berbagai sumber tanpa penyalarsan	Laporan menjadi tidak konsisten dan membingungkan stakeholders	Menerapkan sistem basis data terintegrasi dan pengecekan berlipis		
							Kesalahan administrasi dalam pelaporan	ROO.25.13.16.109	9	SDM tidak teliti saat mengisi format laporan	Laporan ditolak oleh pemerintah daerah karena tidak sesuai format	Menggunakan template baku, serta melakukan pengecekan dan review internal		
							Keterbatasan anggaran untuk kegiatan monitoring	ROO.25.13.16.110	8	Dana untuk operasional monitoring minim atau tidak dialokasikan	Monitoring dan evaluasi tidak berjalan optimal	Mengusulkan anggaran khusus dalam APBDDes, memanfaatkan pendampingan eksternal		
						Risiko Bencana	Kehilangan dokumen akibat kebakaran kantor desa	ROO.25.13.16.111	2	Kebakaran karena korsleting listrik atau kelalaian	Dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan hilang, proses pelaporan terganggu	Menyediakan salinan digital, menyimpan arsip di tempat aman tahan api	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
							Kerusakan data akibat banjir atau bencana alam lainnya	ROO.25.13.16.112	2	Arsip fisik terkena air, perangkat elektronik rusak	Data hilang, laporan tidak dapat disusun	Melakukan digitalisasi dokumen, menyimpan backup di cloud	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
							Gangguan pelaksanaan monitoring karena bencana alam (banjir, longsor, gempa)	ROO.25.13.16.113	3	Akses ke lokasi desa terhambat, kegiatan monitoring tertunda	Data lapangan tidak terkumpul, evaluasi tidak lengkap	Menyusun rencana kontinjensi, menggunakan metode monitoring jarak jauh (online/telepon)	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
							Kehilangan SDM kunci akibat bencana (sakit, terdampak bencana)	ROO.25.13.16.114	4	SDM monitoring dan evaluasi tidak bisa bekerja	Kegiatan evaluasi terhambat, laporan tidak selesai	Melakukan pelatihan lintas fungsi agar ada SDM pengganti (backup personil)	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
							Gangguan jaringan komunikasi akibat bencana	ROO.25.13.16.115	3	Internet dan listrik terputus karena bencana	Pengiriman laporan ke pemerintah daerah tertunda	Menyediakan alternatif jaringan (modem, hotspot) dan koordinasi manual bila darurat	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
							Kerusakan fasilitas kantor desa akibat gempa atau badai	ROO.25.13.16.116	2	Kantor rusak, perangkat komputer tidak bisa digunakan	Proses pengolahan data dan pelaporan berhenti	Siapkan lokasi kerja alternatif, gunakan perangkat mobile sementara	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
							Bencana kesehatan (wabah, pandemi) menghambat kegiatan lapangan	ROO.25.13.16.117	3	Pembatasan aktivitas tatap muka, SDM terbatas	Monitoring tidak berjalan, laporan tidak lengkap	Mengadopsi sistem monitoring berbasis online dan koordinasi virtual	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
							Terganggunya transportasi karena bencana	ROO.25.13.16.118	2	Akses jalan terputus sehingga monitoring lapangan gagal dilakukan	Data monitoring tidak valid dan tidak lengkap	Menjalin koordinasi dengan relawan lokal, memanfaatkan jalur alternatif	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
							Kerusakan peralatan akibat sambaran petir atau bencana iklim ekstrem	ROO.25.13.16.119	3	Komputer, server, dan jaringan listrik rusak	Data monitoring hilang, laporan terhambat	Memasang sistem penangkal petir, gunakan UPS dan proteksi listrik	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
							Keterlambatan distribusi laporan fisik karena bencana	ROO.25.13.16.120	2	Mengutamakan pelaporan digital/email, menggunakan kurir alternatif	Data monitoring hilang, laporan terhambat	Memasang sistem penangkal petir, gunakan UPS dan proteksi listrik	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
			Meningkatnya Kerja Sama antar Desa	Persentase kerjasama Desa	Sosialisasi Kerjasama Desa	Risiko Kebijakan	Pemerintah Desa tidak memahami peraturan dan juknis terkait dengan Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga	ROO.25.13.16.121	12	Kurangnya sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang aturan kerjasama antara Desa dengan Pihak Ketiga	Kesalahan administratif, seperti dokumen yang tidak sesuai atau keputusan yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku	Pemerintah kabupaten atau kecamatan menyelenggarakan sosialisasi intensif kepada aparat desa tentang peraturan terkait kerja sama desa dengan Pihak Ketiga	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
						Risiko Kepatuhan	Pemerintah Desa tidak melaksanakan kerjasama antar Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	ROO.25.13.16.122	9	Pemerintah Desa belum memahami bahwa PKS sebagai pedoman dalam Kerjasama Desa dengan Pihak ketiga sangat penting dalam mencapai tujuan bersama	Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Permakades di desa	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
						Risiko Fraud	Penyalahgunaan dalam proses penyusunan, penetapan, atau pelaksanaan PKS	ROO.25.13.16.123	6	1) Adanya kepentingan pribadi atau kelompok yang mempengaruhi proses penetapan PKS 2) Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kerjasama	Potensi kerugian keuangan dan sosial akibat penyalahgunaan kewenangan	1) Menetapkan sanksi tegas 2) Memperkuat pengawasan dan audit internal dalam proses penyusunan dan pelaksanaan PKS	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
						Risiko Pemangku Kepentingan	Lingkungan sosial yang tidak stabil atau adanya konflik internal di desa menghambat terbentuknya kerjasama	ROO.25.13.16.124	8	Perbedaan kepentingan antara Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dapat menghambat kerjasama	Kerjasama yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak menjadi tertunda atau tidak dapat terlaksana	Membangun forum dialog antara Desa dengan Pihak Ketiga untuk menyelesaikan konflik dan membangun kepercayaan	Kepala Dinpermades	Januari-Desember

						Risiko Operasional	Kurangnya efektivitas proses fasilitasi dan pendampingan antar desa berpotensi menghambat terbentuknya kerjasama	ROO.25.13.16.125	8	Kurangnya koordinasi antar antar desa dalam merumuskan bentuk kerjasama	Proses pembangunan berbasis kerjasama desa menjadi terhambat	Meningkatkan koordinasi antara Desa dengan Pihak Ketiga melalui forum komunikasi rutin.	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Bencana	Bencana alam seperti tanah longsor, banjir, atau gempa berpotensi menghambat proses pertemuan, koordinasi, dan pelaksanaan kerjasama antar desa	ROO.25.13.16.126	3	1) Curah hujan ekstrem dan perubahan iklim. 2) Kondisi geografis desa yang rawan bencana.	Tertundanya pelaksanaan atau gagalnya kegiatan kerjasama antar desa.	Menyiapkan alternatif atau penyusunan ulang kerjasama antar Desa	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan	Tujuan: Meningkatkan kemandirian desa Sasaran: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan di desa serta Pemberdayaan	Meningkatnya Kerja Sama antar Desa	Persentase kerjasama Desa	Pendampingan Pelaksanaan Kerjasama Desa	Risiko Kebijakan	Kebijakan pemerintah pusat/daerah/desa yang tidak sinkron dapat menyebabkan hambatan	ROO.25.13.16.127	12	Kurangnya sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang aturan kerjasama antara Desa dengan Pihak Ketiga	Kesalahan administratif, seperti dokumen yang tidak sesuai atau keputusan yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku	Pemerintah kabupaten atau kecamatan menyelenggarakan sosialisasi intensif kepada aparatur desa tentang peraturan terkait kerja sama desa dengan Pihak Ketiga	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Kepatuhan	Pemerintah Desa belum sepenuhnya melaksanakan kerjasama antar Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	ROO.25.13.16.128	9	Pemerintah Desa belum memahami bahwa PKS sebagai pedoman dalam Kerjasama Desa dengan Pihak ketiga sangat penting dalam mencapai tujuan bersama	Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Permakades di desa	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Fraud	Manipulasi data atau penyalahgunaan dalam proses penyusunan, penetapan, atau pelaksanaan PKS	ROO.25.13.16.129	6	1) Adanya kepentingan pribadi atau kelompok yang mempengaruhi proses penetapan PKS 2) Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kerjasama	Potensi kerugian keuangan dan sosial akibat penyalahgunaan kewenangan	1) Menetapkan sanksi tegas 2) Memperkuat pengawasan dan audit internal dalam proses penyusunan dan pelaksanaan PKS	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Pemangku Kepentingan	Adanya konflik personal, perbedaan pandangan kedua belah pihak dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang efektif	ROO.25.13.16.130	8	Perbedaan kepentingan antara Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dapat menghambat kerjasama	Kerjasama yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak menjadi tertunda atau tidak dapat terlaksana	Membangun forum dialog antara Desa dengan Pihak Ketiga untuk menyelesaikan konflik dan membangun kepercayaan	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Operasional	Kurangnya efektivitas proses fasilitasi dan pendampingan antar desa berpotensi menghambat terbentuknya kerjasama	ROO.25.13.16.131	8	Kurangnya koordinasi antar antar desa dalam merumuskan bentuk kerjasama	Proses pembangunan berbasis kerjasama desa menjadi terhambat	Meningkatkan koordinasi antara Desa dengan Pihak Ketiga melalui forum komunikasi rutin.	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Bencana	Bencana alam seperti tanah longsor, banjir, atau gempa berpotensi menghambat proses pertemuan, koordinasi, dan pelaksanaan kerjasama antar desa	ROO.25.13.16.132	3	1) Curah hujan ekstrem dan perubahan iklim. 2) Kondisi geografis desa yang rawan bencana.	Tertundanya pelaksanaan atau gagalnya kegiatan kerjasama antar desa.	Menyiapkan alternatif atau penyusunan ulang kerjasama antar Desa	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan	Tujuan: Meningkatkan kemandirian desa Sasaran: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan di desa serta Pemberdayaan Desa berbasis Masyarakat	Meningkatnya Kerja Sama antar Desa	Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	Sosialisasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	Risiko Kebijakan	Pemerintah Desa tidak memahami peraturan dan juknis terkait dengan Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga	ROO.25.13.16.133	9	1) Belum adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. 2) Kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap regulasi yang berlaku.	1) Terhambatnya proses pengajuan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga. 2) Menurunnya minat pihak ketiga untuk bermitra dengan desa.	1) Melakukan sinkronisasi regulasi antara pemerintah daerah dan pusat terkait kerjasama desa. 2) Mengadakan sosialisasi rutin kepada pemerintah desa mengenai aturan dan prosedur kerjasama dengan pihak ketiga.	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Kepatuhan	Pemerintah desa belum mematuhi ketentuan dan prosedur kerjasama dengan pihak ketiga	ROO.25.13.16.134	16	Kurangnya pemahaman desa terhadap regulasi dan prosedur kerjasama	Kerjasama desa dengan pihak ketiga tidak berjalan optimal.	Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai prosedur kerjasama	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Fraud	Penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga	ROO.25.13.16.135	6	1) Kurangnya transparansi dalam proses pengajuan dan pelaporan kerjasama 2) Lemahnya pengawasan internal dari pemerintah daerah atau pendamping	Anggaran dan sumber daya desa berpotensi disalahgunakan.	1) Meningkatkan transparansi laporan dan anggaran terkait kerjasama desa. 2) Melakukan monitoring dan audit internal secara berkala	Kepala Dinpermares	Januari-Desember

						Risiko Pemangku Kepentingan	dukungan dari pihak terkait (stakeholder) menghambat pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga	ROO.25.13.16.136	6	1) Minimnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan pihak ketiga. 2) Perbedaan kepentingan atau prioritas antara desa dan stakeholder.	Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga menjadi tertunda atau tidak optimal.	Meningkatkan koordinasi rutin antara desa, pihak ketiga, dan pemerintah daerah.	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
						Risiko Operasional	fasilitasi dan pendampingan yang tidak maksimal menghambat Kerjasama Desa dengan Pihak ketiga	ROO.25.13.16.137	8	Kurangnya koordinasi antar desa dan Pihak Ketiga dalam merumuskan bentuk kerjasama	Proses Kegiatan kerjasama desa dengan Pihak Ketiga menjadi terhambat	Meningkatkan koordinasi antar desa melalui forum komunikasi rutin.	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
						Risiko Bencana	Terjadinya perubahan cuaca ekstrem pada saat pertemuan dan koordinasi desa dengan pihak ketiga	ROO.25.13.16.138	3	1) Perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem. 2) Kurangnya prediksi dini atau sistem peringatan cuaca di desa. 3) Lokasi pertemuan berada di area terbuka atau rawan terdampak cuaca.	Pertemuan dan koordinasi desa dengan pihak ketiga tertunda atau batal.	1) Menyusun jadwal alternatif atau metode daring untuk pertemuan jika cuaca ekstrem terjadi. 2) Memilih lokasi cadangan yang aman dari cuaca ekstrem.	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat	Tujuan: Meningkatkan kemandirian desa Sasaran: Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan di desa serta Pemberdayaan Desa berbasis Masyarakat	Meningkatnya Kerja Sama antar Desa	Persentase kerjasama Desa dengan pihak ketiga	Pendampingan Pelaksanaan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Risiko Kebijakan	Ketidaksesuaian antara regulasi daerah dan peraturan pusat terkait mekanisme kerjasama desa dengan pihak ketiga	ROO.25.13.16.139	6	1) Belum adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. 2) Kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap regulasi yang berlaku.	1) Terhambatnya proses pengajuan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga. 2) Menurunnya minat pihak ketiga untuk bermitra dengan desa.	1) Melakukan sinkronisasi regulasi antara pemerintah daerah dan pusat terkait kerjasama desa. 2) Mengadakan sosialisasi rutin kepada pemerintah desa mengenai aturan dan prosedur kerjasama dengan pihak ketiga.	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
						Risiko Kepatuhan	Belum semua desa mematuhi ketentuan dan prosedur kerjasama dengan pihak ketiga	ROO.25.13.16.140	16	Kurangnya pemahaman desa terhadap regulasi dan prosedur kerjasama	Kerjasama desa dengan pihak ketiga tidak berjalan optimal.	Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai prosedur kerjasama	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
						Risiko Fraud	Manipulasi data atau penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga	ROO.25.13.16.141	4	1) Kurangnya transparansi dalam proses pengajuan dan pelaporan kerjasama 2) Lemahnya pengawasan internal dari pemerintah daerah atau pendamping	Anggaran dan sumber daya desa berpotensi disalahgunakan.	1) Meningkatkan transparansi laporan dan anggaran terkait kerjasama desa. 2) Melakukan monitoring dan audit internal secara berkala	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
						Risiko Pemangku Kepentingan	Kurangnya dukungan atau koordinasi dari pihak terkait (stakeholder) dapat menghambat pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga	ROO.25.13.16.142	6	1) Minimnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan pihak ketiga. 2) Perbedaan kepentingan atau prioritas antara desa dan stakeholder.	Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga menjadi tertunda atau tidak optimal.	Meningkatkan koordinasi rutin antara desa, pihak ketiga, dan pemerintah daerah.	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
						Risiko Operasional	Kurangnya efektivitas proses fasilitasi dan pendampingan Kerjasama Desa dengan Pihak ketiga berpotensi menghambat terbentuknya kerjasama	ROO.25.13.16.143	6	Kurangnya koordinasi antar desa dan Pihak Ketiga dalam merumuskan bentuk kerjasama	Proses Kegiatan kerjasama desa dengan Pihak Ketiga menjadi terhambat	Meningkatkan koordinasi antar desa melalui forum komunikasi rutin.	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
						Risiko Bencana	Terjadinya perubahan cuaca ekstrem pada saat pertemuan dan koordinasi desa dengan pihak ketiga	ROO.25.13.16.144	2	1) Perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem. 2) Kurangnya prediksi dini atau sistem peringatan cuaca di desa. 3) Lokasi pertemuan berada di area terbuka atau rawan terdampak cuaca.	Pertemuan dan koordinasi desa dengan pihak ketiga tertunda atau batal.	1) Menyusun jadwal alternatif atau metode daring untuk pertemuan jika cuaca ekstrem terjadi. 2) Memilih lokasi cadangan yang aman dari cuaca ekstrem.	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
				Persentase penyusunan LPPD tepat waktu	Sosialisasi Sistematis Penyusunan LPPD	Risiko Kebijakan	Kebijakan tidak sesuai regulasi	ROO.25.13.16.145	6	Kebijakan sosialisasi belum mengacu pada aturan terbaru (UU Desa, Permendagri, Perbup)	Desa menyusun laporan tidak sesuai format; berpotensi teguran administratif	Review regulasi sebelum sosialisasi; sinkronisasi dengan peraturan pusat & daerah	Kepala Dinpermades	Oktober -Desember

							Tidak dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi	ROO.25.13.16.213	4	Kurangnya komitmen atau adanya kepentingan tertentu	Hasil evaluasi tidak bermanfaat dan potensi pengulangan kesalahan	Mekanisme monitoring dan tindak lanjut yang diawasi publik			
							Risiko Pemangku Kepentingan	Konflik kepentingan antara pemerintah desa dan BPD	ROO.25.13.16.214	6	Perbedaan persepsi atau kepentingan	Hasil evaluasi bias dan menimbulkan ketegangan internal	Meningkatkan koordinasi formal dan membuat notulen resmi rapat	Kepala Dinpermades	April, Oktober
								Kurangnya dukungan dari pemerintah kecamatan/daerah	ROO.25.13.16.215	4	Koordinasi yang lemah	Laporan evaluasi tidak sesuai standar dan ditolak	Membangun komunikasi rutin dengan kecamatan dan dinas terkait		
								Ketidajelasan peran antar pemangku kepentingan	ROO.25.13.16.216	3	Tidak adanya pembagian tugas yang jelas	Proses evaluasi tidak efektif dan terjadi tumpang tindih	Menyusun SK tim evaluasi dengan uraian tugas rinci		
								Ketidakharmonisan hubungan antar pemangku kepentingan	ROO.25.13.16.217	2	Adanya perbedaan politik atau kepentingan ekonomi	Proses evaluasi terganggu dan memicu konflik sosial	Mengutamakan musyawarah mufakat dan mediasi independen		
								Tidak adanya mekanisme tindak lanjut bersama	ROO.25.13.16.218	3	Hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti	Masalah yang sama berulang setiap tahun	Membuat rencana aksi bersama dengan monitoring rutin		
								Kurangnya kapasitas pemangku kepentingan dalam memahami evaluasi	ROO.25.13.16.219	3	Minimnya pelatihan dan bimbingan teknis	Hasil evaluasi sulit dipahami dan tidak digunakan sebagai dasar kebijakan	Memberikan pelatihan teknis terkait evaluasi LPPDesa		
							Risiko Operasional	Keterlambatan proses evaluasi	ROO.25.13.16.220	6	Kurangnya perencanaan jadwal dan pengendalian waktu	Laporan evaluasi tidak selesai tepat waktu dan berpotensi terkena sanksi	Menyusun timeline rinci dan monitoring pelaksanaan	Kepala Dinpermades	April, Oktober
								Dokumen pendukung tidak lengkap	ROO.25.13.16.221	6	Lemahnya sistem administrasi dan arsip	Proses evaluasi tidak akurat dan memperlambat hasil	Membangun sistem dokumentasi yang tertib dan digital		
								Kurangnya sumber daya manusia pelaksana	ROO.25.13.16.222	4	Keterbatasan staf yang memahami teknis evaluasi	Kualitas hasil evaluasi menurun dan tidak sesuai standar	Melakukan pelatihan teknis dan pembagian tugas yang jelas		
								Gangguan teknis peralatan (komputer/proyektor)	ROO.25.13.16.223	3	Peralatan tidak terpelihara atau rusak	Proses presentasi dan analisis data terganggu	Menyediakan peralatan cadangan dan melakukan perawatan rutin		
								Akses data sulit diperoleh	ROO.25.13.16.224	3	Koordinasi antar perangkat desa kurang baik	Evaluasi terhambat karena data tidak tersedia tepat waktu	Memperkuat koordinasi dan menetapkan standar penyampaian data		
								Tumpang tindih kegiatan dengan agenda desa lain	ROO.25.13.16.225	3	Kurangnya sinkronisasi perencanaan jadwal	Peserta terbagi dan evaluasi tidak berjalan optimal	Menentukan jadwal bersama dan menghindari benturan agenda		
								Gangguan jaringan internet untuk evaluasi daring	ROO.25.13.16.226	6	Infrastruktur internet desa kurang memadai	Paparan materi atau laporan terganggu dan mengurangi efektivitas	Menyiapkan opsi offline seperti dokumen cetak atau rekaman		
							Risiko Bencana	Banjir mengganggu proses evaluasi	ROO.25.13.16.227	2	Curah hujan tinggi dan drainase buruk	Proses evaluasi tertunda atau dokumen rusak	Menentukan lokasi evaluasi yang aman dan menyimpan dokumen secara digital	Kepala Dinpermades	April -Oktober
								Gempa bumi saat pelaksanaan evaluasi	ROO.25.13.16.228	2	Wilayah rawan gempa	Ancaman keselamatan peserta dan kerusakan fasilitas	Menyusun prosedur evaluasi darurat dan memilih lokasi sesuai standar keselamatan		
								Tanah longsor menghambat akses peserta	ROO.25.13.16.229	2	Lokasi di daerah rawan longsor	Peserta tidak dapat hadir dan evaluasi tertunda	Menentukan lokasi aman dan menyiapkan jalur akses alternatif		
								Kebakaran di lokasi evaluasi	ROO.25.13.16.230	2	Instalasi listrik tidak aman atau kelalaian manusia	Kerusakan fasilitas dan risiko keselamatan peserta	Menyediakan APAR, memastikan lokasi sesuai standar keselamatan peserta		
								Angin kencang/puting beliung merusak fasilitas	ROO.25.13.16.231	2	Cuaca ekstrem yang tidak terprediksi	Peralatan evaluasi rusak dan kegiatan terganggu	Memilih ruangan tertutup dan memantau prakiraan cuaca		
								Pandemi/wabah penyakit memular	ROO.25.13.16.232	2	Penyebaran penyakit di tengah masyarakat	Risiko kesehatan peserta dan pembatalan evaluasi	Menerapkan protokol kesehatan dan opsi evaluasi daring		
								Kekeringan ekstrem berdampak pada kesehatan peserta	ROO.25.13.16.233	2	Ketersediaan air bersih terbatas	Kenyamanan dan kesehatan peserta terganggu	Menyediakan suplai air bersih selama kegiatan evaluasi		
								Petir saat evaluasi di ruang terbuka	ROO.25.13.16.234	2	Cuaca buruk dan kurang perlindungan	Peralatan elektronik rusak dan ancaman keselamatan peserta	Memilih ruangan tertutup dan menyiapkan penangkal petir		
								Letusan gunung berapi	ROO.25.13.16.235	2	Wilayah dekat kawasan rawan erupsi	Kegiatan evaluasi dibatalkan, desa terdampak bencana	Menyusun rencana kontinjensi dan memantau status aktivitas gunung		
								Kabut tebal/mendung ekstrem	ROO.25.13.16.236	2	Perubahan cuaca mendadak	Transportasi peserta terganggu dan keterlambatan evaluasi	Menentukan jadwal cadangan dan opsi evaluasi daring		

			Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel	Presentase penyusunan RKPDes tepat waktu	Membuat tahapan dalam penyusunan RKPDes	Risiko Kebijakan	Tidak diberikan proses tahapan dalam penyusunan RKPDes	ROO.25.13.16.237	1	Kurangnya pemahaman tentang pentingnya tahapan penyusunan RKPDes	Tidak ada pedoman tentang tahapan waktu dalam Penyusunan RKPDes	Melakukan sosialisasi terkait penyusunan RKPDes beserta pedoman-pedomannya, termasuk tahapannya	Kepala Dinperdades	Januari-Desember
						Risiko Kepatuhan	Penyampaian tahapan-tahapan dalam penyusunan RKPDes belum dilaksanakan sesuai ketentuan	ROO.25.13.16.238	3	Kurangnya perhatian akan pentingnya bimbingan teknis dan sosialisasi regulasi RKPDes.termasuk tahap-tahapannya	RKPDes disusun tidak sesuai dengan tahap-tahapan yang telah ditentukan sehingga penetapan Perdes RKPDes menjadi tidak tepat waktu	Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang prosedur penyusunan RKPDes	Kepala Dinperdades	Januari-Desember
						Risiko Fraud	Arahan untuk melakukan penyusunan dokumen tanpa memperhatikan tahapan-tahapannya agar terlihat selesai tepat waktu dengan data atau rencana yang belum tepat	ROO.25.13.16.239	3	Kepentingan untuk mencukupi penilaian agar dokumen RKPDes terlihat ditetapkan tepat waktu	1) Dokumen RKPDes tidak berdasarkan data dan rencana yang sesuai kondisi desa 2) Target penyusunan RKPDes tepat waktu tetapi kualitas belum terpenuhi	1. Melakukan pendampingan dalam penyusunan RKPDes bekerjasama dengan TPP dan Kecamatan 2) Monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan RKPDes.	Kepala Dinperdades	Januari-Desember
						Risiko Pemangku Kepentingan	Tahapan penyusunan dibuat pada akhir waktu penyusunan tapi seolah-olah sudah disampaikan kepada Pemerintah Desa	ROO.25.13.16.240	3	Kepentingan untuk mencukupi penilaian agar dokumen RKPDes terlihat ditetapkan tepat waktu	Penetapan Perdes RKPDes tepat waktu tetapi kualitas belum terpenuhi	1. Melakukan pendampingan dalam penyusunan RKPDes bekerjasama dengan TPP dan Kecamatan 2) Monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan RKPDes.	Kepala Dinperdades	Januari-Desember
						Risiko Operasional	Kurangnya pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Perdes RKPDes	ROO.25.13.16.241	4	Kurangnya perhatian terhadap pentingnya Perdes RKPDes yang sesuai dengan potensi dan permasalahan di desa	kegiatan tidak tepat sasaran	1. Melakukan pendampingan dalam penyusunan RKPDes bekerjasama dengan TPP dan Kecamatan 2) Monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan RKPDes.	Kepala Dinperdades	Januari-Desember
						Risiko Bencana	Terjadinya Bencana alam maupun non alam akan meeggangu tahapan-tahapan proses penyusunan sehingga Penetapan Perdes RKPDes tidak tepat waktu	ROO.25.13.16.242	1	Tidak mempertimbangkan adanya gangguan cuaca ekstrim dan perubahan iklim	Penyusunan RKPDes tidak tepat waktu	Membuat tahapan perencanaan penyusunan RKPDes memperhatikan dampak cuaca ekstrim dan perubahan iklim	Kepala Dinperdades	Januari-Desember
					Melaksanakan fasilitasi RKPDes	Risiko Kebijakan	Peraturan daerah atau pedoman penyusunan RKPDes belum sinkron dengan regulasi pusat	ROO.25.13.16.243	3	1) Perubahan regulasi pusat atau daerah tidak tersosialisasi dengan baik. 2) Ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan daerah dan praktik di lapangan	RKPDes disusun tidak tepat waktu.	Melakukan sosialisasi terkait regulasi penyusunan RKPDes dan pendampingan dalam penyusunan RKPDes	Kepala Dinperdades	Januari-Desember
						Risiko Kepatuhan	Penyampaian tata cara penyusunan RKPDes belum dilaksanakan sesuai ketentuan	ROO.25.13.16.244	2	1) Desa belum memahami seluruh ketentuan dan prosedur penyusunan RKPDes. 2) Kurangnya bimbingan teknis dan sosialisasi regulasi RKPDes.	RKPDes disusun tidak tepat waktu.	Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang prosedur penyusunan RKPDes	Kepala Dinperdades	Januari-Desember
						Risiko Fraud	Arahan untuk melakukan manipulasi dokumen RKPDes agar terlihat selesai tepat waktu padahal data atau rencana belum lengkap	ROO.25.13.16.245	2	Kepentingan untuk mencukupi penilaian agar dokumen RKPDes terlihat ditetapkan tepat waktu	1) Laporan tidak mencerminkan kondisi nyata. 2) Target penyusunan RKPDes tepat waktu tetapi kualitas belum terpenuhi	1. Melakukan pendampingan dalam penyusunan RKPDes bekerjasama dengan TPP dan Kecamatan 2) Monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan RKPDes.	Kepala Dinperdades	Januari-Desember
						Risiko Pemangku Kepentingan	Dokumen RKPDes terlihat ditetapkan tepat waktu dengan lampiran-lampiran dokumen seadanya yang tidak memenuhi persyaratan	ROO.25.13.16.246	2	Kepentingan untuk mencukupi penilaian agar dokumen RKPDes terlihat ditetapkan tepat waktu	Penetapan Perdes RKPDes tepat waktu tetapi kualitas belum terpenuhi	1. Melakukan pendampingan dalam penyusunan RKPDes bekerjasama dengan TPP dan Kecamatan 2) Monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan RKPDes.	Kepala Dinperdades	Januari-Desember
						Risiko Operasional	Kurangnya pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Perdes RKPDes	ROO.25.13.16.247	3	Kurangnya perhatian terhadap pentingnya Perdes RKPDes yang sesuai dengan potensi dan permasalahan di desa	kegiatan tidak tepat sasaran	1. Melakukan pendampingan dalam penyusunan RKPDes bekerjasama dengan TPP dan Kecamatan 2) Monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan RKPDes.	Kepala Dinperdades	Januari-Desember
						Risiko Bencana	Terjadinya Bencana alam maupun non alam akan meggangu proses pelaksanaan kegiatan sehingga Penetapan Perdes RKPDes tidak tepat waktu	ROO.25.13.16.248	1	Tidak mempertimbangkan adanya gangguan cuaca ekstrim dan perubahan iklim	Penyusunan RKPDes tidak tepat waktu	Membuat perencanaan penyusunan RKPDes memperhatikan dampak cuaca ekstrim dan perubahan iklim	Kepala Dinperdades	Januari-Desember

			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD	Sosialisasi LKD	Risiko Kebijakan	Pemerintah Desa tidak memahami peraturan dan junknis terkait LKD	ROO.25.13.16.249	6	1) Perbedaan fokus dan tujuan antara regulasi pusat dan daerah. 2) Kurangnya sosialisasi dan pemahaman bersama tentang isi peraturan tersebut	Potensi terjadinya pelanggaran aturan karena tumpang tindih regulasi	1) Sosialisasi bersama tentang isi dan penerapan Permendagri serta Perbup kepada pemerintah desa 2) pendampingan teknis kepada Pemerintah Desa	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Kepatuhan	Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang LKD belum sesuai dengan peraturan yang berlaku	ROO.25.13.16.250	8	1) Keterbatasan SDM, anggaran, dan teknis dapat menghambat kemampuan desa untuk menyusun peraturan 2) Kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang kewajiban menetapkan Perdes LKD. 3) Prioritas desa yang lebih fokus pada program lain	1) Desa tidak menyusun perdes 2) Pengelolaan dan fungsi LKD menjadi tidak efektif dan kurang terarah 3) Kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan	1) Komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Kecamatan dan bagian Hukum untuk mendukung proses penyusunan Perdes LKD 2) Sosialisasi kewajiban penyusunan Perdes LKD 3 Koordinasi dengan kecamatan dalam pengawasan dan fasilitasi proses penyusunan Perdes di tingkat Desa	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
							pengurus LKD belum menyusun program kerja	ROO.25.13.16.251	8					
							Pengurus LKD tidak menyusun laporan pelaksanaan kegiatan	ROO.25.13.16.252	8					
						Risiko Fraud	Penyalahgunaan kewenangan dalam pembentukan atau pengelolaan LKD untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu	ROO.25.13.16.253	4	Belum maksimalnya pengawasan internal di desa	Terjadinya penyalahgunaan wewenang	1) Meningkatkan pengawasan 2) Memberikan sanksi sesuai aturan	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
							pelaksanaan tugas LKD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	ROO.25.13.16.254	6	Belum maksimalnya pengawasan internal di desa	Terjadinya penyalahgunaan wewenang	1) Meningkatkan pengawasan 2) Memberikan sanksi sesuai aturan		
						Risiko Pemangku Kepentingan	adanya konflik internal masyarakat di desa	ROO.25.13.16.255	8	Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam desa, seperti pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat umum	Menghambat proses penyusunan peraturan Desa tentang LKD dengan menyebabkan ketidaksepakatan atau konflik antar mereka	Pengawasan, monitoring, dan evaluasi	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Operasional	LKD tidak berfungsi sesuai tupoksinya	ROO.25.13.16.256	4	1) Belum ditetapkannya Perdes tentang LKD 2) kesenjangan alokasi biaya operasional bagi LKD oleh Pemerintah Desa	LKD berjalan sesuai kebiasaan	Peningkatan Kapasitas bagi Pengurus LKD dan melakukan Koordinasi dengan Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Bagian Hukum untuk penyusunan Perdes LKD	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Bencana	Bencana atau cuaca ekstrem mengikibit terhambatnya kegiatan-kegiatan	ROO.25.13.16.257	2	1) cuaca ekstrem dan perubahan iklim. 2) Kondisi geografis desa yang rawan bencana.	Kegiatan LKD tidak berjalan sesuai rencana	Menyiapkan alternatif metode pertemuan (online)	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase laporan LKD	Pendampingan Pembentukan LKD	Risiko Kebijakan	Perbedaan atau ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah terkait LKD	ROO.25.13.16.258	4	1) Perbedaan fokus dan tujuan antara regulasi pusat dan daerah. 2) Kurangnya sosialisasi dan pemahaman bersama tentang isi peraturan tersebut	Potensi terjadinya pelanggaran aturan karena tumpang tindih regulasi	1) Sosialisasi bersama tentang isi dan penerapan Permendagri serta Perbup kepada pemerintah desa 2) pendampingan teknis kepada Pemerintah Desa	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Kepatuhan	Belum semua Desa mematuhi kewajiban menetapkan Perdes tentang LKD sesuai dengan peraturan yang berlaku	ROO.25.13.16.259	16	1) Keterbatasan SDM, anggaran, dan teknis dapat menghambat kemampuan desa untuk menyusun peraturan 2) Kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang kewajiban menetapkan Perdes LKD. 3) Prioritas desa yang lebih fokus pada program lain	1) Desa tidak menyusun perdes 2) Pengelolaan dan fungsi LKD menjadi tidak efektif dan kurang terarah 3) Kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan	1) Komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa, Kecamatan dan bagian Hukum untuk mendukung proses penyusunan Perdes LKD 2) Sosialisasi kewajiban penyusunan Perdes LKD 3 Koordinasi dengan kecamatan dalam pengawasan dan fasilitasi proses penyusunan Perdes di tingkat Desa	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Fraud	Penyalahgunaan kewenangan dalam pembentukan atau pengelolaan LKD untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu	ROO.25.13.16.260	6	Belum maksimalnya pengawasan internal di desa	Terjadinya penyalahgunaan wewenang	1) Meningkatkan pengawasan 2) Memberikan sanksi sesuai aturan	Kepala Dinpermares	Januari-Desember

						Risiko Pemangku Kepentingan	Lingkungan sosial yang tidak stabil atau adanya konflik internal di desa	ROO.25.13.16.261	6	Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam desa, seperti pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat umum	Menghambat proses penyusunan peraturan Desa tentang LKD dengan menyebabkan ketidaksepakatan atau konflik antar mereka	Pengawasan, monitoring, dan evaluasi	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
						Risiko Operasional	LKD tidak berfungsi sesuai tupoksinya	ROO.25.13.16.262	4	Belum ditetapkannya Perdes tentang LKD	LKD berjalan sesuai kebiasaan	Peningkatan Kapasitas bagi Pengurus LKD dan melakukan Koordinasi dengan Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Bagian Hukum untuk penyusunan Perdes LKD	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
						Risiko Bencana	Bencana atau cuaca ekstrem mengikibit terhambatnya kegiatan-kegiatan	ROO.25.13.16.263	2	1) cuaca ekstrem dan perubahan iklim. 2) Kondisi geografis desa yang rawan bencana.	Kegiatan LKD tidak berjalan sesuai rencana	Menyiapkan alternatif metode pertemuan (online)	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan	Terwujudnya Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan			Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	Sosialisasi Peningkatan BUMDesa	Risiko Kebijakan	Pengelola BUMDesa tidak memahami sepenuhnya peraturan dan Juknis terkait dengan pengelolaan BUMDesa	ROO.25.13.16.264	9	1) Minimnya Bintek dari pemerintah desa atau Dinpermades kepada pengelola BUMDes 2) Rendahnya kompetensi Pengelola BUMDesa	Pengelolaan BUMDesa tidak sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan kesalahan administrasi maupun operasional	Dilaksanakan Bintek Pengelola BUMDesa kepada Pengurus BUMDesa	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
						Risiko Kepatuhan	Pengelola BUMDesa tidak menyusun laporan pertanggungjawaban secara rutin sesuai dengan ketentuan	ROO.25.13.16.265	8	1) Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan BUMDesa dari Penasehat dan Pengawas BUMDesa 2) Rendahnya kompetensi Pengeteloa BUMDesa	Pengelolaan BUMDesa tidak sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan kesalahan administrasi maupun operasional sehingga BUMDesa merugi	Pembinaan dan Pendampingan dari Dinpermades, Kecamatan dan TPP	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
					Pengelola BUMDesa menyusun laporan pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan		ROO.25.13.16.266	9						
					Tidak melaksanakan laporan pertanggungjawaban melalui Musdes		ROO.25.13.16.267	8						
					Pengelola BUMDesa tidak menyusun program kerja sesuai ketentuan		ROO.25.13.16.268	9						
					SOP pengelolaan BUMDesa tidak ada		ROO.25.13.16.269	8						
						Risiko Fraud	Pengelolaan keuangan BUMDesa tidak transparan dan tidak terdokumentasi dengan baik	ROO.25.13.16.270	8	1) Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan BUMDesa dari Penasehat dan Pengawas BUMDesa 2) Rendahnya kompetensi Pengeteloa BUMDesa	Meningkatkan potensi penyalahgunaan dana	Pembinaan dan Pendampingan dari Dinpermades, Kecamatan dan TPP	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
					Penyalahgunaan wewenang		ROO.25.13.16.271	6						
					Penyampaian Informasi tidak benar		ROO.25.13.16.272	4						
						Risiko Pemangku Kepentingan	Organ BUMDesa (Pengawas, Penasihat) tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan	ROO.25.13.16.273	8	Kurangnya Komunikasi antara Pengelola, Penasehat dan Pengawas BUMDesa	Pelaksanaan Kegiatan BUMDesa tidak didukung oleh administrasi yang lengkap	Pembinaan dan Pendampingan dari Dinpermades, Kecamatan dan TPP	Kepala Dinpermades	Januari-Desember
					Ketidakharmisan hubungan antara Pemerintah Desa, Pengelola BUMDesa dan Pengawas BUMDesa		ROO.25.13.16.274	8						
					Pengelola BUMDesa tidak bisa membangun kepercayaan terhadap pihak ketiga dalam hal pelaksanaan kerjasama		ROO.25.13.16.275	6						

						Risiko Operasional	pengelolaan BUMDesa tidak maksimal	ROO.25.13.16.276	9	1) Keterbatasan SDM Pengelola, 2) keterbatasan sarpras pendukung kelembagaan dalam pengelolaan BUMDesa 3) seringnya pergantian personil pengurus BUMDesa 4) keterbatasan penyertaan modal dari Pemerintah desa	Kegiatan BUMDesa tidak berjalan dengan optimal	Pembinaan dan Pendampingan dari Dinpermares, Kecamatan dan TPP	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Bencana	Bencana atau cuaca ekstrem mengikibit terhambatnya kegiatan-kegiatan BUMDesa	ROO.25.13.16.277	2	1) cuaca ekstrem dan perubahan iklim. 2) Kondisi geografis desa yang rawan bencana.	Kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program kerja BUMDesa	Membuat perencanaan yang memperhatikan dampak cuaca ekstrem dan perubahan iklim	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
				Persentase BUM Desa Maju dan berkembang	Pendampingan Penilaian Peningkatan BUMDesa	Risiko Kebijakan	Pengelola BUMDesa tidak memahami sepenuhnya peraturan dan Juknis terkait dengan pengelolaan BUMDesa	ROO.25.13.16.278	9	1) Minimnya Bintek dari pemerintah desa atau Dinpermares kepada pengelola BUMDes 2) Rendahnya kompetensi Pengelola BUMDesa	Pengelolaan BUMDesa tidak sesuai ketentuan, berisiko menimbulkan kesalahan administrasi maupun operasional	Dilaksanakan Bintek Pengelola BUMDesa kepada Pengurus BUMDesa	Kepala Dinpermares	Januari-Desember
						Risiko Kepatuhan	Pengelola BUMDesa tidak menyusun laporan pertanggungjawaban secara rutin sesuai dengan ketentuan	ROO.25.13.16.279	8	1) Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan BUMDesa dari Penasihat dan Pengawas BUMDesa	Pengelolaan BUMDesa tidak sesuai ketentuan, berisiko menimbulkan kesalahan administrasi maupun operasional	Pembinaan dan Pendampingan dari Dinpermares, Kecamatan dan TPP	Kepala Dinpermares	Januari-Desember

